KENTINGAN

DETAK NURANI MAHASISWA

MAJALAH • MAHASISWA • UNS

- **PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILU**
- Mudrick : " di Indonesia harus ada Reformasi "

EDISI 04/TH.IV/1997

Segenap Pengurus

Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Kentingan

Mengucapkan

Selamat Datang Mahasiswa Baru
Di Kampus Perjuangan

Masuki dunia baru
Satukan langkah dan kepalkan tangan
Untuk meraih kemenangan
Bersama orang - orang tertindas

SURAT REDAKSI

Sungguh usaha yang cukup berat bagi kami untuk menelorkan edisi ini. Tidak bisa kami sangkal memang bahwa militansi kami sebagai aktivis pers mahasiswa terpaksa harus kami bagi-bagi dengan militansi pada kegiatan lainnya. Apalagi konsep manajemen dan kepemimpin dalam UKM pers yang baru berusia empat tahun ini belum solid dan baku. Dan, harap dimaklumi bila kami terpaksa harus telat terbit lagi. Dan kami mohon maaf untuk itu semua.

Yang pasti, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) sebagai induk semang majalah Kentingan selama ini tidak vakum meski kami gagal menerbitkan Kentingan tepat waktu. Kami berupaya keras menerbitkan tabloid Saluran Sebelas, melakukan serangkaian kondolisasi, dan merekrut anggota baru, April lalu.

Sebagian warga baru LPM **Kentingan** Kami siap berjuang Bung !

Boleh dibilang LPM memang kurang kader militan. Kami hanya mempunyai beberapa gelintir personil yang dengan iklas, tanpa pretensi pribadi, tanggap pada masalah organisasi. Dan, sungguh hal yang menggembirakan tatkala anggota baru yang direkrut April lalu memperlihatkan sikap yang positif. Mereka tetap sabar mengunjungi markas LPM tiap Sabtu siang. Kepada merekalah kami berharap masa depan LPM terus berlanjut.

Pembaca, edisi ini kami tetap memilih tema politik. Bukannya kami memanjakan tema *beginian*, tapi setiap segi kehidupan kita sulit rasanya lepas dari muatan politis. Akan tetapi pada edisi selanjutnya kami akan terus berusaha memperbaiki diri dan menulis lebih variatif dibanding edisi sebelumnya. Dan ini sudah kami coba dengan menambah rubrik baru, dengan mangganti rubrik yang ada sebelumnya.

Tentunya ini tak lepas dari sumbang saran pembaca semua demia perbaikan-perbaikan edisi selanjutnya.

Salam Redaksi

■ **Diterbitkan oleh** Lembaga Pers Mahasiswa UNS (LPM UNS) ■ ISSN (dalam proses ■ **Pelindung:** Prof Drs Harris Mudjiman, PhD (Rektor UNS) ■ **Penasihat:** Drs. Suparnadi (PR III UNS) ■ **Pembimbing:** Dr. Andrik Purwasito, DEA, Drs Yant Mudjianto ■ **Pemimpin Redaksi :** Ali Rustamaji ■ **Sekretaris Redaksi :** Endang Dwi Esti Yuli, S.Ked ■ **Sidang Redaksi :** Nurul HZ, Imron Rosyid TR Trijono, M Ridlo IMSA, S.Ked, Nurul HW ■ **Reporter :** Arief GAM, Abel dos Santos, Siti Nur Zanna, Anwar Fachurozzi, Ichwan P, Indah Nurul, Ahmad Rofik (Non Aktif) ■ **Artistik:** Basnendar, Fai ■ **Setter :** Ali Rustamaji, Imron TR.

LEMBAGA PERS MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET ■ Pemimpin Umum : Joko Budi Santoso ■**Sekretaris Umum :** Nurul Hidayati Z ■ **Bendahara Umum :** Nur Zanna ■ **Pemimpin Litbang:** Nanang BS ■ **Staff Litbang** Topik Gunawan (Non Aktif), Nurul HW ■ **Pemimpin Usaha :** Winarto ■ **Staf Usaha :** Zabidi, Sri Hidayah ■ **Pemimpin Redaksi Majalah :** Ali Rustamaji ■ **Pemimpin Redaksi Surat Kabar Mahasiswa :** Ulin Niam Yusron.

Magang: Siti Rokhmah, Alifiyanti, Diah Niken, Nadia, Himawan, Joko Waluyo, Ariyanto, Fadhil, Teguh, Sri Widyastuti, Nurima, Dina, Palupi, Puspita, Mukhlis,, Indri, Salim, Anhar.

Alamat Redaksi : LPM UNS Jl. Urip Sumoharjo 110 Surakarta 57128. Alamat Surat PO Box 1037 UNS B Surakarta 57126. Redaksi menerima sumbangan tulisan (artikel/opini/foto). Redaksi berhak mengubah tulisan sebutas tidak mengubah isi dan maknanya. Naskah diketik spasi ganda maksimal 5 halaman kuarto. Tulisan dan foto yang dimuat tidak selalu mencerminkan pendapat redaksi.

SAJIAN

FOKUS UTAMA

Kampanye pemilu sudah lama berlalu, masyarakat tenang kembali: Sebagai bentuk pendidikan politik, efektifkah pemilu (baca: kampanye) '97 kemarin?
Lalu, bagaimana kelanjutannya pendidikan pendidikan politik pasca pemilu?

9

FOKUS KHUSUS

Persaingan antar negara menuju era globalisasi semakin dekat saja. Jika suatu negara ingin bertahan dalam persaingan tersebut maka sejak dini harus sudah mempersiapkan segalanya, termasuk SDM-nya. Salah satu sarana peningkatan SDM adalah pemasyarakatan kewirausahan pada masyarakat termasuk kalangan akademisi. Benarkah dengan pemberiaan materi kewirausahaan harapan-harapan di atas akan tercapai?

23

FIGUR

Perjuangan memang tidak mulus dan selalu berhasil. Di sana banyak ditemui onak dan duri, bahkan nyawa pun bisa menjadi taruhannya. Begitulah yang dilakukan Mudrick Setiawan M Sangidoe, dalam berjuang menegakkan kebenaran yang diyakininya.

56

SAJIAN

KENTRUNG

Bandara Adi Sumarmo terus berkembang pesat, direncanakan bandara ini untuk go internasional. Upaya apa untuk mewujudkannya? Bagaimana kaitannya dengan kepariwisataan di Solo? Simak liputan Kentingan kali ini

50

SEKITAR KITA

Bengawan Solo lain dulu lain sekarang. Jika dulu banyak dimanfaatkan masyarakat sekitar diambil ikan, pasir, bercocok tanam atau bahkan untuk upacara ritual, sekarang tinggal kenangan saja.

27

Suara Mereka	06	*Artikel*	41,54
Artikel Utama	18	*Apresiasi*	48
Opini	31	*Serambi*	60
Akademika	33	*Cerpen*	63
Bidik	35	*Kolom*	66

SWARA MEREKA

Mahasiswa "Terkotak-kotak"

Disesalkan sikap Rektorat menolak pembentukan SMPT. Begitu, ungkap salah satu surat kabar tertanggal 19 April 1997. Sangat penulis sayangkan sikap Rektorat tersebut, yang telah menghambat aspirasi mahasiswa untuk membentuk SMPT. Saya bisa membayangkan kekecewaan mahasiswa saat penyelenggaraan musyawarah umumnya ditolak sedang hasil kerja SC yang dibentuk secara legal dan konstitusional diabaikan. Tentu saja hal ini menghancurkan impian mahasiswa memiliki SMPT.

Harus kita akui selama ini UNS tidak mempunyai SMPT sebagai wadah aktivitas mahasiswa tingkat universitas. Sedang yang ada hanya SMF dan MPMF yang lingkupnya jelas fakultas. Saya khawatir dengan hanya berkutat di fakultasnya masing-masing tanpa ada muara tingkat universitas akan mengakibatkan sikap egiosme fakultas, sehingga mahasiswa akan terkotak-kotak sesuai fakultasnnya.

Itu hanya satu sisi kekhawatiran penulis, tidakkah kekhawatiran-kekhawatiran yang lain akan muncul?

Retno Palupi
Matematik Pabelan

Keluhan Mahasiswa Hyperkes

Waktu saya lolos UMPTN dan di terima menjadi mahasiswa UNS di jurusan hyperkes, saya merasa senang sekali. Tetapi mengapa setelah di jalani saya merasa sedikit kecewa karena sebagai mahasiswa UNS kami seakan-akan bukan mahasiswa UNS. Letak kampus kami yang terpisah membuat kami seakan-akan terpencil dan terisolir.

Sudah siapkah kita untuk *bersaing*, kalau tidak akan masuk kotak

Memang dari segi fasilitas sudah mencukupi yakni tempatnya bersih dan cukup rindang, udaranya cukup segar. Akan tetapi yang tidak kami senangi yaitu letaknya yang dekat halte Panggung dengan suasana lalu lintas yang sangat ramai, sehingga jika mau kuliah rasanya *stress*. Dengan kampus yang terpisah kami juga sering ketinggalan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang diadakan di kampus maupun fakultas lain karena kurangnya informasi.

Demikianlah keluhan dari kami, semoga didengarkan dan mendapat perhatian.

Sri Widyastuti
Hyperkes '95

Usul 1

Rubrik Konsultasi Mahasiswa Saya berharap agar media keluaran LPM baik majalah Kentingan atau Saluran Sebelas, agar dilengkapi dengan salah satu rubrik yang saya anggap penting mengingat aktivitas kehidupan di kampus sangat dinamis sehingga perlu adanya wadah untuk menampung segala uneg-uneg dari mahasiswa.

Moch Fadhil
FH UNS

Usulan Saudara akan kami pertimbangkan

Usul 2

Saya punya usul *nich*, bagaimana kalau Kentingan frekuensi terbitnya lebih sering, misalnya 2 atau 3 bulan sekali. Biar kita nggak kelamaan nunggunya. Oh ya saya juga mau tanya, pendistribusian Kentingan kok kayaknya kurang merata ya? Soalnya di kampus saya pas edisi kemarin Kentingan *nggak nongol* barang selembar pun. *By the way*, semoga Kentingan makin tambah baik en bermutu. Sukses selalu!

Ririe-Hyp '95

Inginnya sih terbit seriutin itu, tapi kendalanya ternyata cukup banyak, misalnya masalah dana penerbitan. Untuk pendistribusian Kentingan sejak dari edisi Perdana sampai terakhir dipusatkan di Perpustakaan (Fakultas/Pusat). Kalau belum ditarik atau habis, cari saja di Perpus.

Usul 3

Dua tahun sudah saya menjalani kehidupan sebagai mahasiswa Pertanian UNS. perlahan-lahan saya berusaha beradaptasi dengan kehidupan kampus. Waktu demi waktu saya lalui. Lama-kelamaan saya mulai tahu dan mengerti, bagaimana isi kehidupan di kampus yang sebenarnya.

Demonstrasi mahasiswa yang memprotes bagaimana sulitnya menembus birokrasi kampus, perpustakaan baik pusat maupun fakultas dengan koleksi buku-bukunya yang sudah basi, BPK yang tidak pernah direvisi sehingga tidak sesuai lagi dengan kebutuhan mahasiswa ditengah maraknya kemajuan teknologi dan segala keganjilan yang ada, selalu mewarnai kehidupan kampus.

Dan satu fenomena lagi yang menjadi ganjalan di hati saya dan mungkin juga mahasiswa seangkatan saya, kalau salah satu UKM di UNS merupakan lembaga penerbitannya mahasiswa yang menghasilkan majalah Kentingan dan surat kabar Suara Sebelas (*yang benar Saluran Sebelas-***Red**). Tapi bagi mahasiswa FP, kedua produk tersebut belum begitu dikenal. Bahkan diperpustakaan FP pun kami sulit menjumpainya. Apa memang publikasinya yang kurang (dalam segala hal) atau mungkin stocknya yang terlalu sedikit sehingga kami tidak kebagian? Atau mungkin juga distribusinya yang kurang merata dan tidak efsien?

Buat redaksi Kentingan maupun Suara Sebelas, bagaimana publikasi dan distribusimu di FP. Semoga untuk edisi yang akan datang, kami tidak dilupakan. Kami menantimu di FP.

Alif,FP95

Koreksi Kecil Buat Kopma UNS

Kopma merupakan salah satu media katalisator bagi penumbuhan jiwa wirausaha (*entrepreunisasi*) mahasiswa. Dengan Kopma sebagai suatu bentuk pemberdayaan (*empowerment*) mahasiswa dibidang usaha yang profit diharapkan bisa muncul. Sebab, Kopma bisa dikatakan sebagai satu-satunya organisasi mahasiswa yang bersifat nirlaba.

Tetapi pada kenyataannya fungsi tersebut bisa dikatakan tidak terwujud. Dari pengalaman saya ketika ikut andil dalam sebuah kepanitiaan kegiatan yang dilakukan Kopma, saya temukan kelemahan yang menyebabkan fungsi di atas menjadi menyublim.

Sistem rekruitmen yang dilakukan terlihat kurang selektif, dan tidak tersosialisasikan secara luas. Akibatnya kepanitiaan yang terbentuk jauh dari sifat profesional --seperti perekrutan dari teman kost, teman ngobrol, atau latar belakang yang tidak nalar yang lain.

Sifat profit Kopma yang seharusnya bisa bermanfaat secara komunal bagi mahasiswa UNS menjelma menjadi bentuk pemanfaatan fasilitas oleh sebagian kecil panitia saja. Pada kasus yang saya ketahui banyak terjadi manipulasi dana operasional dan penghargaan yang berlebihan terhadap kerja diri sendiri hingga mereka (panitia) menuntut pemenuhan konsekuensi kerja yang menurut saya mengada-ada hingga menimbulkan kesenjangan dengan UKM-UKM lain.

Seharusnya untuk ini Kopma bisa melakukan kolaborasi dengan UKM-UKM lain yang nota bene *jareba* bentuk-bentuk kegiatannya yang bersifat nirlaba memiliki spirit pengorbanan yang lebih - tidak sedikit-sedikit minta ganti uang bensinlah, uang rokoklah, uang *krating daeng*-lah yang terkadang tidak kontekstual dan terkesan tabu untuk suatu proses pembelajaran.

Kondisi ini semakin diperparah ketika LPJ yang dilakukan tidak ditransparansikan pada semua anggota atau setidaknya seluruh panitia yang terlibat -- entah pada kegiatan-kegiatan Kopma yang lain yang saya tidak tahu

Mungkin ini sedikit ganjalan yang saya rasakan tentang Kopma. Mudah-mudahan bisa diperhatikan agar Kopma yang secara konsep sangat baik, pada realita faktual yang terjadi tidak menjadi buruk. Terimakasih.

Rohmah S. *Mhs UNS Pernah menjadi bendahara II PUMM yang diadakan Kopma*

KAMPANYE

Pendidikan Politik Atau Ajang Kerusuhan

Pesta Pemilu 1997, boleh dibilang, usai sudah. Dari berbagai tahapan pesta demokrasi tersebut, kegiatan kampanye adalah aktivitas yang paling banyak mendapat sorotan. Hal ini terjadi karena kampanye melibatkan populasi yang melimpah dibanding tahapan pemilu lainnya dan cenderung bersifat brutal-vandalistis.

Kebrutalan ini menjadi momentum yang paling mengerikan dan menjadi ciri khas pemilu keenam yang berhasil digelar Orde Baru. Memang tidak dapat disangkal lagi aksi massa yang terjadi selama kampanye pemilu tidak bisa dipisahkan dari berbagai gerakan massa yang sering terjadi jauh sebelum kampanye dimulai.

Esensi kampanye sebenarnya adalah sebagai sarana "promosi" Organisasi Peserta Pemilu (OPP) dalam menjual program politiknya dengan harapan massa yang menjadi sasaran promosi akan memilihnya pada pencoblosan 29 Mei lalu. Akan tetapi, sayangnya, para elit politik tidak kunjung dewasa pula dalam berpraktek politik. Sebab melalui berbagai retorikanya, kampanye pemilu malah berubah menjadi ajang mengumbar janji atau bahkan yang paling parah menjadi perang urat syaraf antar kosntestan. Sesama kontestan berusaha saling menjatuhkan satu dengan lainnya dengan berbagai tuduhan implisit.

Menurut **Adhie M Massardi**, pengamat sosial budaya, retorika para juru kampanye yang membakar massa ini menyebabkan massa yang sebelumnya dibiarkan mengambang dan tidak paham betul terhadap mentalitas dan akting para elit OPP, emosinya terombang-ambing sehingga membentur dinding-dinding demokrasi dan HAM yang dalam proses penegakan. Sehingga, tidak bisa dipungkiri bahwa berbagai aksi massa yang terjadi selama pemilu juga disulut oleh tindakan elit politik yang tidak kunjung dewasa meski bangsa kita telah melakukan enam kali pemilu.

Parahnya, kampanye pemilu boleh dianggap tidak mendukung upaya pendidikan politik rakyat yang sudah selayaknya dilakukan oleh partai politik. Kita tidak bisa melupakan bahwa kampanye pemilu tiap OPP selalu dipenuhi oleh massa dari OPP yang bersangkutan. Sedang warga negara yang berada di luar OPP , atau lazim dikenal massa mengambang, lebih senang tinggal di dalam rumah, menonton kampanye lewat balik jendela dan televisi. Kasarannya, warga telah mengalami *massa phobia*. Politik yang termanifestasikan melalui kampanye pemilu tidak lagi menjadi sesuatu yang menarik, yang perlu diikuti dan dikritisi. Melainkan, harus dijauhi karena dianggap hantu. Dan bila warga harus keluar dari persembunyiannya, ia harus rela untuk berpura-pura menjadi simpatisan OPP yang kebetulan sedang berkampanye. Dengan mengacung-acungkan jemarinya atau membawa atribut lainnya. Sungguh suatu yang menyedihkan.

Kampanye adalah sarana yang cukup strategis dalam usaha pendidikan politik. Kampanye merupakan ajang partai politik untuk menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi lainnya, mengembangkan dan memperkuat sikap politik warga negara dan melatih mereka menjalankan peran-peran politik tertentu, dan paham tentang pratek politik yang sedang berlangsung. Bila hal ini berhasil maka dampak positif yang terjadi adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban politiknya.

Kini, meski kampanye pemilu telah usai dan pendidikan politik tidak setransparan sebelumnya, akankah pendidikan politik berakhir ? Tentu saja kita berharap tidak. Sebab pendidikan politik adalah proses yang akan terus-menerus terjadi sepanjang hidup individu tersebut. Yang pasti, sudah selayaknya elit kekuasaan berbenah diri dan menciptakan mekanisme pendidikan politik yang lebih cerdas, demokratis, dan terbuka. Konsep massa mengambang yang menyebabkan terjadinya depolitisasi masyarakat sudah tidak relevan lagi. Tingginya pendidikan formal rakyat tidak bisa diimbangi dengan arogansi elit kekuasaan untuk memberikan pendidikan politik warganya yang manipulatif. Banyak hal yang dapat dipetik dari pengalaman kampanye tahun ini, banyaknya kerusuhan massal yang memakan banyak korban nyawa seharusnya menjadi pelajaran bahwa pengorbanan yang dilakukan oleh rakyat merupakan gambaran akan realitas dari keinginan rakyat untuk hidup dalam alam demokrasi yang segar. REDAKSI

PENDIDIKAN POLITIK PASCA PEMILU 1997

Belum lekang dari ingatan kita kemeriahan kampanye Pemilu 1997 yang telah usai beberapa waktu lalu. Kampanye merupakan kegiatan politik yang paling banyak melibatkan massa. Keterlibatan massa inilah yang menyebabkan kampanye disebut-sebut sebagai wadah pembelajaran politik rakyat yang paling strategis. Kini, pemilu telah usai. Benarkah kampanye pemilu turut berperan dalam proses pendidikan politik selama ini? Dan bagaimana kelanjutan proses pendidikan politik pascapemilu ? Tim Laput Kentingan menuliskannya dalam laporan berikut :

Kampanye Pemilu 1997 adalah kampanye yang cukup berhasil secara kuantitatif. Hal ini bisa dilihat dari tingginya antusiasme masyarakat dalam memarakkan kegiatan yang lazim disebut pesta demokrasi tersebut. Berbagai kalangan, terutama generasi muda yang menjadi kelompok pemilih pemula, turun ke jalan mendukung salah satu Organisasi Peserta Pemilu (OPP). Mereka giat meneriakkan yel-yel dan aktif menghadari kampanye, utamanya yang bersifat monologis yang memungkinkan terjadinya konvoi kendaraan di jalan raya. Selintas lalu fenomena di atas cukup menggembirakan. Partisipasi rakyat yang tinggi dalam berbagai bentuk kampanye sedikit banyak menyiratkan bahwa rakyat mempunyai pengetahuan yang layak tentang politik. Singkatnya, rakyat Indonesia melek politik.

Para ahli politik sendiri menggolongkan kampanye pemilu sebagai bentuk pendidikan politik. Pendidikan politik merupakan upaya mensosialisasikan nilai-nilai politik pada masyarakat. Dalam kampanye, usaha ini terlihat kentara. Pertama, hanya pada saat kampanye lah ketiga partai politik yang ada di Indonesia mengadakan "jumpa fans" dengan tujuan politis yang transparan. Kedua, pada momen ini juga masyarakat "diperbolehkan" memperlihatkan afiliasi politiknya pada partai tertentu. Ketiga, kampanye adalah media mempertajam pengetahuan dan persepsi rakyat tentang politik nasional. Keempat, kampanye adalah aktivitas politik yang melibatkan hampir semua penduduk dewasa di negeri ini. Dalam tataran proses pendidikan politik, kampanye adalah bentuk yang paling ideal.

Kalangan praktisi politik juga membenarkan bahwa kampanye adalah sarana yang tepat sebagai ajang pendidikan politik rakyat seperti yang diungkapkan oleh Sentot Suwarsiman, anggota DPRD II Solo dari F-PDI. Meski demikian partainya tidak menyandarkan diri pada kampanye sebagai media pendidikan satu-satunya. "Pendidikan politik tidak hanya saat kampanye saja. Kami melakukan berbagai cara untuk menarik para pemilih pemula dan pemilih muda," ungkapnya pada Hida dan Indah dari Kentingan.

Surantal repro U

Pendapat yang sama juga dikemukakan Surantal, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang juga Ketua Umum PDD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Menurut tokoh vokal ini, hingga sekarang kampanye adalah sarana yang tepat sebagai ajang memasyarakatkan nilai-nilai politik pada rakyat. "Sampai kini kampanye masih dibutuhkan di Indonesia," pendapatnya.

Pendidikan Politik dan Brutalisme

Meski dianggap sebagai bentuk pendidikan politik yang paling strategis, kampanye Pemilu 1997 secara kualitatif tidak bisa dianggap berhasil. Sebaliknya, kampanye yang dimulai 27 April hingga 23 Mei itu dianggap sebagai kampanye terburuk yang pernah terjadi di Indonesia.

Pernyataan di atas ditunjang bukti yang kuat. Mari kita buka lembaran kampanye yang telah lalu. Meskipun aparat keamanan bersiaga penuh 24 jam dengan kekuatan yang berlapis-lapis, tetap saja kebrutalan massa tidak bisa dihindarkan. Berbagai kericuhan silih berganti terjadi di beberapa kota penting di tanah air. Jakarta, Yogyakarta, dan Banjarmasin adalah tiga kota yang paling mencolok dalam kerusuhan tersebut. Harian Republika sendiri mencatat ada sekitar 50 keributan, bentrokan, dan kerusuhan besar dan kecil selama kampanye. Tak heran rangkaian aksi massa selama kampanye menelan kerugian jiwa dan harta yang sangat besar. Menurut data yang ada, korban meninggal sebanyak 245 jiwa. Korban terbesar, 110 orang, meninggal dalam huru-hara 23 Mei di Banjarmasin. Sedang korban yang menderita luka ringan dan luka berat ada 623 orang. Lagi-lagi, korban luka tersebut terbesar terjadi pada kerusuhan Banjarmasin sebanyak 500 orang. Selain korban jiwa, selama kampanye massa berhasil menghanguskan 23 tempat ibadah, 278 kendaraan roda dua dan empat, dan 144 rumah penduduk rusak.

Catatan yang lebih rinci lagi terjadi pada aksi di Banjarmasin. Selain data di atas, massa di ibu kota Kalimantan Barat itu juga merusak dan menghanguskan 144 toko, 9 kantor swasta dan pemerintah, 2 kantor OPP, 5 pasar swalayan, 1 apotik, 1 sekolah, 1 sarana hiburan, 1 panti wreda, dan 2 restoran. Sungguh kebrutalan yang fantastis ! Sebagai perbandingan bila kita tengok pelaksanaan kampanye tahun 1982 jumlah korban jiwa hanya 26 orang, sedang yang luka-luka 179 orang. Suatu perbedaan yang sangat mencolok.

Bukti-bukti tersebut yang menyebabkan para pengamat berani menyimpulkan bahwa kampanye periode ini adalah kampanye terbrutal yang pernah terjadi. Padahal, kondisi sosial politik dalam negeri selama ini boleh dibilang cukup stabil dan tidak memungkinkan rakyat untuk bergerak secara radikal. Kita lihat jumlah partai yang mengikuti pemilu, misalnya. Tiga OPP bukanlah jumlah yang banyak. Bandingkan dengan pemilu tahun 1971 yang diikuti oleh 10 OPP atau malah Pemilu '55 yang diikuti lebih dari 20 OPP. Kericuhan seperti Pemilu 1997 tidak tampak. Massa di kedua pemilu yang diikuti puluhan OPP itu bisa menerima berbagai perbedaan ideologi partai.

Sentot Suwarisman istimewa

Surantal punya cerita tentang itu. Menurutnya, pada tahun 1955 dalam satu hari bisa terjadi kampanye lebih dari satu parpol. "Bisa saja di alun-alun ada kampanye PNI, di alun-alun Pakualaman kampanye

Masyumi, dan PKI di Bumiijo (semuanya di Yogyakarta-Red). Ketemu di jalan peserta kampanye juga tidak apa-apa," ceritanya pada Ulin dan Ikhwan dari Kentingan. Bahkan, kata Surantal lagi, massa juga sering berpindah-pindah dalam menghadiri kampanye. "Bisa saja belum puas mendengarkan kampanye di Bumiijo lalu pindah ke tempat kampanye Masyumi, lalu ke tempat PNI, boleh saja itu." Uniknya, meski OPP banyak, bentrok fisik tidak terlihat. "Tidak ada model kepruk-keprukan seperti kampanye '71, '77, '82. Apa-apaan itu kepruk-keprukan!" tegasnya.

...Kampanye yang jor-joran bendera, diwarnai intimidasi dan manipulasi, bukanlah kampanye yang mencerdaskan,

Kenyataan di atas sudah sewajarnya menyebabkan para pengamat menyangsikan efektivitas kampanye sebagai bentuk pendidikan politik. Sebab pada dasarnya pendidikan politik berfungsi untuk menyadarkan warga negara terhadap hak dan kewajiban politiknya dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kehidupan politik. Muara dari pendidikan politik adalah mendorong partisipasi politik warga negara yang maksimal. Perubahan ke arah nilai-nilai politik yang modern dan kooperatif adalah tekanan yang perlu diperhatikan dalam proses pendidikan politik. Tentu saja transpolitisasi dengan jalan kekerasan tidak menjadi agenda utama proses ini. Dan kalaulah kampanye Pemilu '97 sarat dengan brutalisme, hal ini sama saja dengan mencoreng upaya pendidikan politik yang sehat dan mulia. Atau mungkin metode pendidikan politik yang dilakukan subyek pemilu (OPP dan pemerintah) salah ?

Robbani Thoha, anggota DPRD I Jawa Tengah dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menyatakan ketidaksetujuannya bila pendidikan politik selama kampanye diisi dengan materi yang tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. "Kampanye yang jor-joran bendera, diwarnai intimidasi dan manipulasi, bukanlah kampanye yang mencerdaskan," tandasnya. Menurut dia, kampanye yang ideal adalah adalah kampanye yang berdampak intelektual bagi masyarakat. "Kampanye adalah sarana membuka kesadaran politik, apalagi ada fenomena membludaknya pemilih pemula," tambahnya.

Aksi Massa Kampanye

Repro Tirto

Perang Simbol

Pendidikan politik dalam kampanye yang baru lalu menurut beberapa kalangan belum dianggap sebagai upaya pencerdasan yang sebenarnya. Ketiga OPP sendiri tidak berusaha memahami bahwa kampanye adalah waku yang paling tepat sebagai usaha pendidikan dan pendewasaan politik rakyat.

Kita lihat kembali aktivitas OPP selama kampanye lalu. Pertama, OPP lebih percaya bahwa keberhasilan sebuah kampanye ditentukan oleh banyaknya massa yang mengikuti kampanyenya. Jadi keberhasilan kampanye dilihat secara kuantitatif atau fisik. Kedua, OPP cenderung tidak memperhatikan materi kampanyenya. Massa dibiarkan meneriakkan yel-yel dan mengulang-ulang jargon-jargon program OPP tanpa "dibantu" memahami makna yang sebenarnya. Ketiga, berkaitan dengan poin kedua, kebanyakan jurkam tidak mempelajari psikologi *audiens*. Mereka mempergunakan bahasa a la elit politik yang berpendidikan dan bukan bahasa rakyat yang menjadi pengikut mayoritasnya. Akibat-

Robbani Toha istimewa

pengikut mayoritasnya. Akibatnya, terjadi kesenjangan pesan politik yang dalam antara subyek (ketiga OPP) dan obyek (masyarakat luas) kampanye. Mereka hanya menerima pendidikan politik secara permukaan, bersifat sementara, dan sambil lalu saja.

Bisa dibayangkan akibat kampanye yang tidak mencerdaskan tersebut. Perang simbol berupa simbol bendera, cat, dan atribut-atribut OPP, terjadi di seluruh pelosok tanah air. Dan pendidikan politik selama kampanye lalu masih bekisar pada hal-hal sederhana semacam itu. Parpol yang mempunyai fungsi sebagai agen sosialisasi politik tidak berusaha beranjak dari model lamanya, kampanye dengan mobilisasi massa dan penciptaan citra secara fisik.

Ketakutan Massa

Menurut Amir Purba, dosen FISIP Universitas Sumatra Utara, tujuan kampanye adalah menumbuhkan sikap simpati sasaran kampanye sehingga mereka akan bertindak menguntungkan. Melalui kampanye, diperkenalkan nilai-nilai politik parpol peserta pemilu. Bagi yang belum kenal, kampanye adalah teknik untuk memperkenalkan. Bagi yang belum tahu, kampanye adalah alat untuk memperkenalkan. Bagi yang sudah tahu dan sudah kenal, kampanye adalah sarana mengembangkan rasa simpati yang telah ada.

Kampanye sebenarnya lebih efektif bila ditujukan pada golongan non kader atau simpatisan parpol. Ini bisa dimengerti karena mereka menurut perhitungan pasti akan memberikan suaranya pada parpol tersebut. Parpol sudah sewajarnya menggarap kelompok non kader dan simpatisan. Amir Purba, lewat tulisannya di Republika (29/5), menyebutkan ada tiga kelompok yang idealnya menjadi sasaran kampanye. Mereka adalah kelompok pemula, para kutu loncat, dan orang yang belum menentukan sikap mereka. Bila mereka digarap apik, mereka akan memberikan kontribusi suara yang cukup menentukan dalam pemungutan suara.

Sayangnya, ide Amir Purba belum bisa terwujud dalam kampanye pemilu kemarin. Hal ini bertalian dengan antusiasme massa dalam mendukung OPP tertentu yang ditandai dengan simbol-simbol atribut yang murahan. Bila ada warga yang tidak seatribut dengan mereka, mereka akan berubah galak. Kampanye menjadi eksklusif karena membatasi diri dengan pagar-pagar atribut. Dan ketiga kelompok di atas sering mendapat perlakuan kurang simpatik dari massa OPP karena tidak mempunyai seragam yang sama dengan mereka. "Kampanye seolah-olah hanya boleh diikuti kader dan simpatisan OPP," tulis Amir. Padahal kampanye ditujukan kepada masyarakat luas.

Perlakuan yang buruk inilah yang menyebabkan kampanye tidak lagi menjadi media pendidikan politik yang bersih. Malah, kampanye menjadi sesuatu yang mengerikan karena massa OPP sering bertindak brutal selama berkampanye. Hal ini berdampak negatif pada pendidikan politik. Tiga kelompok di atas tidak lagi menganggap kampanye sebagai suatu hal yang menarik sehingga pendidikan politik tidak bisa berjalan baik. Kampanye berubah jadi hantu karena timbul tradisi baru : bila ingin selamat, hindari pawai kampanye atau keluar rumah dengan mengenakan atribut-atribut OPP yang kebetulan sedang menggelar kampanye. "Kalau sudah begitu, apa makna memilih suara bila tidak ikut kampanye sebelumnya ?" tanya Amir Purba.

kampanye tidak lagi menjadi media pendidikan politik yang bersih. Malah, kampanye menjadi sesuatu yang mengerikan karena massa OPP sering bertindak brutal selama berkampanye

Kenyataan ini kian memperburuk usaha untuk melakukan pemberdayaan politik rakyat.

Kampanye Dialogis

Beragam kebrutalan selama kampanye Pemilu 1997, memaksa pemerintah untuk memperkenalkan jenis kampanye lainnya, yaitu kampanye dialogis. Kampanye ini sebelumnya pernah diutarakan oleh Sarwono Kusumaatmadja pada tahun 1982. Ide ini lahir setelah terjadi kerusuhan massal pada kampanye Golkar di Lapangan Banteng pada kampanye Pemilu 1982. Kala itu Sarwono menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar. Menurut Sarwono, kampanye dialogis akan mampu meredam timbulnya gejolak massa.

Sayangnya, kampanye model ini tidak juga dipakai pada pemilu 1987 dan 1992. Baru pada 1997 kampanye dialogis diperkenalkan. Mungkin karena baru pertama kali, kampanye ini berlangsung dengan kaku, penuh skenario dan disambut dingin masyarakat dan dua OPP, yaitu PDI dan PPP.

Kedua parpol tersebut menolak kampanye dialogis karena merasa kampanye ini terlalu banyak mengandung muatan intelektual. Padahal massa dua parpol ini mayoritas adalah masyarakat awam. Menurut Sentot Suwarsiman, kampanye dialogis dianggap partainya kurang merakyat. "Kalau tidak terjun ke lapangan kan kita tidak tahu bagaimana kondisi masyarakat kita," katanya beralasan.

Kampanye dialogis ditengarai juga akan lebih menguntungkan Golkar. Dengan kekuatannya dalam memobilisasi massa, kampanye dialogis Golkar dipastikan akan terus dipadati warga. Lain halnya bila yang menggelar adalah PPP atau PDI yang mengundang massa tanpa paksaan atau suka rela. Pernyataan ini didukung oleh Surantal. Menurut dia, kampanye dialogis tidak menguntungkan parpol selain Golkar. "Kita sebenarnya sudah menolak kampanye dialogis, tapi pemerintah tidak mau mengubahnya juga," ungkapnya.

Akan tetapi bila kita telusuri lebih jauh, ketakutan PDI dan PPP dalam menggelar kampanye dialogis yang kemungkinan besar tidak akan mampu menarik massa karena tingkat pendidikan politik yang rendah, terlalu dipaksakan. Djoko Susilo, wartawan Jawa Pos, pernah menulis bahwa tidak sepantasnya para pimpinan OPP optimis bahwa banyak massanya yang masih "bodoh". Jaman yang berkembang dengan pesat dan kemajuan di semua sektor kehidupan, sudah sewajarnya tidak menyamakan kondisi Pemilu 1997 dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Singkatnya, kini rakyat telah mempunyai tingkat pendidikan politik yang lebih tinggi dan tentunya tidak terlalu terbelakang untuk menerima kampanye dialogis.

Menurut Adi Suryadi Culla, mahasiswa program pascasarjana FISIP UI, kampanye dialogis mempunyai beragam kelebihan dibanding kampanye monologis. Pertama, kampanye dialogis menggunakan pendekatan rasional. Lain halnya dengan kampanye monologis yang cenderung mempermainkan emosi massa. Kedua, kampanye dialogis adalah alternatif bagi pendewasaan berpolitik, lebih efektif, dan terjamin dari resiko kerusuhan. Ketiga, kampanye dialogis memasuki wilayah politik secara intelektual. Dan inilah yang sebaiknya dikembangkan karena rakyat mendapat pendidikan politik dalam arti yang sesungguhnya. Keempat, kampanye dialogis (yang baik) adalah barometer proses demokrasi sebab di dalam kampanye jenis ini terdapat esensi demokrasi, yaitu kebebasan berpendapat. "Hal ini

berbeda dengan kampanye monologis yang diwarnai pidato jurkam yang penuh dengan retorika sloganistik, doktrinatif, emosional, dan mendikte," ungkap Adi yang juga penulis ini.

Novel Ali, dosen FISIP Universitas Diponegoro menambahkan, dalam kampanye monologis yang hingga kini menjadi primadona karena dapat menarik perhatian massa, terjadi pemisahan kepentingan pendidikan politik antara subyek dan obyek kampanye. Sebab dalam kampanye jenis ini yang terbentuk adalah sekadar aksi politik dalam dimensi mikro yang kurang bermanfaat bagi pendidikan politik rakyat dalam dimensi makro.

Novel yang juga Ketua Yayasan Konsumen Semarang ini juga menyatakan bahwa perbedaan kepentingan tersebut jugalah yang seringkali menyebabkan massa berani melakukan kebrutalan seperti yang banyak terjadi selama kampanye silam. "Perbedaan kepentingan menyebabkan kampanye bisa merubah kerumunan biasa (*crowd*) menjadi *mob*," ujarnya.

Amir Purba juga turut mengkritik kampanye yang lebih menitikberatkan pada kebesaran massa dan atribut fisik. Menurut dia, kampanye saat ini berubah fungsi dari usaha menarik simpati menjadi usaha mengumpulkan massa. "Kampanye kini berubah menjadi ajang pamer kekuatan (*show of force*)," katanya. Dari usaha pamer kekuatan ini maka lahirlah ungkapan Jakarta *ijo royo-royo*, Semarang kuning, atau Medan merah.

Yang pasti, usaha pemerintah memperkenalkan kampanye dialogis adalah suatu langkah maju. Tentu saja hal ini terlepas dari praktek kampanye dialogis yang tidak sehat seperti rekayasa dan sensor materi kampanye dialogis yang disiarkan di media massa (TVRI dan RRI). Bahkan bisa saja kampanye dialogis dilakukan tidak hanya intern dari OPP tapi dialogis antar OPP secara jujur dan sportif.

kampanye ideal adalah kampanye yang diikuti oleh semua lapisan masyarakat, tidak terbatas pada kader dan simpatisan kader OPP tertentu.
Jadi, berbagai atribut yang mewakili afiliasi seseorang pada parpol tertentu sudah sewajarnya ditinggalkan

Kampanye Ideal

Lalu, kampanye seperti apa yang sepatutnya kita anut ? Menurut Djoko Susilo, kampanye ideal adalah kampanye yang diikuti oleh semua lapisan masyarakat, tidak terbatas pada kader dan simpatisan kader OPP tertentu. Jadi, berbagai atribut yang mewakili afiliasi seseorang pada parpol tertentu sudah sewajarnya ditinggalkan. Atribut hanyalah strategi parpol dalam mengembangkan fanatisme massanya.

kampanye ideal adalah kampanye yang diikuti oleh semua lapisan masyarakat, tidak terbatas pada kader dan simpatisan kader OPP tertentu

Amir Purba lebih menyukai kampanye yang demokratis. "Rakyat dijamin dan terjamin haknya untuk terlibat kampanye tanpa mengalami kerugian materi, fisik, dan perasaan," ungkapnya. Perlu juga kiranya rakyat mempunyai akses yang sama tentang informasi politik. Pendapatnya ini dipengaruhi oleh kenyataan bahwa media massa hingga sekarang hanya dinikmati oleh kalangan elit politik dan belum merambah masyarakat golongan rendah.

Robbani Thoha juga tidak tertarik pada proses pendidikan politik dengan cara memobilisasi massa. "Kalau itu terjadi (mobilisasi massa-Red), mereka hanya sekadar suara yang berangkat ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) tanpa makna," tandasnya.

Bila rangkaian kampanye sebagai salah satu proyek pemilu berlangsung demokratis, tentunya proses pendidikan politik rakyat dalam arti yang sebenarnya akan terjadi dan berjalan dengan efektif. Mungkinkah ?

***

Tim Laput : Nurul HZ, Ali R, Imron, Ichwan, Ulin, Arif GAM, Anwar F

Pesta Akbar di Akhir Abad XX

Pemilu (pemilihan umum) pertama yang dilaksanakan bangsa Indonesia setelah merdeka terjadi pada tahun 1955. Penyelenggaraan pemilu tersebut berdasar pada UUDS 1950. Jadi secara ekplisit dasar hukum pelaksanaan pemilu tampak benar dalam UUDS 1950.

Salah satu pasal yang memuat tentang pemilu, terdapat pada pasal 35 yang berbunyi: " Kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa. Kemauan itu dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara".

Sedang di bawah UUD 1945 yang nota bene tidak ada landasan tertulis mengenai pemilu namun telah dilaksanakan enam kali pemilu termasuk yang baru saja dilaksanakan 29 Mei 1997 lalu.

Walau istilah pemilu tak terdapat dalam UUD 1945, namun beberapa indikator dapat dipakai sebagai landasan atau dasar untuk penyelenggaraan pemilu. Pertama, dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:'...yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, uang berkedaulatan rakyat...". Kedua, dalam rumusan pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:"Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat".

Berdasarkan TAP MPRS No XLII/MPRS/1968, pemerintah mengeluarkan UU No 15 tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No 15 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD dan sesuai dengan Ketetapan MPRS tersebut diselenggarakan pemilihan umum yang pertama tahun 1971 di bawah UUD 1945 oleh pemerintah Orde Baru.

Pada pemilu pertama tersebut diikuti 10 kontestan peserta pemilu yaitu sembilan partai politik dan satu golongan karya. Walaupun kenyataan itu tidak terjadi pada pemilu-pemilu selanjutnya. Karena pemerintah mengeluarkan UU No 3 tahun 1975, yang mengatur peserta pemilu hanya terdiri dua partai politik dan satu golongan karya.

Konsekuensinya tentu beberapa partai harus menggabungkan diri melebur menjadi satu partai. Partai-partai seperti Parmusi, NU, PSII, dan Perti melebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedang partai Parkindo, PNI, Partai Katolik, IPKI dan Murba menjadi satu partai dengan nama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sedangkan Golkar tidak mengalami perubahan.

Perubahan selanjutnya terhadap orsospol adalah dengan perubahan UU No 3 tahun 1975 dengan UU No 3 tahun 1985 adapaun isinya yang paling mendasar yaitu setiap orsospol harus mencantumkan dan menganut Pancasila sebagai asasnya. Ketentuan mencantumkan dan menganut asas tunggal tersebut berpedoman dan mengacu pada Ketetapan MPR No II/MPR/1983.

Dengan adanya UU No 3 tahun 1985 tersebut maka tanda gambar dari OPP terpaksa juga harus menyesuaikan. Kecuali Golkar, setelah pemilu 1982 dilaksanakan, PPP yang semula betanda gambar ka'bah diubah menjadi bertanda gambar bintang yang diletakkan di tengah segi lima. Sementara PDI yang pada awalnya bergambar kepala banteng dengan beringin dan padi kapas menjadi gambar kepala banteng saja.

Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut mungkinkah

pemilu bisa dijadikan salah satu wahana pemberdayaan orsospol dan rakyat ? Seharusnya keadaan demikian dapat terjadi jika pemilu benar-benar memposisikan orsospol dan rakyat sebagai subyek politik. Pemilu adalah wahana orsospol menawarkan berbagai programnya, sementara rakyat secara kritis akan menilai kinerja dari OPP (Organisasi Peserta Pemilu) yang akhirnya akan menentukan pilihannya terhadap salah satu OPP.

JAUH DARI HARAPAN

Masalah yang cukup pelik dan berkait erat dengan pemilu ialah masa-masa kampanye. Karena pada saat inilah OPP berusaha menjabarkan program-program partai guna menarik massa sebanyak-banyaknya.

Kampanye pemilu ke enam kalinya pada masa pemerintahan orde baru yang dilakukan selama hampir satu bulan banyak menarik perhatian orang, bahkan pengamat dari luar negeri berdatangan untuk melakukan pengamatan terhadap salah satu tahapan pesta demokrasi ini.

Kampanye pemilu tahun ini mungkin adalah kampanye yang terpanas dalam sejarahnya. Kesemrawutan kampanye, pelanggaran aturan main, kebrutalan massa bahkan sampai meminta tumbal kematian yang harus dipikul rakyat menjadi tamparan bagi bangsa kita. Kebanggaan tentang nilai luhur dan peradaban tinggi yang diwariskan oleh perjalanan sejarah bangsa selama ribuan tahun sedang dalam ujian. Klaim keberhasilan pembangunan politik yang selama ini kita dengar sedang digugat.

Oleh pembina politik (baca: pemerintah), kampanye dimaksudkan sebagai metode pendidikan politik bagi massa yang selama lima tahun diambangkan dan dijauhkan dari kehidupan politik. Dalam lima tahunan sekali ini, pemerintah bermaksud melakukan pendidikan politik.

Ketika pemerintah mengeluarkan UU, tentunya setelah mendapat persetujuan DPR, yang mengatur kehidupan partai politik di tanah air hanya sampai tingkatan Dati II dalam bayangan pembuat UU tersebut mungkin adalah terciptanya sebuah situasi yang tertib dan tanpa gejolak politik yang dapat menganggu pembangunan. Begitu pula dengan UU yang mengatur pelaksanaan pemilu, didesain untuk membuat agar pemilu berjalan tanpa gejolak. Usaha untuk membuat massa rakyat terdepolitisasi tidak hanya dilakukan dengan cara sistematisasi sebuah undang-undang seperti di atas. Bahkan cenderung sampai pada tingkatan yang sangat teknis sekali, seperti halnya bertaburan juklak dan juknis pelaksanaan kampanye yang sangat mengekang kebebasan rakyat untuk mengekspresikan pendapatnya sesuai dengan keyakinan politiknya.

Pada awal impian seperti itu seakan terwujud, namun belakangan orang dipaksa untuk menelaah kembali apakah dengan membuat rakyat buta terhadap politik maka ketentraman dan ketertiban dapat terjamin. Maraknya kerusuhan pada akhir tahun 1996 dan semakin marak dalam pelaksanaan kampanye, menyadarkan banyak orang akan kesalahan terhadap konsep *floating mass* maupun pemonopolian pelaksanaan pemilu oleh pemerintah yang notabene adalah anggota salah satu OPP.

Ada sejumlah catatan yang dapat kita jadikan cermin untuk menilai apakah pemilu kali ini lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Diantaranya adalah kelakuan massa peserta kampanye kampanye, yang kian hari kian beringas perilakunya. Padahal maksud dari kampanye menurut M Ryaas Rasyid, Rektor Institut Ilmu Politik Jakarta, setidaknya ada tiga hal penting. Pertama, yakni sebagai forum pembeberan program dan kebijaksanaan OPP. Kedua, sebagai forum pendidikan politik rakyat dan ketiga sebagai "pesta demokrasi".

Untuk menciptakan suasana yang kondusif, mulai kampanye kali ini diperkenalkan model kampanye yang menggunakan metode dialogis, tidak hanya pengerahan massa saja. Diharapkan dalam kampanye model ini terjadi debat antara elit partai dengan calon pemilihnya mengenai hal-hal yang kontekstual dan menjadi program OPP yang bersangkutan.

Akan tetapi melihat jalannya kampanye dialogis, baik yang ditampilkan dalam layar TV maupun yang diselenggarakan tiap-tiap daerah oleh masing-masing OPP, maka yang terlihat justru dialog yang terkesan sangat monoton dan terjadi

nya dengan kampanye monologis. Monoton, karena suasana dialogis yang diharapkan sering kali macet, karena banyak "sesuatu" yang tak boleh diperdebatkan.

Kampanye model ini pada awalnya diharapkan akan terjadi transformasi program partai kepada pendukungnya. Namun sayang, pada prakteknya tidak jarang dalam kampanye dialogis ini yang muncul adalah janji-janji seperti kampanye monologis. Bayangkan, ada OPP yang akan menaikan gaji PNS sampai 500% bila OPP-nya menang, atau mengatakan OPP-nya sangat anti kolusi dan korupsi padahal semua orang tahu kalau di lingkungannya tidak bersih dengan praktek tersebut. Dan dalam pelaksanaan kampanye ini sepertinya sebelum dilaksanakan kampanye dialogis telah disusun skrenarionya agar tidak muncul pertanyaan yang kritis. Tidak aneh kalau muncul istilah 'skrenario sinetron kampanye'.

Meskipun kampanye dialogis sudah dipergunakan, bukan berarti kampanye yang monologis dengan disertai pengerahan massa tidak digunakan. Justru pada kampanye kali ini, aksi unjuk kekuatan tampak sangat marak lagi. Banyak pendapat dari berbagai kalangan yang mempertanyakan keefisienan kampanye dengan pengerahan massa. Dengan menggunakan parameter M Ryaas Rasyid, terlihat kegiatan kampanye massal dan pawai unjuk kekuatan untuk Pemilu 1997 dapat dianggap gagal mencapai maksud.

Kendati kampanye sebenarnya diharapkan untuk dapat disampaikan dengan cara-cara yang bersifat mendidik, meningkatnya kesadaran politik rakyat, menggairahkan pembangunan nasional serta mengukuhkan persatuam dam kesatuan masional sebagaimana yang diisyaratkan dalam Kepres No 9 th 1996 (pasal 7 ayat 2) namun dalam pandangan Pawito D, hal itu masih sangat jauh dari harapan. Kampanye bagi massa, menurut dosen FISIP UNS ini, justru lebih banyak dijadikan sebagai saluran untuk mengekspresikan segala kejengkelan dan mungkin rasa frustasi yang terpendam. Akibatnya, kampanye bagi masyarakat awam dinilai sebagai hantu yang sangat menakutkan dan karenanya harus dihindari, ujarnya lebih jauh.

merosotnya suara PDI, itu menunjukan runtuhnya secara De Facto, sendi sistem kepartaian di Indonesia

Tak terhindarkannya pengerahan massa dalam kampanye untuk unjuk kekuatan, menurut M Ryaas Rasyid tidak dapat dilepaskan dari sistem pemilu yang berlaku saat ini. Dalam sistem proposional seperti yang kita pakai sekarang, model kampanye massal dan pawai tidak dapat dihindari, tegas beliau. Hal ini, masih menurut Rasyid, disebabkan oleh beberapa hal. Diantaranya dalam pemilu yang menggunakan sistem proposional pemilu merupakan persaingan antar OPP yang berskala nasional tempat jurkam bekerja atas nama OPP-nya. Maka kehadiran di lokasi kampanye massal bukan untuk berhadapan dengan masyarakat setempat akan tetapi dengan simpatisan OPP tersebut yang dapat berdatangan dari berbagai penjuru. Kehadiran massa dalam jumlah yang banyak adalah simbol kebesaran suatu OPP.

Menurut Mulyana W Kusuma, melihat hasil pelaksanaan kampanye dan pemilu lalu ada empat gejala sosial politik yang terjadi. Pertama, peningkatan frekuensi da intensitas kekerasan kolektif. Kedua semakin sistematiknya bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh aparat. Ketiga meningkatnya jumlah suara yang tidak sah.

"Saya kira kalau dalam hitungan KIPP, sekitar 10-11 juta, itu artinya 3 kali lipat lebih dari suara yang diperoleh PDI. Artinya, ada arus delegitimasi yang nampak lebih jelas,"jelas Mulyana.

Sedang gejala yang keempat, adalah merosotnya suara PDI, itu menunjukan runtuhnya secara De Facto, sendi sistem kepartaian di Indonesia.

Dengan keadaan ini, maka perlu bagi pemerintah untuk mengoreksi hasil-hasil yang dicapai dalam hajat besar ini yang jauh dari harapan, demi perbaikan di masa datang. Kecuali jika ingin meledaknya amarah massa yang tidak tersalurkan.

***

Tim Laput

PERUBAHAN MELALUI PEMILU: KENAPA TIDAK?

Oleh: Pawito D.*

Pada kesempatan acara Kampanye Dialogis yang disiarkan langsung oleh RRI-TVRI tgl. 23 Mei 1997 (Jum'at) Ketua Umum DPP Golkar H. Harmoko menerima pertanyaan dari salah seorang peserta mengenai penilaian bahwa kemenangan Golkar dalam Pemilu 1997 hanya untuk mempertahankan *status quo* yang menyumbat usaha pembaharuan. Sehubungan dengan pertanyaan ini H. Harmoko menjawab bahwa pendapat demikian sebenarnya kurang mempunyai dasar.

"Pendapat itu kurang berdasar. Sebab yang akan dilestarikan oleh Golkar adalah Pancasila dan UUD '45 serta momentum pembangunan dan kepemimpinan nasional yang tetap berada di tangan Orde Baru. Adalah justru dengan memantapkan hal-hal tersebut, pembangunan sebagai proses pembaruan sistematik dapat dilaksanakan," demikian jawaban H. Harmoko ketika itu. Kemudian tambahnya, "Dengan mencanangkan pembangunan sebagai proses sistematik, berarti Golkar justru menjadi kekuatan terdepan untuk melakukan pembaruan-pembaruan dalam segala bentuk kehidupan masyarakat. Golkar selalu bertekad untuk menyempurnakan pembangunan, dan keluarga besar Golkar akan menjadi pilar dan pelopornya."

Pertanyaan, dan juga sudah tentu jawaban, termaksud sebenarnya muncul dalam konteks pemilu di Indonesia yang senantiasa dimenangkan oleh Golkar, yang kemudian timbul semacam kecemburuan atau kecurigaan - yakni bahwa pemilu yang diselenggarakan dengan kemenangan Golkar sebenarnya hanya untuk mempertahankan status quo. Dalam Pemilu 1987 misalnya, Golkar memperoleh 299 kursi sementara PPP 61 kursi dan PDI hanya 40 kursi. Kemudian, dalam Pemilu 1992, Golkar menang lagi dengan memperoleh 282 kursi sedangkan PPP memperoleh 62 kursi dan PDI memperoleh 56 kursi. Pada Pemilu 1997 yang baru lalu, Golkar memperoleh 325 kursi dan PPP memperoleh 89 kursi sedangkan PDI turun drastis hanya memperoleh 11 kursi.

Sehubungan dengan kecemburuan/kecurigaan di atas tadi, persoalan sebenarnya menurut hemat penulis, terletak pada pemberian titik berat yang "terpaksa harus dipilih" antara memfungsikan pemilu sebagai alat kekuasaan untuk membangun sistem politik dan pemerintahan yang kuat dan efektif demi kelangsungan pembangunan di satu pihak, dan di lain pihak, memfungsikan pemilu sebagai pelaksanaan demokrasi dengan pemurnian prinsip bahwa rakyatlah sebenarnya yang berkuasa.

Perubahan melalui Pemilu

Idealnya, memang kedua fungsi termaksud dapat berjalan seimbang. Tetapi adanya semacam trauma sejarah dalam era demokrasi liberal di mana suatu pemerintahan (kabinet) jatuhbangun begitu cepat tanpa sempat berbuat banyak untuk rakyat kepada siapa pemerintah mestinya mengabdikan diri maka pilihan titik berat fungsi pemilu nampaknya lebih condong kepada yang pertama.

semua pihak sudah saatnya lebih menyadari bahwa tuntutan-tuntutan perubahan nampaknya semakin menguat

Kendati demikian, untuk masa-masa sekarang dan akan

datang, semua pihak sudah saatnya lebih menyadari bahwa tuntutan-tuntutan perubahan nampaknya semakin menguat belakangan ini, termasuk tuntutan untuk lebih mendemokrasikan pemilu itu sendiri. Substansi seperti ini lah kiranya yang sekarang perlu kita resapi bersama. Bahwa generasi baru kita tumbuh kian kritis. Mereka tumbuh lebih cerdas, lebih mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai warganegara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Di samping itu generasi baru kita juga lebih banyak menyerap informasi mengenai dunia luar termasuk runtuhnya sistem-sistem totaliter (komunisme) di Eropa Timur, juga perubahan-perubahan yang baru saja terjadi seperti di Iran dan lain-lain yang kesemuanya mengindikasikan adanya kecenderungan perubahan ke arah yang lebih terbuka dan lebih demokratis.

Dengan latar belakang demikian maka semua pihak selayaknya menyadari bahwa masyarakat kita semakin terinspirasi oleh perubahan-perubahan yang terjadi di dunia luar seraya mempersepsikan perubahan sebagai suatu kebutuhan yang kian mendesak. Dalam hubungan ini, sudah tentu, perubahan yang termaksud adalah perubahan yang berlangsung secara gradual dan transformatif dan tetap dalam bingkai kepribadian bangsa, tetap dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945. Dalam kaitannya dengan pemilu, maka perubahan ter maksud kiranya dapat terlaksana dengan/melalui pemilu ini. Artinya, dengan pemilu maka wakil-wakil rakyat dapat dipilih serta kemudian mereka lah yang akan menentukan Indoensia lima tahun mendatang.

Dalam konteks pemikiran seperti inilah, menurut hemat penulis, kita lalu dapat memahami apa yang diisyaratkan oleh Presiden Soeharto ketika menyampaikan amanatnya menjelang pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu 1997 yang lalu, bahwa pemilihan umum bukanlah tujuan, melainkan sarana dan wahana untuk menyelaraskan kebijakan pemerintahan dan pembangunan dengan kehendak rakyat secara menyeluruh sebagai pemilik kedaulatan negara. Melalui pemilihan umum itulah kita bisa melakukan perubahan kebijakan negara dan pembangunan secara terencana, terkendali dan tanpa gejolak.

perubahan dapat dilakukan dengan/melalui pemilihan umum ini di samping pengakuan yang jujur bahwa rakyat lah sebenarnya pemilik kedaulatan negara dan bukan beberapa gelintir orang.

Isyarat demikian tentunya sekaligus juga dapat ditangkap sebagai suatu janji bahwa perubahan dapat dilakukan dengan/melalui pemilihan umum ini di samping pengakuan yang jujur bahwa rakyat lah sebenarnya pemilik kedaulatan negara dan bukan beberapa gelintir orang.

Merenungkan kembali makna kedaulatan rakyat.

Sangat jauh sebelum terjadi kerusuhan di berbagai kota di beberapa bulan sebelum Pemilu 1997, orang-orang seperti Nurcholish Madjid misalnya, sudah mengingatkan tentang semakin mendesaknya kebutuhan akan saluran yang lebih wajar untuk artikulasi aspirasi.

"Setelah proses penumbuhan bangsa berjalan dua generasi dengan sukses - yakni generasi Bung Karno yang sukses di bidang konsolidasi kebangsaan sebagai *nation state* dan generasi Pak Harto yang sukses di bidang ekonomi dan pendidikan, maka keberhasilan demikian akan berlanjut pada hal-hal yang sangat prinsipiil, peningkatan kemampuan secara umum termasuk politik. Rakyat makin tahu hak-hak dan kewajibannya. Makin tahu hak dan kewajiban juga berarti akan meningkat tuntutannya," demikian Nurcholish Madjid mengatakan ketika itu (Ummat, No. 7 - Th. I, 2 Oktober 1995, hal. 34).

Memang, muara pemikiran Nurcholish dengan apa yang dikatakannya itu, adalah koreksi kalau bukan oposisi. Dan, kenyataannya, beberapa waktu yang lalu sempat muncul kelompok-kelompok yang dampat berfungsi sebagai kelompok penekan dan lebih memungkinkan adanya check and balance dalam sistem pengembangan sistem demokrasi kita. Tetapi,

demikian Nurcholish menambahkan dalam hubungan ini, karena kurang adanya legalisasi, maka mudah menimbulkan kesalah pahaman dan kecurigaan.

Dengan menyimak berbagai kerusuhan yang timbul beberapa bulan sebelum pemilu, dan juga masih "berlanjut" pada masa kampanye, maka kiranya semakin terusiklah nurani kita untuk benar-benar lebih mawas diri seraya lebih jujur dalam mengimplementasikan paham kedaulatan rakyat. Artinya, prinsip *fair-play* dalam setiap proses politik di semua level selayaknya lebih disadari sebagai wujud dari implementasi termaksud. Sebagian dari konsekuensi hal ini adalah peniscayaan kegiatan perpolitikan rakyat secara lebih wajar, proporsional dan tanpa pemaksaan kehendak.

Dalam kaitan ini, kiranya menarik sekali untuk dikutip apa yang dikatakan oleh Marzuki Darusman (Wakil Ketua Komnas HAM) dalam diskusi yang diselenggarakan oleh PKK Kosgoro di Jakarta bulan Maret yang lalu: "Pengertian sesungguhnya kedaulatan rakyat adalah kedaulatan organisasi pergerakan politik rakyat. Perlu ditinjau sejauh mana struktur politik kita memberi tempat-tempat bagi pergerakan rakyat," demikian Marzuki Darusman (Suara Merdek, 24 Maret 1997, hal. 1).

Mencermati hal demikian maka sikap-sikap serta kebijakan-kebijakan yang lebih aspiratif, lebih adaptif dan lebih akomodatif sangat dibutuhkan di masa-masa sekarang dan akan datang. Pemilu 1997 dengan segala proses serta hasil-hasilnya kiranya dapat dijadikan bekal untuk sikap serta kebijakan-kebijakan termaksud.

***

**Dosen FISIP UNS dan penulis Free Lance*

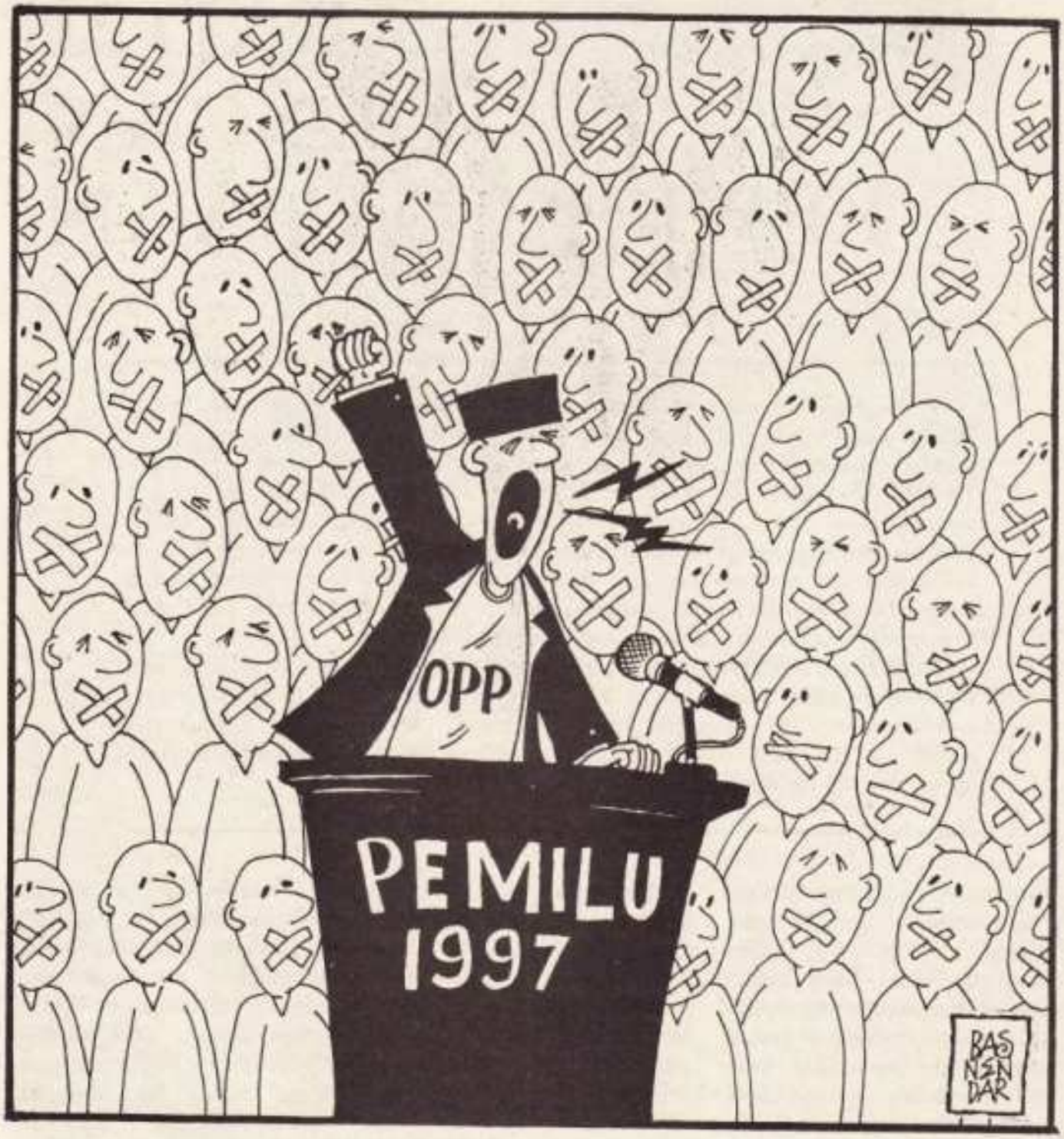
OPP
PEMILU
1997
BASNENDAR

MENYONGSONG ABAD 21 DENGAN KEWIRAUSAHAAN

Perkembangan industri dan perdagangan di belahan bumi ini begitu pesat. Dimana setiap negara memprioritaskan pembangunan di bidang ekonomi sebagai tumpuan utama. Apalagi mendekati era global yang semakin terbuka di tiap negara. Termasuk Indonesia, masuk dalam lingkaran ini, yang mau tidak mau harus mengantisipasi dari sekarang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memasyarakatkan kewirausahaan di lapisan masyarakat. Tentunya dengan harapan masyarakat kita mempunyai jiwa wirausaha sehingga dalam segala bidang mampu mengembangkan jiwa mandiri sebagai sasaran utama, dan akhirnya tidak akan tergantung pada bangsa lain atau setidaknya mampu bersaing.

Salah satu dampaknya, perguruan tinggi juga harus berperan sebagai katalisator untuk mempercepat upaya tersebut. Hal tersebut juga dilakukan di universitas yang kita cintai ini, dengan gigih memasyarakatkan kewirausahaan dikalangan mahasiswa, dan masyarakat sekitar. Untuk lebih dekatnya Kentingan menurunkan laporannya seputar kewirausahaan di UNS mari kita ikuti.

Kewirausahaan, dulunya merupakan istilah yang lebih akrab digunakan dalam bidang ekonomi. Adalah suatu usaha pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal untuk memperoleh keuntungan yang optimal. Dalam bidang-bidang perdagangan, secara langsung orang akan menggunakan ilmu ini untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan sumber daya yang minimal.

Kemajuan yang dicapai oleh beberapa negara tetangga dalam meningkatkan GNB (*Gross National Bruto*) , mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan gerakan pemasyarakatan kewirausahaan tingkat nasional. Sehingga dikeluarkanlah UU No.9 tahun 1995. Obyek gerakan kewirausahaan tersebut meliputi berbagai bidang dan instansi. Pada bidang Pendidikan, gerakan ini juga ditekankan.

Berlatar dari harapan kemampuan Perguruan tinggi (PT) untuk melahirkan tenaga-tenaga profesional dan konstruktif maka didirikanlah Pusat Pengembangan Kewirausahaan (PPK) di perbagai perguruan tinggi. Selain itu diharapkan mereka mempunyai kepekaan tinggi terhadap segala perubahan-perubahan yang dihadapi di tengah masyarakat dalam pembangunan Indonesia.

Harapan ini sejalan dengan fungsi PT sebagaimana tertuang dalam UU No2/1989, bahwa PT sebagai bagian dari sistem pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya untuk mewujudkan tujuan nasional.

Sebagai proyek nasional, UNS ditunjuk oleh Dirjen Dikti sebagai pilot proyek penanganan dan pembinaan pengusaha kecil, dengan UTP (Universitas Tunas Pembangunan) Surakarta mewakili Daerah Jawa Tengah.

Gedung Kewirausahaan: Guna pengembangan kewirausahaan atau sekadar memperoleh dana

foto Arif GAM

Pusat Pengembangan Kewirausahaan (PPK) UNS didirikan berdasarkan Surat Keputusan Rektor No.237/PT 40.H/U/96 tanggal 20 Mei 1996. Lembaga yang berpusat di Gedung Rektorat lantai II ini merupakan sebuah "Institusi Kewirausahaan" yang bergerak di bidang pendidikan, pelatihan, manajemen, penelitian dan pengembangan kewirausahaan serta konsultasi bisnis dan bisnis incubator dalam rangka memenuhi kebutuhan dan permintaan akan berbagai kajian tentang studi dan pe-ngembangan kewirausahaan baik praktis maupun teoritis.

Pada prinsipnya lembaga ini harus mampu mendukung Misi UNS, untuk menghasilkan lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya Indonesia, serta berkemampuan akademik dan profesional, serta mempunyai wawasan dan sikap wirausaha yang handal. .

Selain missi tersebut masih banyak yang lainnya diantaranya menjadi motivator, inspirator, bagi masyarakat terutama generasi muda.

PPK UNS Surakarta yang berdiri pada September 1996 mempunyai tujuan **Pertama;** untuk menumbuhkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang kuat kepada mahasiswa UNS, generasi muda, masyarakat, pengusaha dan koperasi. **Kedua;** membantu pemerintah, koperasi dan swasta di bidang pendidikan, pelatihan, penataran, lokakarya, seminar, workshop dan kegiatan kewirausahaan lainnya guna mewujudkan dan meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas, berkemampuan dan kemantapan para generasi muda, masyarakat, pengusaha dan koperasi untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta pengusaha kecil, koperasi dan generasi muda pada khususnya. **Ketiga;** membantu membudayakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan dikalangan mahasiswa UNS dan masyarakat, terutama kepada generasi muda sehingga berkemampuan dan memiliki

jiwa kewirausahaan yang handal, tangguh dan mandiri.

Tentang pendirian PPK UNS , **Widodo Mukti** berpendapat bahwa UNS mau menerima proyek ini karena pada waktu itu ada harapan besar agar out put kita bisa lebih punya bobot jika dibandingkan dengan universitas lain. Dan saat ini UNS ada Pusat Pengembangan kewirausahaan dan bulan Juni '97 telah dikembangkan lagi lembaga pengembangan kewirausahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya PPK membentuk beberapa divisi, yaitu : 1. Divisi Pendidikan 2. Divisi Pelatihan 3. Divisi Riset dan Pengembangan 4. Divisi Incubator Bisnis.

Adapun pemberian materi kewirausahaan ini dalam divisi pendidikan meliputi; Program Ospek, pemberian materi kuliah pada semester III, dan pembekalan KKN.

Proyek Prestisius

Dari uraian di atas program kewirausahaan ini mempunyai maksud yang boleh dibilang prestisius. Jika jalannnya program sesuai dengan rencana.

Dengan pengembangan materi kewirausahaan disetiap fakultas atau jurusan di lingkungan kampus ini, tentu akan memunculkan beberapa pertanyaan berkenan keprofesionalan perguruan tinggi untuk mencetak sarjana yang mumpuni dibidangnya. Karena PT diharapkan mampu melahirkan tenaga-tenaga profesional dan konstruktif serta mempunyai kepekaan tinggi terhadap segala perubahan, yang dihadapi di tengah masyarakat.

Namun menurut Widodo Mukti, salah seorang dosen FISIP yang juga pengusaha mengatakan, kewirausahaan lebih menekankan pada aspek menumbuhkan sikap mandiri, menumbuhkan kreatifitas baik intelektual maupun rasional hingga akan menjadi sarjana yang punya jiwa mandiri.

Sedang **Subagyo**, Dosen politik FISIP berpendapat pentingnya mata kuliah kewirausahaan tersebut, Mahasiswa karena berbagai faktor seperti proses kuliah yang begitu cepat sehingga wawasan terhadap lingkungan sosialnya kurang. Misalnya walaupun mereka kuliah di UNS tapi kurang memahami masyarkat Solo. Karena kondisi inilah, mata kuliah

Pameran Kewirausahaan di Jakarta

foto ismanea

Yang menjadi problem solving saat ini menurut Widodo, adalah tidak siapnya pengusaha kecil kita, secara modal, manajemen dan etos kerjanya. Sehingga mahasiswa diharapkan mampu memperdayakan pengusaha kecil tersebut. Dan yang lain sebenarnya program ini merupakan kepedulian PT pada masyarakat luas. Seperti pngembangan batik di solo dan pengembangan ibu-ibu untuk menumbuhkan kreatifitasnya.

kewirausahaan sangat penting. Dapat menjadikan mahasiswa bisa menggali lebih dalam mengenai keprofesionalisme.

Fungsi Pemandulan

Selain harapan-harapan diatas, akan ada kemungkinan dari lahirnya kewirasuhaan tersebut mengenai pergeseran peran mahasiswa juga muncul. Dengan lahirnya kewirausahaan maka perkembangan pemikiran mahasiswa akan mengarah pada *pragmatisme*.

Widodo Mukti

Sehingga mata hati yang selama ini sudah mulai tertutup dengan berbagai aturan mulai dari NKK/BKK hingga aturan Mendikbud dilanjutkan dengan program kewirausahaan akan semakin parah. Kepedulian mahasiswa terhadap kepedulian lingkungan semakin berkurang. Mahasiswa kurang diberi kesempatan berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesamanya secara maksimal, sehingga sikap toleransi sosial dan kesetiakawanan berkurang.

Boleh dikata PT sebagai lembaga pendidikan formal mengalami pergeseran fungsi akibat semakin menonjolnya pragmatisme dalam pendidikan sebagai akibat kebijakan yang ada. Karena itu kiat baru pun dimunculkan dengan materi yang lebih halus lagi yaitu kemunculan kewirausahaan di tiap fakultas.

''Memindahkan perhatian menurut saya kok tidak sesederhana itu, karena justru sekarang ini satu sistem secara keseluruhan mahasiswa cenderung apatis artinya tidak hanya dunia politik saja. Sehingga banyak sarjana yang keluar tidak peduli pada lingkungannya. Sehingga masalahnya bagaimana menumbuhkan mentalitas mahasiswa yang dinamis dan kreatif'', kata Widodo Mukti. Hal senada diungkapkan Drs Amien Gunadi MP selaku ketua PPK-UNS yang lebih menekankan kegiatan kewirausahaan akan berdampak pada era global.

Dimana pada era global yang sebentar lagi tiba dibutuhkan para sarjana yang plus, memiliki jiwa wirausaha seperti jiwa mandiri dan lainnya. Sehingga menurutnya, mahasiswa tidak perlu berpikiran sempit. Jika kita masih berpikiran sempit, tambah Amien maka bangsa kita nanti akan mengalami penjajahan kembali, yaitu penjajahan ekonomi.

"Saya tidak menjadikan mahasiswa menjadi seorang bisnisman dengan kewirausahaan tapi menjadikan mahasiswa yang bisa mandiri (bisa menghidupi dirinya), bermanfaat bagi masyarakat. Tidak ada mahasiswa yang mau menjadi seorang kapitalisme

Sedang Widodo menambahkan, "Saya tidak menjadikan mahasiswa menjadi seorang bisnisman dengan kewirausahaan tapi menjadikan mahasiswa yang bisa mandiri (bisa menghidupi dirinya), bermanfaat bagi masyarakat. Tidak ada mahasiswa yang mau menjadi seorang kapitalisme", ungkapnya.

...sekarang ini satu sistem secara keseluruhan mahasiswa cenderung apatis artinya tidak hanya dunia politik saja. Sehingga banyak sarjana yang keluar tidak peduli pada lingkungannya.

Widodo memberikan contoh, isi dari materi-materi kewirausahaan diantara konsep-konsep kreatif, inovatif, motivasi percaya diri, hubungan interpersonal, kepemimpinan, tidak ada satu yang mengarahkan pada kapitalis.

Memang pendapat Widodo ini lebih menekankan pada mentalitas manusianya. Dimana dalam segala kesempatan menurut pendapatnya mahasiswa dapat mengembangkan kreatifitasnya. Jadi kewirausahaan tidak diartikan sempit saja, seperti bakulan atau dagang.

Subagyo, walau memandang ada segi positifnya, tapi ia juga memandang adanya kewirausahaan bisa saja merupakan bentuk pengalih perhatian mahasiswa dari pihak penguasa, terhadap masalah-masalah politik praktis, setelah NKK/BKK. Walaupun itu hanya dugaan saja. Yang jelas lahirnya kewirausahaan melahirkan berbagai sikap dan pandangan.

***

Tim Lapsus

MANFAATKAN FASILITAS UNS!

Wawancara dengan Drs. **Moehammad Amien Gunadi, MP**. Pimpinan PPK (Pusat Pengembangan Kewirausahaan) UNS sekaligus dosen Fak. Ekonomi UNS.

Kapan Kewirausahaan mulai diberlakukan di UNS?

Kewirausahaan mulai diberlakukan di UNS pada bulan September 1996.

Bagaimana kegiatan Kewirausahaan tersebut?

Kewirausahaan mempunyai 2 kegiatan : yaitu yang bersifat intern,OPSPEK bagi mahasiswa baru. Mahasiswa semester 3 ada MKDU Kewirausahaan. Setelah itu ada test dan pendaftaran bagi yang berminat, berbakat, berpotensi dan lulus seleksi bisa ikut AMT I dan Studium General dari sini lalu AMT II kemudian pelatihan Manajerial (keuangan, pemasaran), pelatihan menyusun bisnis plan, paket ketrampilan kewirausahaan yaitu sebagian mahasiswa yang berminat kita magangkan ke perusahaan. Pembekalan KKU/KKB bagi semua mahasiswa peserta KKN.

Dan kegiatan ekstern yaitu menggalang kemitraan dengan pengusaha-pengusaha kecil, menjadikan pengusaha kecil menjadi pengusaha binaan (membantu program pemasaran , aspek manajerialnya). Kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk dimagangi oleh mahasiswa.

Kemarin, kita baru saja mengadakan show room di Jakarta dan Cilacap dengan memamerkan hasil usaha dari pengusaha binaaan.

Fasilitas-fasilitas apa yang ada pada kewirausahaan?

Trainer yang kualifaid, buku-buku, pembuatan proposal, show room, penggalangan kemitraan (Joint Ventura) antar pengusaha-pengusaha atau pemagangan mahasiswa pada perusahaan-perusahaan.

Bagaimana dengan masalah pendanaan

Pendanaan ada 2 dari luar dan dari dalam, yaitu berasal dari MENPORA dan dari DIK BMK.

Apakah ada kerjasama dengan pihak luar?

Ada, sudah ada kerjasama dengan 6 perusahaan untuk (yang mau) dimagangi

Bagaimana reaksi mahasiswa dengan adanya kewirausahaan

Bagi mahasiswa yang mau maju, akan datang langsung ke sini.

Apakah selama ini Kewirausahaan juga menjadi bapak angkat bagi mahasiswa yang punya usaha tapi kekurangan modal ?

Kewirausahaan punya banyak unit, salah satunya Unit Kepemudaan. Unit ini mendapat dana bantuan dari MENPORA. Sehingga lewat inkubator bisnis, mahasiswa tersebut dibina tetapi masih sedikit, salah satunya *A Yasin Colection*, selain itu lewat pemagangan-pemagangan.

Selain mahasiswa, siapa lagi yang dibina?

Tidak hanya mahasiswa saja yang dibina tetapi para pengusaha kecil menjadi pengusaha binaan. Pengusaha binaan ini ratusan jumlahnya. Disini mereka membantu program pemasaran, aspek manajerial dari pengusaha binaan tersebut.

Kendala-kendala apa saja yang ada dengan pelaksanaan Kewirausahaan di UNS

Pertama tidak semua mahasiswa menganggap Kewirausahaan menjadi salah satu kebutuhan untuk bisa maju. Yang kedua tidak semua mahasiswa mengenal tentang Lembaga Kewirausahaan karena Lembaga Kewirausahaan merupakan lembaga yang baru. Ketiga mahasiswa sekarang padat jadwal kuliahnya sehingga kadang-kadang susah untuk menyediakan sedikit waktunya. Misalnya untuk mengikuti training kewirausahaan. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan komitmen mahasiswa.

Sebenarnya dalam era globalisasi kewirausahaan menjadi salah satu alat untuk *survival*. Jadi kalau sudah lulus punya wawasan lain, dapat bekerja untuk dirinya sendiri dan bekerja untuk lingkungan. Dalam hal ini dapat kita lihat di Lapangan Manahan Setiap hari Minggu, banyak mahasiswa yang berjualan Coca Cola dan bubur ayam. Sehari pendapatan mereka bisa mencapai 100.000,00.

Himbauan Bapak bagi mahasiswa dengan adanya Kewirausahaan?.

Manfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh universitas agar menjadi mahasiswa yang plus. Dibuatkan lembaga oleh rektor, disiapkan tenaga yang punya komitmen dan dedikasi tinggi, silahkan dimanfaatkan. Banyak mahasiswa yang sudah datang kesini (kewirausahaan) saya butuh ini. Dana bisa lewat bidang I, bidang III. Yang penting mahasiswa mau memanfaatkan dan mahasiswa punya komitmen. Sehingga ikut pelatihan ya ikut bener dari awal sampai akhir. (**Nur Zanna**).

Bengawan Solo Dulu dan Sekarang

Bengawan Solo riwayatmu kini
Sedari dulu jadi perhatian insani...

Gesang

Begitulah keadaannya, sungai yang bermata air di daerah Baturetno, Wonogiri ini selalu menjadi perhatian masyarakat khususnya bagi mereka yang selalu berhubungan dengan keberadaan sungai tersebut sejak dulu hingga sekarang.

Pembangunan yang berjalan cepat, mau tidak mau menimbulkan dampak yang cukup potensial bagi perubahaan ekosistem. Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan lingkungan, sebagai satu ekosistem. Oleh karenanya pembangunan yang dilaksanakan diupayakan seminimal mungkin merusak lingkungan hidup, sebagai satu unsur ekosistem.

Pembangunan lingkungan merupakan hak dan kewajiban warga negara tanpa kecuali, bahkan telah diatur dalam UU Nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan RI untuk mempertahankan kelestarian lingkungan, dan pasal 6 UU Nomor 4 tahun 1982 mengatur pula bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan.

Dalam KTT Bumi di Rio de Jeneiro Juni 1992 telah diletakkan dasar-dasar mengenai pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Konferensi khusus PBB ini membahas masalah lingkungan hidup, tidak hanya dari sudut ilmu pengetahuan, tetapi juga dari sudut politik dan ekonomi.

Dari sini jelas bahwa pembangunan yang dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat hendaknya tidak merusak lingkungan. Namun dalam kenyataan, pembangunan itu telah banyak merubah lingkungan yang asri, seimbang bagi ekosistemnya.

Hal ini bisa kita lihat salah satu dampak pembangunan yaitu perubahan yang menimpa Bengawan Solo, dalam kurun 25-30 tahun.

Bengawan Solo, tiga dasa warsa yang lalu cukup memberikan arti bagi penduduk sekitar, dimana fungsi dan perannya sangat menopang kehidupan masyarakat. Airnya relatif jernih, ikan berlimpah, pasirnya bisa ditambang, tempat pemandian 'gratis' bagi anak-anak sehabis menggembala dan itu merupakan pemandangan sehari-hari di Bengawan Solo.

***

Perubahan Terjadi

Kenyataan Bengawan Solo dulu sangat kontras dengan apa yang terjadi dan bisa kita saksikan sekarang ini. Arus industrialisasi dan modernisasi yang begitu cepat dengan berdirinya pabrik-pabrik disepanjang aliran sungai, dengan perlahan membenamkan keagungan Bengawan Solo menjadi "muram" terlihat kotor, bau dan penuh dengan buangan limbah, baik itu limbah rumah tangga maupun limbah pabrik dengan bahan-bahan aditif-nya

yang cukup berbahaya bagi manusia, tanaman dan binatang.

area ini sebagian besar (80 %) adalah industri tekstil. Terutama dalam proses pewarnaan (Dyaing/printing) baik yang

ada kondisinya sangat memprihatinkan dan jarang beroperasi. Demikian pula dalam proses produksi industri

Bengawan Solo menampung segala limbah

foto Ali

Tumbuhnya industri di DAS Bengawan Solo hulu tidak terlepas dari kebijakan zona industri yang dimulai tahun 70-an, terutama untuk industri tekstil yang cukup berhasil, perencanaan tersebut adalah untuk mendukung kebijakan nasional dalam hal pendapatan negara dari ekspor non migas, dan penyediaan lapangan kerja.

Industri yang potensial menimbulkan pencemaran di

langsung maupun yang ada di anak sungai. Karena tekstil banyak menggunakan bahan kimia dalam pewarnaan, misal *clorin* dan *naftol*.

Dalam produksinya zat tambahan itu bersamaan air akan menjadi zat buangan yang akhirnya ke sungai. Apalagi industri-industri yang ada sampai sekarang sedikit sekali yang mempunyai unit pengolahan limbah. Kalaupun

kimia (farmasi), metal dan lainnya potensial mengeluarkan bahan beracun dan berbahaya (B3) dalam limbahnya.

Perubahan warna air Bengawan Solo banyak disebabkan hasil buangan limbah tekstil. Dari segi perubahan fisik, warna air dapat terlihat coklat kemerah-merahan dan kadang kehijauan. Dari penelitian Gita Pertiwi tahun 1994 beberapa indikator kimia

air telah terdeteksi cukup tinggi, terutama untuk BOD dan COD, yaitu sebesar 74,0 dan 361,3 mg/l. Sementara kandungan logam dan unsur toxic juga terdeteksi, misal Sianida sebesar 0,003 mg/l, Amoniak 0,207 mg/l, Besi 0,28 mg/l, dan Cadmium 0,205 mg/l. Unsur-unsur tersebut akan lebih tinggi terdapat pada anak sungai Bengawan Solo yang begitu menjamur indusrtri tekstil.

Menurut laporan tim prokasih Jawa Tengah tahun 1992 jumlah industri dalam skala besar ada 58 perusahaan yang berdiri di DAS Bengawan Solo hulu. Industri tersebut adalah yang terkena prokasih, karena menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan, belum lagi industri kecil yang cukup banyak dan tidak terdeteksi.

Selain itu daerah hulu Bengawan Solo sudah tidak memiliki daerah resapan air hujan yang bagus. Aspek rusaknya lingkungan ini menimbulkan tidak terkendalinya debit air dengan baik. Apabila hujan besar datang di hulu maka akan terjadi banjir di hilirnya.

***

Kesaksian masyarakat

Lalu, bagaiamana dampak langsung yang dirasakan masyarakat yang telah menyatu dan bergelut dengan Bengawan Solo sejak kecil hingga sekarang. Mari kita ikuti penuturan beberapa saksi atas perubahan Bengawan Solo ini.

"Dulu, bengawan banyak lubuknya yang dalam, airnya tenang, tidak mengalir, ikan-ikannya menjadi krasan (betah), bahkan buaya juga ada. Ikan di bengawan dulu sangat banyak, seperti *blancer, jambal, lele, dan klalen*. Kalau hanya sekedar *wader* dan *bader* saja sudah lumrah," jelas mbah Manto berusia 65 tahun, seorang petani di desa Langenharjo, Grogol, Sukoharjo. "Dulu waktu saya masih kecil kalau mencari ikan dapatnya berkeranjang-keranjang, sekarang sulit,"tambahnya.

Bahkan menurut mbah Manto, waktu masih kecil banyak penduduk sekitar Langenharjo yang mencari ikan sebagai sandaran hidup.

Hal itu dikuatkan Kromo Pawiro, 60 tahun menjadi nelayan sejak tahun 1936 hingga sekarang ini, tinggal di Sawahan kelurahan Sangkrah, Pasar Kliwon. Menurutnya sejak kecil sudah banyak nelayan di Bengawan Solo, bahkan hingga tahun 70-an masih sekitar 200 orang lebih namun sekarang hanya dia yang masih bertahan.

"Pada tahun 1937 saya pernah mancing mendapatkan bader sebanyak kurang lebih 400 ekor", cerita mbah Kromo. Bahkan menurutnya kalau gogoh (mencari ikan dengan tangan kosong) saja bisa mendapatkan udang dalam jumlah banyak.

Hingga tahun 60-an jumlah ikan di Bengawan masih cukup banyak, begitu juga di sungai cabangnya seperti kali Pepe. "Tahun 1960-an kali Pepe masih banyak ikan, terutama lele, saya pernah mendapat 200 ekor lele besar-besar. Sekarang mencari lele 6 ekor saja sulit", tambah mbah Kromo, dengan nada jengkel.

Bahkan dulu menangkap ikan menurut mbah Kromo, dalam satu hari bisa mendapat ikan sebanyak 16 kg (tahun 45-an) atau bila diuangkan mencapai Rp 500,- sampai Rp 600,-. Uang sejumlah itu kalau untuk membeli beras bisa

Betapa sulitnya mengais rejeki di Bengawan repro GP

mendapatkan setengah kuintal. Bahkan tiap bulan bisa membeli emas 6 hingga 10 gram.

"saya pernah mancing mendapatkan bader sebanyak kurang lebih 400 ekor Bahkan kalau gogoh (mencari ikan dengan tangan kosong) saja bisa mendapatkan udang dalam jumlah banyak"

Keadaan tersebut sangat jauh berbeda dengan sekarang ini, walaupun hal keadaannya memang tidak bisa kita elakkan dengan perkembangan jaman. Namun yang jelas perhatian terhadap lingkungan sejak dulu sudah ada. Hal ini dapat kita lihat dengan larangan dari pihak Kraton Kasunanan menangkap ikan menggunakan obat-obatan atau jenu. "Mencari ikan dengan menjenu atau obat bisa dihukum sampai 15 tahun penjara. Peraturan itu sejak PB IX sudah ada. Dulu pernah ada yang dihukum sampai 15 tahun gara-gara meracun ikan, sekarang meracun ikan di sungai dibiarkan saja", kenang mbah Kromo.

Selain diambil ikannya, air untuk pengairan dan persawahan serta untuk keperluan sehari-hari, pemanfataan pasir untuk dijual banyak masyarakat beranggapan bahwa Bengawan solo banyak menyimpan legenda atau mitos. Sehingga tidak sedikit orang yang melakukan kegiatan spiritual di sungai. Dari sini lahir budaya-budaya seperti melarung ari-ari dan sesaji sampai semedi kumkum *Tirta Yatra Yoga* (meditasi sambil meredam raga).

Menurut Siswo Martono (53), selaku tukang satang perahu dari Pasar Kliwon, Solo. "Di Bengawan dulu ada dua macam acara padusan (acara mandi atau membersihkan diri menjelang bulan Puasa), yaitu *padusan Jawa dan padusan Cina. Padusan Jawa* dilakukan untuk menyambut bulan suci Ramahdlan. Acara ini dilakukan dua atau satu hari menjelang bulan Puasa. Sedangkan *padusan Cina* dilakukan untuk menyambut tahun baru Cina, biasanya jatuh pada bulan Februari".

Ditambahkan Siswo Martono, peringatan padusan ini meriah sekali, ada acara tari-tarian, ketoprak, dan sebagainya. Bermacam-macam jajanan dijajakan. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi.

Mencari ikan dengan menjenu atau obat bisa dihukum sampai 15 tahun penjara

Kalau sekarang orang takut kumkum di sungai, bukan lantaran apa-apa tapi karena airnya sudah berubah kotor dan berbau sehingga bila kumkum di sungai kulit menjadi gatal. Kegiatan yang masih terlihat adalah melarung sesaji atau ari-ari.

Dari beberapa kasus diatas, menunjukan pada kita bahwa pembangunan yang begitu cepat bila kurang memperhatkikan masalah lingungan akan berdampak negatif. Dan masyarakatlah yang akan menerima akibatnya.

Memang bila kita ingin mengembalikan fungsi Bengawan Solo seperti tiga dasa warsa lalu atau setidaknya mengurangi beban yang diterima Bengawan Solo agar tidak semakin parah. Bukanlah pekerjaan yang mudah, karena semua pihak akan terkait. Mulai dari masyarakat, pengusaha sampai ke pejabat pemerintah.

Pemerintah sendiri selama 23 tahun telah mengembangkan berbagai kebijakan lingkungan hidup baik yang tertuang dalam UU, Peraturan pemerintah, Kepres maupun keputusan menteri. Garis kebijaksanaan tersebut terutama sebagai tindak lanjut kebijaksanaan lingkungan hidup yang telah dituangkan dalam UU nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup.

Dalam kenyataan kebijakan yang dibuat pemerintah masih belum optimal, sehingga bila keadaan ini tidak mendapat tanggapan serius maka akan semakin parahlah Bengawan Solo, maka hanya tinggal lagu Bengawan Solo saja yang masih indah untuk dinikmati.

Ali Rustamaji
Dari berbagai sumber

Televisi di Tengah Berbagai Kepentingan

Ade Sartono

Bagi masyarakat, kehadiran televisi memberikan "angin segar" tontonan di tengah keluarga. Bagaimanapun, implikasinya bukan karena tayangan TVRI dinilai jelek pemilihan siarannya yang membuat masyarakat menggemari tayangan tv swasta, namun karena meeka telah jenuh dengan pola siaran TVRI yang hampir monoton. Kalau dikaji, sebenarnya memang tidak monoton, TVRI cukup variatif juga. Tapi, ia kalah variatif ketimbang tv swasta yang mengerti selera pasar.

Indikator monotonitas dari acara-acara TVRI, yang dirasakan masyarakat diantaranya TVRI terbiasa dengan terlalu banyak propaganda pemerintah (mengenai hasil pembangunan dari berbagai bidang, dan juga peristiwa kenegaraan) yang semuanya bersifat searah. Seni budaya nusantara (Aneka Safari,Anekaria Nusantara, Bhineka Tunggal Ika dll) tampil penuh sifat penanaman rasa kebangsaan dan cinta budaya tradisional yang kurang menarik. Begitupula hiburan film terlalu sering menayangkan film impor 'Barat' yang sulit ditebak "kehadirannya", dan masih banyak lagi bentuk tayangan yang krang menarik.

Semua itu menjadi terasa "hambar". Bila membandingkan kecenderungan acara tayangan TVRI yang demikian, maka munculnya tv-tv swasta dengan acara-acaranya yang "vulgar", jelas menjadi semacam 'angin segar' bagi pemirsa untuk menghilangkan kejenuhan dalam menyaksikan tayangan TVRI yang telah meeka saksikan sejak mengenal televisi hingga sekarang.

Agenda acara tv-tv swasta harus diakui tampil tidak monoton. Sebagian besar menayangkan aspek-aspek yang 'menarik' menurut kacamata pemirsa secara umum dan lebih variatif, baik materi hiburan dan informasinya.

Namun dibalik itu, agenda acara tv swasta ternyata membuat kita riskan pad aspek keberhasilan "dunia pendidikan" di masa yang akan datang. Pendidikan pada dasa warsa terakhir cenderung dipertanyakan oleh khalayak, sementara itu banyak orang suka mengkambinghitamkan dunia pendidikan (dalam arti sempit saja SD, SMP, SMU dan PT). Mulai saat ini dan seterusnya kalangan pendidik -guru, dosen, instruktur, dan yang seprofesi-- mendapat PR baru yaitu harus memperhitungkan.mengkaji dampak negatif pengaruh tayangan tv-tv swasta terhadap keberhasilan belajar di lembaga pendidikan.

Oleh karena itu sudah seyogyanya orang dewasa memperhitungkan secara sederhana jam-jam kegiatan anak mereka. Mulai dari waktu belajar di sekolah --biasanya dari 07.00-13.00 (6 jam) pagi hari sedangkan yang masuk sore dari 13.00-18.00 (5 jam). Dari 24 jam setiap hari, maka sisa waktu mereka lebih banyak di rumah. Kalau tidak dipantau oleh orang tuanya saat mereka belajar di rumah maka anak-anak akan cenderung untuk lebih menghabiskan waktu luangnya di rumah dengan menyaksiskan acara tv-tv swasta, yang jumlah waktunya lebih dari 8 jam sampai menjelang istirahat.

Melihat adanya bahaya yang mengancam seperti itu, sudah sewajarnya dunia pendidikan

menyatakan 'perang' kepada tayangan acara-acara televisi swasta yang sifatnya kurang mendukung keberhasilan pendidikan maupun keutuhan suatu bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa.

Disisi lain memang tidak bisa kita pungkiri adanya era globalisasi dan era informasi. Kemampuan tv sawsta dalam menampilkan banyaknya informasi secara variatif disambut meriah oleh pemirsa --dari kalangan rakyat jelata hingga pejabat negara. Tapi perlu kita perhitungkan, bagaimana dampak negatif yang akan menjadi akibat dari tayangan acara tv swasta. Tanggung jawab siapakah untuk menanggulangi dampak negatif tersebut ?

***

Tanggung jawab tersebut berada pada semua lapisan masyarakat baik, termasuk pemerintah. Tugas untuk apa? Untuk mencegah adanya dampak negatif acara-acara dari televisi, diperkirakan akan mengakibatkan beberapa hal.

Pertama, pudarnya persatuan dan kesatuan bangsa. Pemirsa televisi adalah rakyat Indonesia yang heterogen. Variatifnya acara-acara tv memiliki komunitas penonton tersendiri. Ini dikhawatirkan akan membuat pemirsa terkotak-kotak -terpecah belah- menjadi pemirsa tv-tv swasta tertentu. Maka akan terbetuk kelompok pemirsa TPI, kelompok pemirsa RCTI, kelompok pemirsa SCTV, dan seterusnya. Bila keadaan ini dibiarkan selam bertahun-tahun, akan menjadi 'penyakit' yang berbahaya (mengancam bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

Aspek lain yang diperkirakan akan terjadi adalah lahirnya generasi masyarakat baru Indonesia yang enggan bergaul, enggan bermasyarakat, enggan bergotong-royong. Hal ini terjadi karena mereka menjadi betah di rumah sepulang bekerja. Lambat laun masyarakat akan kecanduan acara-acara televisi, dan menjadi masyarakat yang tidak memiliki solidaritas bermasyarakat. Menjadi masyarakat Indonesia yang tidak lagi mengenal makna Bhineka Tunggal Ika, melainkan "Bhineka Tunggal Bhineka' yang artinya bermacam-macam tapi ya tetap beraneka juga.

Kedua, menipisnya rasa cinta tanah air. Dengan menyaksikan film-film Eropa-Barat-Amerika-Asia yang lebih banyak bertema sadisme, pembunuhan, pemerasan dan berbagai perilaku amoral yang setiap hari ditayangkan. Maka, apa yang telah disaksikan itu akan tersimpam dalam pikiran pemirsa. Menurut terminologi psikologi pendidikan, bila seseorang dalam waktu yang lama, menyaksikan acara-acara seperti di atas, secara psikologi acara apa yang disaksikan akan terasa biasa saja, bahkan menjadi suatu yang lumrah dilakukan. Sehingga pemirsa akan menjadi insan yang lupa diri, lupa saudara, lupa orang tua, lupa segala-galanya, dan akhirnya menjadi lupa tanah airnya.

Ketiga, hilangnya rasa rela berkorban. Proses kehilangan rasa rela berkorban dapat dilacak dengan adanya tayangan sponsor (iklan-iklan). Maka akan terjadi masyarakat baru yang mempunyai sifat individualisme, konsumerisme, monopolisme dan materialisme. Sifat-sifat ini mengakibatkan adanya tuntutan masyarakat akan kehidupan yang sebenarnya melebihi standar kehidupan yang bisa dipenuhinya. Akibatnya masyarakat tersebut menjadi nekad untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan sifat tersebut. Hal ini akan membahayakan rasa rela berkorban di masyarakat kita.

Keempat, melahirkan sifat-sifat buruk di masyarakat, seperti berperilaku keras, sadis, penipu dan sebagainya. Bhakan akan menimbulkan masyarakat yang stress. Merajalelanya sifat-sifat buruk ini membuat akan menghambat pembangunan.

**Pemerhati masalah sosial dan Guru SMUN 1 Palimanan Cirebon*

MENDONGKRAK KELULUSAN DENGAN SEMESTER KILAT

Idealnya, mahasiswa UNS menyelesaikan studinya selama empat hingga tujuh tahun. Akan tetapi pada kenyataannya, banyak mahasiswa tidak mampu menyelesaikan studinya tepat waktu. Mereka meminta perpanjangan waktu untuk bisa meraih gelar sarjananya. Guna mengantisipasi persoalan tersebut, maka Fakultas Kedokteran, Fakultas Sastra, dan FKIP memperkenalkan sistem pendidikan yang lazim disebut semester padat atau semester pendek. Apa dan bagaimana sistem kuliah yang relevan baru di kampus kita tersebut ? Efektifkah dalam mempercepat masa studi mahasiswa ? Kita ikuti laporan berikut ini.

***

Pelaksanaan semester padat di Fakultas Kedokteran dilaksanakan pada setiap semester dengan mata kuliah semester sebelumnya. Semester ini hanya untuk mahasiswa yang diperkirakan yang dalam satu semester lulus atau telah menempuh minimal 110 SKS dan mata kuliah yang dipadatkan sebelumnya pernah diambil tetapi tidak lulus dan tidak boleh bernilai E.

Disamping semester padat, fakultas ini juga mengembangkan sistem remidiasi sebagai sarana untuk mempercepat kelulusan. Sistem ini hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang berperingkat Merah atau jumlah SKS kurang dari 2 SKS dari batas kelulusan.

Pelaksanaan semester padat di FKIP lain lagi. Fakultas yang mencetak calon pendidik ini tidak dilaksanakan dalam satu semester penuh melainkan diadakan pada bulan-bulan tertentu, yaitu bulan Oktober hingga Desember dan nilai harus diserahkan pada akhir bulan Desember. Adapun mahasiswa yang berhak mengambil semester padat adalah mahasiswa yang duduk di semester IX atau masih mempunyai masa studi dan dia telah menempuh semua mata kuliah yang belum lulus maximal 11 sks dengan nilai minimal 1,00 atau D, tidak termasuk nilai KKN dan Skripsi. Mengenai Bentuk pemberian tugas dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya pada dosen yang bersangkutan dibawah koordinasi ketua program.

Ternyata semester pendek di masing-masing jurusan pada FKIP mempunyai peraturan yang berbeda tergantung kebijaksanaan yang berlaku di jurusan masing-masing. Seperti kondisi Semester Padat Program Matematika FKIP UNS menurut Drs Parwoto, dosen pelaksana semester padat di program matematika dilaksanakan pada semester ganjil. Kegiatan ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah pada semester genap. Mengingat kondisi studi mahasiswa matematika, persyaratan nilai ada beberapa mata kuliah yang nilainya boleh nol (0) selain itu 1 (satu).

Mekanisme pelaksanaannya bisa melalui kuliah khusus maupun umum, pemberian tugas, pergayaan bahan studi dsb. Jumlah mahasiswa yang ikut cukup banyak, rata-rata di atas 20 orang tiap mata kuliah. Sedangkan

menurut Sri Rubiyati mahasiswa Teknik Bangunan FKIP angkatan 92 pelaksanaan semester pendek di jurusan Teknik Bangunan pada bulan Agustus-September.

Sedangkan semester padat yang berlangsung di Fakultas Sastra diperuntukan bagi mahasiswa semester empat keatas. Mata kuliah yang diambil merupakan mata kuliah semester atasnya. Mahasiswa hanya diperbolehkan mengambil 6 SKS saja. Waktu pelaksanaannya pada saat liburan semester dengan rentang waktu dua bulan, dengan hari efektif Senin sampai Kamis. Adapun bentuk perkuliahan meliputi materi kuliah biasa dilanjutkan dengan diskusi-diskusi dan penugasan membuat makalah atau paper.

ada mata kuliah yang tetap dilaksanakan semester pendek namun nyatanya mahasiswa yang mengikuti tidak ada yang lulus, kadang ujiannya pun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga peminat untuk mengikuti semester pendek tersebut sangat sedikit

Kendala - kendala yang dialami masing-masing fakultas dalam hal ini mahasiswa, umumnya hampir sama dimana belum menjamin kelulusan dari mata kuliah yang diambil. Di Fakultas Kedokteran pelaksanaan semester padat ini sendiri tidak ada keseragaman, ada bagian-bagian tertentu (mata kuliah tertentu-RED) yang memberikan bimbingan semacam penyegaran pada mahasiswa yang mengambil semester padat, tetapi tidak jarang bagian-bagian tertentu tidak memberikan bimbingan hanya memberikan kesempatan sekali ujian. Tak heran menurut beberapa mahasiswa mengambil padat ada kalanya justru lebih berat daripada mengambil mata kuliah tersebut pada semester reguler. Walaupun berat dilakukan, nilai yang dihasilkan dari ujian semester padat maksimal B, tak jarang justru E. Tetapi banyak mahasiswa yang keberatan jika program padat dihapus karena menutup kemungkinan mempercepat kelulusan.

Lain lagi dengan yang dikeluhkan salah seorang mahasiswa FKIP bahwa sebenarnya semester pendek diharuskan bagi semua dosen tapi dalam prakteknya ada yang melaksanakan hanya sekadar formalitas saja. Contohnya ada mata kuliah yang tetap dilaksanakan semester pendek namun nyatanya mahasiswa yang mengikuti tidak ada yang lulus, kadang ujiannya pun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga peminat untuk mengikuti semester pendek tersebut sangat sedikit.

Senada dengan itu, bagi mahasiswa Fakultas Sastra walaupun banyak yang menyatakan senang, ada juga yang merasa keberatan. Kebanyakan mereka keberatan dengan banyak tugas diberikan dosen tapi tidak didukung dengan referensi buku di Fakultas.

Sejalan dengan pro dan kontra seputar semester pendek ini, yang jelas gebrakan semester pendek ini cukup berani. Jika memang ingin mengatrol mereka yang cukup lama lulusnya, lalu bagaimana dengan kualitas yang dihasilkan nanti. Salah seorang mahasiswa sastra bahkan prihatin dengan model pendidikan seperti yang dipraktekkan dalam semester pendek itu, karena khawatir tujuan semester pendek hanya untuk mematikan kepedulian sosial mahasiswa terhadap masyarakat. Dengan disibukkannya mahasiswa pada aktivitas akademis untuk mengejar jumlah SKS-nya maka mahasiswa tak ada waktu lagi untuk mendiskusikan dan mengkaji permasalahan permasalahan yang timbul di masyarakat, mahasiswa menjadi terjebak pada pragmatisme akademis.

Selain itu, program semester pendek pun tidak menjamin bahwa mahasiswa tersebut betul-betul paham terhadap suatu materi yang dipadatkan dalam beberapa bulan saja. Hal itu dibenarkan oleh salah satu mahasiswa sejarah FS angkatan 91, ia mengatakan bahwa persoalan banyaknya mahasiswa di FS yang lulusnya tidak "tepat waktu" sebenarnya bukan terletak dalam teori seperti yang diajarkan dalam semester pendek. Namun ternyata lebih banyak dalam pengafiliasian metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi. Selain itu faktor pembimbing skripsi yang terkadang "semau gue" juga menyebabkan mahasiswa tak dapat menyelesaikan studinya dengan cepat.

Tampaknya program semester pendek ini perlu dikaji ulang pelaksanaanya. Setidaknya bila kita menginginkan kwalitas sarjana benar-benar bermutu. Apalah artinya bila lulus cepat namun tidak peka terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat. Tidak dapat dibayangkan bagaimana bila mahasiswa kemudian hanya terpaku pada persoalan-persoalan akademis.

***

[Yuli, Dwi RP, Nur, Anwar]

"PESTA"

Diaryku
Kata bapak, "Pesta" sudah selesai. Buktinya ia berani keluar rumah di siang hari, mana mau Bapak pergi keluar rumah di siang bolong waktu pesta masih berlangsung. Macet, alasan Bapak. Kalaulah mesti pergi, Bapak selalu pakai bendera kecil di motor atau diikat Ikepalanya.
Ih, lucu.. masak, Bapak takut orang berpesta, sih !!!

Bapak benci pesta kemarin, soalnya, Mas Bas-abangku-terjatuh dari truk gara-gara ikut pesta. Kepalanya Bocor. Bapak keluar duit banyak, nggak ada bantuan dari yang ngadai pesta.

Tapi Mas Bas tidak jera juga. Kali ini Mas Bas ikut berpesta pakai motor yang suaranya meraung-raung memekakkan telinga. Tanpa Helm, SIM atau STNK, dan kalau naik motor, Masya Allah, bikin orang ngeri melihatnya. Kata dia, Polisi tidak berani menangkap Mas Bas, Ia hebat Ya ?!!

Tanggal 29 Mei, rumahku sepi sekali. Kata Bapak, hari itu puncak pesta, orang-orang pergi ke lapangan.

Mereka dikasih kartu, disuruh nyoblos di kamar tertutup. Mbah dul yang ompong ikut nyoblos meski encoknya kumat. Katanya, Pak Lurah nggak akan kasih kartu sehat kalau ia tetap di rumah, tidak mau pergi nyoblos.

Untung aku masih SMP, sehingga tidak dipaksa-paksa seperti mbah Dul.

BIDIK

Bapak pulang jam hampir Magrib dengan marah-marah. Katanya, panitya kukunya panjang, banyak kartu yang dipencet dan dihitung tidak syah. Itu kata bapak lho. Ih, kasihan bapak, yang kartunya mungkin juga kena korban kuku panjang itu.

Diaryku,
Kini pesta telah usai, kata Bapak. Bapa berani keluar siang hari, Mas Bas sudah pakai helm dan surat lengkap lagi kalau naik motor. Bapak sudah lupa kuku panjang panitya. Mbah Dul juga sudah lupa pada ancaman pak lurah. dan aku pun sudah lupa pada pesta itu.

Nana

Narasi: NHZ
Foto: Ulin dan Ali

Separuh Lebih Mahasiswa UNS Malas Baca Buku !

Mahasiswa tidak dapat lepas dari yang namanya buku. Buku, bagi mahasiswa adalah ibarat pedang bagi prajurit. Akan tetapi bagaimana sebenarnya kebiasaan membaca di kalangan mahasiswa UNS? Apakah mereka sudah menjadikan membaca sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupannya ? Tim Litbang KENTINGAN mengadakan jajak pendapat untuk mengetahui bagaimana kebiasaan membaca di kalangan mahasiswa UNS.

Sehubungan dengan budaya membaca atau bahasa kerennya *reading habbit*, Kentingan telah menyebar angket sebanyak 125 buah. Responden adalah para mahasiswa dari berbagai fakultas yang ada di lingkungan UNS. Jumlah angket pada tiap fakultas tergantung perbandingan jumlah mahasiswanya. Dari jumlah angket yang tersebar, 122 angket berhasil kembali dan terisi. Walaupun bisa dikatakan kurang mewakili namun hal itu bisa kita gunakan untuk meraba persoalan yang dikedepankan tersebut.

Dari jawaban-jawaban yang masuk, sebenarnya mahasiswa masih menganggap membaca itu penting sebagai bagian dari kehidupan intelektual. Dari semua responden, 94% menjawab penting. Anehnya, 6 % sisanya menganggap membaca merupakan hal kurang penting.

Secara global minat baca mahasiswa memang besar, walaupun pemanfaatan waktunya cukup bervariasi. Dari 24 jam setiap hari, waktu yang digunakan untuk membaca 54 % responden menggunakan waktunya untuk membaca kurang dari dua jam perhari. Membaca antara 2-5 jam ada 44% dan mahasiswa yang membaca lebih dari 5 jam hanya 2%. Itu pun 74% responden mengatakan hanya memilih di waktu luang saja. Hanya 14% saja yang menggunakan jam-jam tertentu secara rutin. Dan sisanya bahkan tidak menyisakan waktu untuk membaca.

Bidang yang digemari dalam membaca buku-buku, bidang agama mempunyai rating tertinggi, kemudian disusul bidang teknologi di urutan kedua, sosial dan politik di urutan ketiga. Budaya dan seni di urutan keempat, selebihnya bidang hukum, lingkungan dan ekonomi. Membaca buku berbahasa asing dari mereka hanya 7% yang mengatakan sering , 59% kadang-kadang dan 34% tidak pernah.

Lalu apa kendala dari mahasiswa hingga sulit untuk menumbuhkan reading habit tersebut ? Kendala yang paling utama, 51% menurut jajak pendapat adalah karena malas, 28% karena waktu yang cukup padat, 18% karena faktor kesempatan dan 3% tidak tahu kendalanya.

Selain itu membaca juga tak lepas dari adanya buku yang dibaca. Sehubungan dengan pengoleksian buku, 59% tidak selalu mengoleksi alias lebih dari separo responden masih

memanfaatkan perpustakaan atau meminjam atau mungkin kalau ada kesempatan saja membeli. Walaupun harga buku cukup mahal, mereka yang gemar mengoleksi buku cukup besar juga yaitu 28%. Sedang sisanya (13%) tidak mengoleksi buku.

Mengenai pola membaca buku, 61% membaca secara bersambung satu buku dengan waktu yang berbeda, 10% membaca tuntas satu buku dalam satu waktu dan 29% tidak tetap, lain waktu lain buku.

Untuk meningkatkan pengetahuan, maka perlu untuk membaca resensi buku. Nilai kebutuhan membaca resensi buku 12% menyatakan sering, 72% kadang-kadang dan 16% tidak pernah.

Tabel 1

Kendala Membaca	Dalam %
Karena Malas	51
Waktu yang cukup padat	28
Faktor Kesempatan	18
Tidak tahu alasannya	3

Tabel 2

Mengoleksi Buku	Dalam %
Gemar Mengoleksi	28
Tidak Mengoleksi	13
Tergantung Keadaan	59

Masalah kepentingan membaca buku, 38% akan mengharuskan diri untuk membaca saat ada tugas dari kampus dan atau tugas lain yang memerlukan referensi, 20% saat akan ujian dan 52% mahasiswa menyatakan tidak terikat dari kedua hal diatas. Hal tersebut bisa dilihat dari betapa seringnya kunjungan mahasiswa ke perpustakaan.

Menurut data di tiap fakultas, rata-rata kunjungan mahasiswa ke perpustakaan fakultas tiap hari berkisar 60-an. Sebagian dari mereka hanya baca-baca bacaan ringan seperti majalah, koran atau buku-buku lainnya. Selebihnya untuk mengerjakan skripsi. Sedang terhadap kunjungan ke perpustakaan, 53% responden mengatakan jarang-jarang, 34 % sering dan 13% jarang sama sekali.

Minat baca maupun kepemilikan buku terkadang tidak berhubungan dengan uang saku. Mengenai jatah uang saku perbulan 59% kurang dari Rp 75 000,00, 27% antara Rp 75 ribu-100 ribu dan 15% memiliki saku lebih dari Rp 100 ribu.

Dari uang saku tersebut hanya sedikit saja yang memiliki anggaran tersendiri untuk membeli buku yaitu hanya 5%, 43% terkadang mempunyai dan 52% tidak mencanangkan anggaran untuk membeli buku. Usaha untuk membeli buku walaupun tidak punya uang 11% berusaha mencari uang untuk membelinya secara mandiri, 83% berusaha mengetahui isinya tanpa harus memilikinya walaupun dengan cara meminjam saja dan 6% pasrah kalau ada ya dibaca dan kalau tidak ada juga tidak berusaha mencari.

Dalam membeli buku, pertimbangan pertama yang digunakan adalah berdasarkan isi yang menarik yaitu sejumlah 80%, sedang yang mempertimbangkan harga yang murah tedapat 8%, dan sisanya 12% alasan lain. Pembelian buku dalam satu bulan 91% kurang dari 2 kali, 8% antara 2-4 kali dan 1% lebih dari satu kali.

Begitulah gambaran minat mahasiswa UNS dalam membaca buku. Dari gambaran kecil tersebut jelaslah untuk meningkatkan *reading habbit* mahasiswa perlu melibatkan ber-bagai pihak. Termasuk pemerintah untuk menyediakan buku-buku yang bermutu dengan harga terjangkau mahasiswa, yang merupakan generasi penerus pembangunan ini.*[NHW&Litbang]*

Dislipidemia

Faktor Penyebab Penyakit Jantung

Dislipidemia adalah kelainan metabolisme lipid yang ditandai oleh kelainan (peningkatan maupun penurunan) fraksi lipid dalam plasma. Kelainan fraksilipid yang utama berupa kenaikan kadar kolesterol total, kenaikan kadar trigliserida serta penurunan kadar HDL-Kolesterol.
Ketiganya mempunyai peranan dalam proses atherosklerosis, yang merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner

***

Dislipedemia dibedakan dengan hiperlipidemia, karena dalam hal ini hiperlipidemia dinyatakan sebagai hiperkolesterolemia, hipertrigliserida atau kombinasi keduanya tanpa memandang adanya penurunan fraksi HDL-Kolesterol.

Menurut **Harrison** (1987) dan **Pratanu** (1996), dislipidemia primer umumnya disebabkan karena faktor genetika. Orang yang mempunyai latar belakang genetika menderita dislipidemia lebih besar kecenderungan untuk terkena gejala ini, dibandingkan dengan yang tidak mempunyai riwayat dislipidemia.

Penyakit-penyakit lain yang berpengaruh terhadap transport lipid seperti diabetes melitus, uremia, alkoholisme, hepatitis akut dan sebagainya merupakan penyebab terjadinya dislipidemia sekunder.

Dislipidemia mendapat perhatian besar karena merupakan salah satu faktor resiko penyakit jantung koroner bila terdeteksi sejak dini dapat dilakukan perbaikan diet, olah raga dan pengobatan. Dari tahun ke tahun usaha pengungkapan peranan dislipidemia terhadap kemungkinan terpapar penyakit jantung koroner terus dilakukan.

Menurut **Wilson** (1995) pengukuran kadar trigliserida telah lama dilakukan di Framingham. Studi, baik pada laki-laki maupun perempuan , menunjukan bahwa kenaikan kadar trigliserida merupakan faktor resiko independen terjadinya penyakit jantung koroner.

***

Mekanisme

Pada keadaan normal partikel-pertikel yang mengandung trigliserida adalah kilomikron, kilomikron remnant, VLDL (Very low density lipoprotein) dan VLDL remnant (IDL=intermediate density lipo protein). Dalam sirkulasi sisa trigliserida dalam VLDL setelah dihidrolisa ke dalam jaringan akan ditukar dengan ester kolesterol dalam HDL-Kolesterol. Kemudian VLDL sisa (IDL) ini dikonversi menjadi LDL-Kolesterol melalui transport endogen.

Pada hipertrigliseridemia konsentrasi VLDL dalam darah meningkat sehingga terjadi peningkatan proses transfer ester kolesterol dari HDL ke VLDL sebanyak tiga kali lipat. VLDL (IDL) yang mengandung banyak kolesterol membentuk LDL-Kolesterol lebih banyak dan densitasnya menurun, hal ini juga menurunkan kadar HDL. Bila kadar HDL-Kolesterol menurun, clearence (pembersihan) IDL juga menurun akibatnya pembersihan LDL pun menjadi lambat.

Kilomikron sisa dan IDL bersifat atherogenik dan sitotoksik. Jika kadarnya naik dalam darah, resiko atherogenesis meningkat. Melalui transport eksogen, kilomikron remant yang ditempel Apo E seharusnya ditangkap oleh reseptor di hepar. Adanya ketidak seimbangan Apo C-II dan Apo C-III menyebabkan banyaknya kilomikron sisa dalam sirkulasi. Kondisi ini memperberat kerja Apo E. Apalagi bila Apo E tidak berfungsi secara normal, maka peningkatan kilomikron sisa oleh reseptor di hepar terganggu. Sehingga kilomikron sisa akan beredar lama dalam sirkulasi.

Di intima pembuluh darah, dibentuk radikal bebas oleh sel

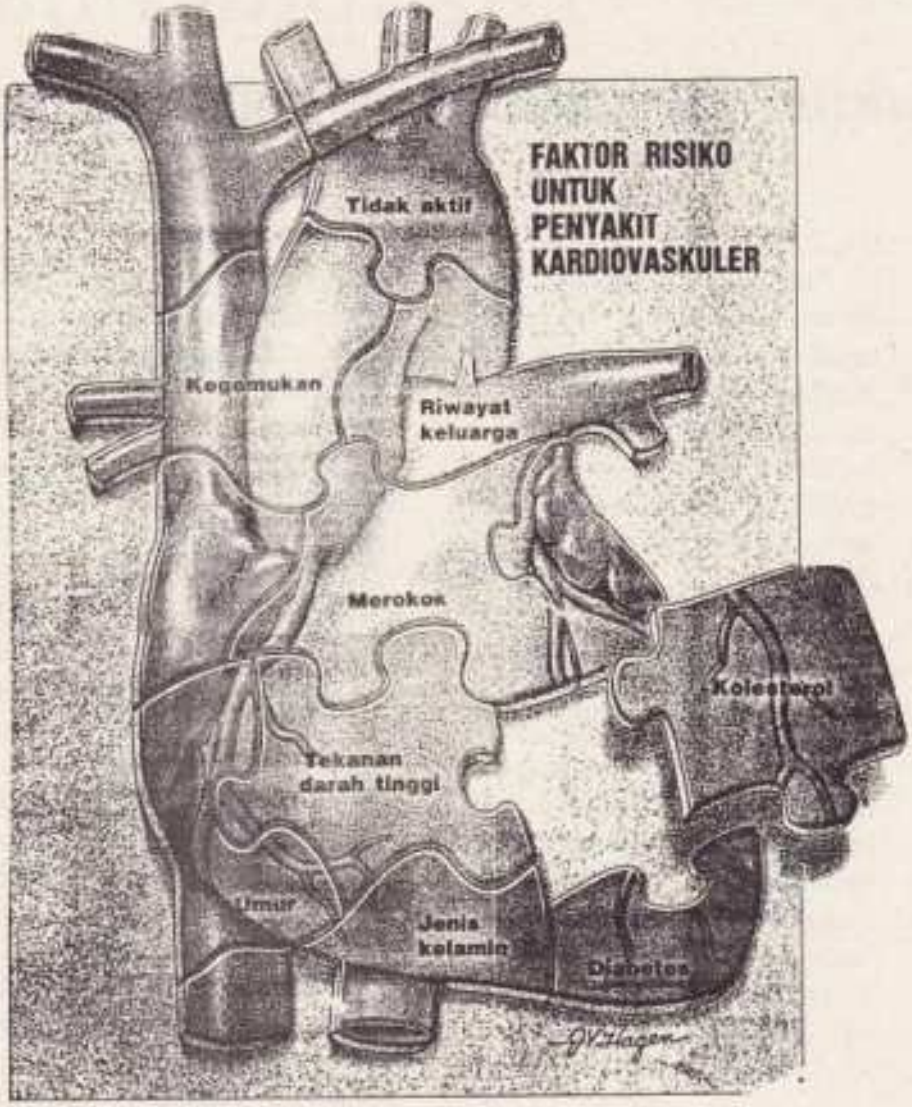

Repro Higma

otot polos, makrofag dan sel endotel. Dengan meningkatnya kadar lipoprotein, khususnya dengan reseptornya yaitu non down regulating reseptor menagkap semua Ox-lipoprotein tanpa batas, sehingga terbentuk sel busa yang menumpuk sebagai fatty strek. Atas pengaruh Ox-LDL yang sitoksik, sel busa mengalami nekrosis. Selanjutnya lipid keluar dari sel, membentuk lipid core.

Pada waktu bersamaan terjadi migrasi sel otot polos dari tunika media ke sub intima dan berploriferasi. Pada perkembangan selanjutnya tertimbun lipid ektra seluler. Timbunan lipid ini merupakan komplek agregat ester kolesterol, kolesterol, trigliserida dan fosfolipid. Dengan demikian plaque atheroslerotik merupakan sel-sel otot polos, jaringan ikat dan lipid.

Proses atherosklerosis pada arteri koroner di epikardial akan mengakibatkan penyakit jantung koroner. Pada penyakit ini terjadi penyempitan pembuluh darah koroner.

Menurut Harrison 1987, proses ini menyebabkan pengurangan perfusi pada kondisi normal atau keterbatasan dilatasi pada saat terjadi peningkatan kebutuhan.

Otot jantung mendapatkan aliran darah dari arteri koronaris yang merupakan cabang pertama dari aliran darah sistemik. Suplay darah ini menentukan kehidupan dan kerja jantung. Sehingga gangguan pada pembuluh darah ini sangat berpengaruh.

***

PENCEGAHAN

Diet amat menetukan profil lipid dalam darah. Dengan pengaturan yang tepat, diet cepat memperbaiki kondisi komposisi lipid dan mengurangi resiko penyakit jantung koroner.

Total intake lemak, harus kurang dari 30 persen. Untuk Indonesia targetnya hanya 20 persen. Keseimbangan antara lemak jenuh dan lemak tak jenuh juga perlu diperhatikan. Penelitian menunjukan bukti banyaknya keuntungan pada intake buah-buahan dan sayuran yang tinggi. Jenis makanan ini, mengandung anti oksidan yang akan mengurangi bahaya oksidasi LDL.

Latihan fisik yang bersifat aerobik, mengurangi ancaman bahaya dislipidemia khususnya dalam menurunkan kadar trigliserida dan meningkatkan kadar HDL. Latihan yang teratur juga akan membawa gaya hidup yang lebih sehat. Kombinasi

latihan fisik dan diet rendah lemak, sama baiknya dengan obat-obat penurun kadar kolesterol dalam menurunkan kadar LDL maupun menghambat progresi atherosklerosis.

Dewasa ini telah tersedia juga obat-obatan yang bersifat menurunkan kadar lemak. Mekanisme kerja obat-obat tersebut beragam, juga efek yang ditimbulkannya. Obat-obat yang telah tersedia misalnya golongan resin, fibrate, asam nikotinik, probucol, statins.

***

Rida, Ali
(Disarikan dari makalah Tonang dan berbagai sumber)

Seputar Kolesterol Dalam Keseharian

A. Mengenal Kadar Kolesterol

Kolesterol yang mengalir dalam darah terkemas dalam satu paket yang terdiri atas lemak dan protein, yang disebut lipoprotein, HDL dan LDL.

HDL dikenal sebagai kolesterol 'baik', karena bertugas membersihkan kelebihan kolesterol dari dinding pembuluh nadi. Sedang LDL sebaliknya, merupakan kolesterol 'jahat'. Ia cenderung menumpuk pada dinding pembuluh nadi.

Untuk mengetahui jumlah kolesterol 'jahat' dalam tubuh maka kita perlu memeriksakan dalam laboratorium. Kemajuan teknologi memungkinkan petugas laboratorium terlatih mengukur kadar kolesterol secara aman, tepat dan terjangkau biayanya.

Dari hasil pemeriksaan dapat diketahui berapa kadar kolesterol kita, dan dapat digolongkan dalam tabel.

Apakah Anda Berpenyakit Jantung

Pemeriksaan	Kadar (mg/dl)		
	Baik	Batas Normal	Buruk
Total Kolesterol	di bawah 200	200 - 240	di atas 240
HDL	di atas 45	35 - 45	di bawah 35
Trigliserida	di bawah 200	200 - 400	di atas 400
LDL	di bawah 130	130 - 160	di atas 160
HDL	di bawah 4,5	4,5 - 5,5	di atas 5,5
LDL/HDL	di bawah 3	3 - 5	diatas 5

Sumber Higina

Jika hasil tes nilainya tinggi ataupada batas nilai normal, dokter mungkin menganjurkan pemeriksaan ulang kolesterol total serta kadar HDL dan trigliserida. Untuk pengukuran yang lebih rinci, kita harus berpuasa hanya boleh minum air putih selama 12 jam. Nilai hasil kolesterol total darah yang baik adalah kurang dari 200 mg/dl.

B. Menurunkan Kolesterol

Mengurangi makanan berlemak dan berkolesterol, menambah santapan sayur dan buah segar serta biji-bijian. Apalagi bila kita mau menurunkan santapan yang mengandung lemak jenuh yaitu kandungan yang merupakan penyebab utama dari kenaikan kadar kolesterol dalam darah.

Daging merah seperti daging sapi dan kambing, telur serta produk yang terbuat dari susu semuanya mengandung banyaklemak jenuh. Daging sapi dapat diganti dengan ikan atau ayam, dan beralihlah ke susu dan margarin berlemak rendah.

Kurangi daging yang berlemak dari sapi, kambing , babi seperti: daging iga, jeroan, sandung lamur, daging sup, buntut, sosis, atau ham. Kurangi juga, susu penuh krim, yoghurt susu penuh, keju, otak, kunging telur, coklat, mentega minyak kelapa, kelapa sawit, santan. Sayuran yang dihidangkan dengan mentega, krim, atau saus ikan.

Pilihlah ikan, unggas yang telah dibuang kulitnya, daging tanpa lemak, susu skim, yoghurt non-fat, keju rendah lemak, putih telur, sayu - an dan buah segar. Konsumsi juga roti tinggi serat, sereal, minyak goreng dari jagung, zaitun, bunga matahari, wijen, kedelai, safflower dan minyak kacang. Selai rendah lemak juga baik untuk dikonsumsi, serta tempe, tahu dan kacang-kacangan.

Lembaga Kemahasiswaan UNS
Demokrasi = Nol

Akbarudin Arif

Harrassment on Intellectual

Diberlakukannya konsep NKK/BKK 21 Januari 1978 yang lalu diikuti dengan keluarnya SK 0457 di tahun 1990 adalah tragedi yang tak terkirakan bagi kehidupan kampus. Apakah pemberangusan itu berhenti di SK? Tidak !!! Pendekatan securitas secara berlebihan bahkan diterjemahkan secara lebih sadis oleh birokrat kampus. Pelarangan diskusi terbuka oleh Dekanat, cekal di dalam kampus, tradisi intel masuk kampus, litsus terhadap aktivis mahasiswa adalah sebagian dari *harassment* terhadap intelektual mahasiswa.

Hasilnya mahasiswapun lalu secara terbuka naluriah menerjemahkan situasi disekitarnya sebagai sedang berlakunya teori Darwin *Survival of the fittest* filsafat rimba yang kuat bertahan hidup yang lemah mati. *Surodiro Joyoningrat Lebur Dening Pengestuti* yang menjadi kebangggaan Jawa sebagai filsafat 'manusia yang benar pasti menang yang Salah Pasti Kalah' hanyalah dongeng menjadi pengantar tidur ...

Selanjutnya, ketika mahasiswa bangun tidur dan mulai lagi mengadakan kegiatan kampus mereka tampil sebagai orang lain, 'wong cilik', orang kalah dengan naluri menyelamatkan diri, bahkan pemintaminta. Secara kualitas mahasiswa telah dimiskinkan karena harta satu-satunya yang berupa intelektual sudah dikebiri. Lihatlah sekarang kegiatannya: pragmatis, hedonis, oportunis dan menghambur-hamburkan biaya saja.

Demokrasi dalam SK = Nol

Selama 6 tahun ini debat lembaga kemahasiswaan baik antar mahasiswa atau mahasiswa dengan pihak-pihak yang berkepentingan atau bersangkut paut dengan SK, selalu titik apinya adalah SK 0457. Kenapa? Jawabnya bisa sangat simpel: tidak ada demokrasi dalam SK.

Demokrasi dalam frame mahasiswa tentunya adalah dari mahasiswa oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa jadi semua permasalahan dari AD/ART, GBHO sampai program kerja seharusnya bisa fleksibel sebagai manifestasi keinginan san kepentingan bersama mahasisiwa. Tetapi SK tidak memberikan satu alternatif fleksibilitas, justru ketika tidak mempunyai syarat demokratis yang kedua yakni *balancing power*, baik itu antara eksekutif legislatif lembaga kemahasiswaan maupun antara lembaga kemahasiswaan dengan lembaga rektorat. Tidak adanya syarat demokratis yang kedua ini menjadi *significant* ketika lembaga harus mengadakan Musyawarah Anggota. Prosesi Musang selalu akan bermasalah karena tahapan musyawarah itu adalah juga meninjau kembali AD dan ART yang notabene adalah membahas nafas SK. Logikanya, kalau mahasiswa sepakat bahwa perimbangan kekuatan eksekutif-legislatif diperlukan ada sebagai manifestasi dari keinginan baik untuk menegakkan eksekutor yang bersih dan berwibawa, maka sidang akan terjadi deadlock. *Rule of game*-nya tidak mungkin untuk mengadakan sidang yang demokratis.

Kenyataan yang tidak menguntungkan bagi demokrasi mahasiswa ini masih dikacaukan dengan hadirnya UKM Universitas yang dalam frame SK 0457 sejajar dengan SMPT. Maka timbul pertanyaan apakah UKM ini eksekutif juga? Memang dalam frame tertentu da-

lam kapasitas untuk kegiatan mahasiswa, UKM bisa menjadi *policy maker* dalam menyikapi dan mempengaruhi sistem yang lebih sistem yang lebih luas misalnya kebijaksanaan mengenai lingkungan hidup oleh materi KLH, penebangan hutah secara liar, pemberangusan kebebasan berkreasi dan seterusnya. Tetapi meletakkan UKM sejajar dengan SMPT adalah tindakan yang tidak masuk akal.

Tidak adanya badan kelengkapan yang mengimbangi kekuatan eksekutif akan memberi peluang yang tidak seimbang mengenai kekuatan eksekutor dan pengontrolnya. Belum lagi tidak adanya pembagian fungsi dan peran kelembagaan di tingkat universitas yang inibtentu menghambat optimalisasi kerja dan pelaksanaan kegiatan.

Yang selanjutnya adalah tidak adanya pembedaan yang jelas antara anggota lembaga dan pengurus lembaga. Ini menjelaskan betapa produk ini semakin tidak jelas frame berpikirnya.

Disamping itu adalah adanya beberapa pasal yang justru saling bertentangan seperti kedudukan dan struktur organisasi. Dalam beberapa pasal kelengkapan kelembagaan ini bersifat non struktur-pengesahan dan tanggung jawab, pendanaan sampai pelaksanaan teknis SK mendikbud harus dengan ketentuan yang tersubordinasi oleh kekuasaan rektorat.

Secara substansial produk SK 0457 adalah rekayasa mengebiri organisasi kemahasiswaan dengan meletakkan mahasiswa jauh dari posisi tawar terhadap kekuasaan dan menjadikan mahasiswa terlepas dari realitas sosial disekitarnya.

Mahasiswa dalam massa eksperimentasi SMPT ini telah kehilangan hak-hak politiknya. Mahasiswa tidak diberi kesempatan untuk menyumbangkan ide dan gagasan untuk membesarkan kampus, apalagi untuk mengkritisi dan mengkitik kebijaksanaan yang keluarkan birokrat kampus. Dalam posisi yang lebih jauh mahasiswa tidak diberi kesempatan untuk ikut menerjemahkan makna pembangunan dengan melihat realitas dalam masyarakatnya diluar kampus sehingga bisa menyumbangkan pemikirannya untuk mencerdaskan masyarakat dan berjuang bersama mereka untuk mendapatkan hak-haknya yang dipinggirkan.

Berjuang bersama rakyat mestinya diposisikan secara netral sebagai pembelaan sesama manusia atas dasar kebenaran dan keadilan dan jangan diseret-seret dan dikaitkan dengan ekstrim tertentu.

Sebenarnya konflik-konlik baik konseptual melalui massa aksi maupun konflik gerakan melalui aksi massa selama ini lebih dikarenakan masih tingginya kesenjangan antara si kaya dan si miskin juga kesenjangan yang terlalu dalam antara pemimpin dengan yang dipimpin, kesenjangan antara kekuatan pemerintah dengan kekuatan rakyatnya. Maka dengan atau tanpa mahasiswa yang diposisikan jauh dengan realitas sosialnya sebenarnya akan selalu muncul perlawanan yang tidak akan pernah surut bila syarat keseimbangan itu tidak direalisasikan, tidak hanya dari sektor mahasiswa.

Sekali lagi tentang LEM

Setelah UNS mengalami kekosongan SMPT setelah pada tahun 1993/1994 SMPT menyatakan mundur, mahasiswa UNS melakukan musang lagi dipenghujung tahun 1995 sampai awal 1996. Akhirnya terbentuk LEM, tetapi pihak Rektorat tidak mau mengakui.

Kekosongan lembaga kemahasiswaan sebenarnya hanya akan menjadi repetisi tahunan apabila pihak rektorat tetap bersikukuh dengan itikad melaksanakan *'rule of the game'* yang murni dan konsekwen. Meskipun sebenarnya sikap ini mempunyai dua 'blunder' bagi posisi kewenangan dan sikap Rektorat itu sendiri.

Yang *pertama*, sebenarnya keberadaan organisasi atau lembaga universitas adalah dalam wewenang otonomi rektorat melalui aparatus pureknya. Ini paralel dengan logika bahwa permasalahan organisasional dalam universitas yang bertanggung jawab adalah Rektor bukan pada Menteri. Jadi keluarnya SK dengan paket jadi lembaga kemahasiswaan adalah sungguh mengherankan.

Yang *kedua*, pertanyaan sesuai dengan *rule of the game*, sebenarnya tidak berbasis dengan realitas dan praktek yang sudah terjadi di dalam aktifitas kemahasiswaan selama

ini. Dengan tidak adanya garis struktural kelembagaan dalam SK, praktek struktural seperti UKM Fakultas dan HMJ meminta tanda tangan kepada SMF ketika mau menurunkan dana, secara legal formal SK sebenarnya adalah sudah merupakan penyimpangan.

Dalam sejarahnya, sejak Orde Baru ini lahir, mahasiswa memang baru mengenal DEMA dan SMPT serta beberapa yang lain sebagai penyegaran sekaligus evaluasi produk lama. Alternatif itu antara lain adalah BEM, LSM (Lembaga Sentral Mahasiswa) yang diproklamasikan oleh ITB dilanjutkan UNS yang mengkonsepkan Lembaga Eksekutif Mahasiswa sebagai alternatif terhadap sumpeknya atmosfer kemahasiswaan. Pertanyaan besar apakah beberapa lembaga terakhir yang nyata - nyata tidak mempunyai referensi sejarah itu mampu menunjukkan eksistensinya bagi perbaikan demokrasi dalam prosesi akademis civitas akademika serta mampu menunjukkan keberpihakannya terhadap rakyat ?

Kalau kita membandingkan esensi orientasi program kerja dan perjuangan, agaknya DEMA, LSM maupun LEM mempunyai kesamaan visi dan orientasi. ketiga organisasi ini memperjuangkan hak - hak mahasiswa dan tanggap dengan masalah - masalah kerakyatan dan kebangsaan.

Menengok hasil kerja UNS, sebenarnyalah tidak boleh dilupakan proses pengkonsepan, penggodokan dan dialektika selama musyawarah bersama.

Secara urut moment sebenarnya proses lahirnya LEM ini sudah sangat ideal. Diawali dengan adanya diskusi bersama secara maraton atas nama kelembagaan fakultas yang mencoba menggagas format organisasi mahasiswa yang ideal, Di tengah sibuknya pengkonsepan bersama ini bersamaan pula telah dilakukan Loka Karya Nasional di UNDIP yang dihadiri skitar 54 Universitas dan Institut se indonesia termasuk UNS. Hasil Loka Karya itu sendiri secara substansial menolak adanya SK. 0457.

Jadi secara intelektual sebenarnya mahasiswa UNS sudah sangat konsisten, konseptual dan ilmiah. Mereka ini berangkat ke musyawarah Anggota bersama lembaga kemahasiswaan UNS dengan bekal hasil rumusan bersama secara intern maupun ekstern.

Dari sisi yang lainpun mahasiswa UNS sebenarnya juga sangat kuat ketika mereka berangkat musyawarah dengan didukung oleh empat perguruan tinggi se-jawa yakni ITB (LSM), UNDIP (KP DEMA UNDIP), UGM (DEMA UGM) dan UNAIR (KP DEMA UNAIR) yang tergabung bersama UNS ke dalam Badan Koordinasi Organisasi Mahasiswa Independen /BAKOMI sebagai koordinator persiapan organisasi kemahasiswaan alternatif dan independen se-Jawa.

Masih dalam frame mencari konsep, mahasiswa UNS pun lalu melanjutkan berbagai pertemuan. Satu hal disayangkan pihak rektorat tidak mau duduk bersama untuk ikut mengkonsepkan dan sekaligus memperjuangkannya secara bersama - sama. Ini lalu menjadi kontradiksi di akhir bahasan ini ketika forum pencetusan organisasi alternatif ini dibiayai oleh rektorat dengan dana kemahasiswaan tetapi pada akhirnya pihak rektorat secara sepihak menolak dengan alasan SK.

Akhirnya perjalanan panjang dalam mencari konsep organisasi mahasiswa yang ideal itupun mencapai puncaknya dengan adanya musyawarah anggota lembaga kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret dari akhir Desember 1995 sampai awal Januari 1996. Musyawarah ini begitu serius dan sungguh - sungguh dilaksanakan. Perdebatan yang alot dan seru terjadi. Sebagai akibatnya musyawarah yang sedianya dilaksanakan 2-3 hari berkembang menjadi satu minggu. Sungguh - sungguh dramatis dan momental ketika akhirnya pendanaanpun habis dan 5 UKM menyatakan *walk out*. Akhirnya untuk mengatasi pendanaan diambilkan dari dana - dana kas lembaga tingkat Fakultas. Ketika dana dari beberapa senat tidak bisa lagi diberikan, musyawarahpun dilanjutkan dengan patungan keuangan pribadi peserta musyawarah yang masih konsisten. Sedangkan UKM yang *walk out* tidak dipermasalahkan karena sebenarnya tidak mempertentangkan masalah konsep yang dihasilkan musyawarah, tetapi lebih bertitik tekan pada

ketakutan tidak akan mendapatkan dana selama masa memperjuangkan legalitas keberadaan MPM; LEM dan DPM. Jadi secara konseptual UKM ini menyetujui adanya reformasi kelembagaan ini tetapi tidak bisa menerima kemungkinan terjadinya kenyataan, selama tahap perjuangan tidak mendapat dana.

Setelah dengan terpaksa tidak bisa memaksakan diri atau menunda waktu, musyawarah akhir tahun itupun sampai melewati batas tahun 1995. Hasilnya, disepakati adanya tiga lembaga di tingkatan universitas yakni MPM, DPM dan LEM. MPM adalah Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, sebagai aspirasi tertinggi mahasiswa UNS. Yang duduk dalam MPM ini adalah DPM universitas hasil pemilu, utusan DPMF, utusan LEMF, utusan dari HMJ, utusan dari UKM universitas serta dari pengangkatan. Pengangkatan ini dilakukan pada fakultas yang tidak mempunyai HMJ.

Sedangkan DPM Universitas adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa, Lembaga Legeslatif yang berfungsi sebagai pengawas kebijaksanaan atau pelaksanaan program kerja lembaga eksekutif. Keberadaan lembaga legislatif ini adalah untuk menyeimbangkan konsep operasional dan pengawasan kebijaksanaan yang dibuat oleh mahasiswa.

Sebagai kelengkapan lembaga yang paling penting adalah LEM UNS. Yaitu Lembaga Eksekutif Mahasiswa UNS yang berfungsi sebagai *policy maker* pelaksana kebijaksanaan mahasiswa. LEM ini adalah mandataris MPM, karenanya pertanggungjawaban di akhir jabatan harus diberikan kepada majelis.

Disamping kelembagaan di tingkat universitas disepakati pula perubahan di tingkat fakultas menyesuaikan lembaga di universitas. Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) berganti nama menjadi Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF), sedangkan Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) berubah menjadi Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas (LEMF). Sedangkan HMJ tetap. Secara fungsi sebenarnya kelembagaan fakultas tidak begitu berubah karena sudah ada fungsi eksekutif dan legislatif. Namun diharapkan dengan perubahan nama itu peran dalam perjuangan yang memberikan posisi tawar menawar dengan birokrat kampus semakin nyata dan kuat.

Dari Januari kembali ke Januari, dari 1996 sekarang usia LEM sudah satu tahun. Yang telah dilakukan; sekali mengadakan aksi deklarasi, beberapa kali berpartipasi aksi, beberapa kali melakukan aksi selebaran dan pamflet, serta mengadakan Seminar Hari Pers Nasional bersama Media Indonesia dengan bekerja sama dengan Majalah Kalpadruma Fakultas Sastra UNS, dengan salah satu pembicara Wimar Witular serta halal bi halal organisasi kemahasiswaan se-UNS dengan bekerjasama kepanitiaan dengan SEMA FISIPOL. Semuanya itu dengan biaya mandiri dari hasil usaha kawan-kawan.

Bagaimana akar bawah di fakultas? Sebenarnya apabila dilihat dari peserta yang menyepakati hasil-hasil musang, 8 fakultas minus Fakultas Teknik menyepakati hasil-hasil musang. Tetapi ternyata yang berhasil mengganti nama di tingkat fakultas hanya FISIPOL dengan Fakultas Sastra. Itu pun dengan diikuti kembalinya DPMF FISIPOL yang kembali menjadi BPM karena tekanan dari Dekanat.

Apakah ini adalah sama dengan kembali ke titik nol perjuangan? Tidak! Waktu telah mencatat mahasiswa UNS pernah 'keras' dengan idealisme, meski dengan besar hati harus diakui masih lebih banyak mahasiswa yang jatuh ke sikap pragmatis.

Catatan besar dan garis bawah tebal sekali lagi. Apa yang diperjuangkan peserta musang 1995/1996 adalah permasalahan ide yang tidak bisa dibungkam dengan tidak maunya rektor melegitimasi kehadiran LEM di UNS. Apabila lahir sebuah ide tentang idealitas sebenarnya hanya akan tumbang dengan dialektika ide itu sendiri. Maka seharusnya Rektor tidak perlu apriori dengan ide berdirinya LEM, karena memang belum pernah mau berdialog dengan anak tiri yang sudah terlanjur lahir ini.

Penulis adalah Ketua LEM UNS, mantan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Sastra UNS.

Ketika Negara Mencemburui Pers

Judul Buku	: ***Ilusi Sebuah Kekuasaan***
Penyunting	: *Heri Akhmadi*
Cetakan	: *1 Januari 1997*
Penerbit	: *Institut Studi Arus Informasi dan Pusat HAM Ubaya*
Jumlah hal	: *126 + vi*

Mitos-mitos banyak memenuhi hubungan antara pers dan kekuasaan. Ada yang mengatakan bahwa pers adalah pilar keempat (the fourth estate) yang ikut menyanggga kehidupan kenegaraan. Mitos yang menyebutkan pers setara kedudukannya karena menyertai yudikatif, legislatif, dan eksekutif yang masing-masing otonom, menjalankan fungsi pengawasan dan keseimbangan (chek and balance). Ada juga yang mangatakan bahwa pers adalah anjing penjaga (watchdog). Tugasnya yaitu mengawasi lingkungan dan mengonggong tiap kali mengendus kesalahan. Metafor ini perlu dipahami dulu. Jadi yang diambil dari anjing yang benar-benar anjing hanyalah kualitasnya sebagai tukang jaga yang punya ketajaman penglihatan, pendengaran, dan naluri akan bahaya lingkungannya.

Ada juga yang menyebut pers sebagai nyamuk hingga wartawan disebut sebagai nyamuk pers. Bahkan ada juga yang melebih-lebihkan kekuatan pers dengan mengatakan bahwa pena lebih berbahaya daripada peluru.

Apakah pers di Indonesia memang berbahaya ? Tak mudah mencari jawabnya. Yang jelas ada banyak orang yang berilusi soal kekuatan pers. Begitu juga sebaliknya. Pers mengilusikan kekuatan pemerintah secara berlebihan. Pengusaha dan pers memiliki imajinasi sendiri-sendiri, baik terhadap dirinya maupun pada pihak lain, secara berlebihan. Yang satu membayangkan yang lain sebagai monster yang mengerikan. Barangkali ini yang membuat posisi pers sangat bergayut pada kekuasaan. Hanya dengan menjentikkan ujung kuku, kekuasaan bisa menghempaskan institusi pers yang dianggap tidak sejalan garis politik mainstream.

Sebenarnya pers hanyalah media yang memungkinkan fakta-fakta suatu lingkungan dapat direplikasi, sehingga orang dari lingkungan yang sama dapat berkonfirmasi, dan orang dari lingkungan yang lain akan berinformasi. Kapan replikasi suatu fakta berfungsi sebagai konfirmasi ataupun informasi, tentunya akan berpulang kepada kepentingan khalayak yang akan mengambilnya (hal.2). Melihat ini maka pers tidaklah semengerikan yang dibayangkan.

Fungsi pengawasan sosial (sosial control) yang bisa dijalankan pers secara eksplisit hanyalah melalui tajuk rencana. Sedang secara implisit muncul dari pilihan fakta-fakta yang dapat dijadikan acuan bagi khalayak untuk dihadapkan dengan standar normatif yang dihayati. Sebab tanpa adanya standar normatif yang dihayati khalayak, suatu fakta tidak akan berfungsi sebagai kritik maupun pengawasan.

Imajinasi tentang fungsi pengawasan oleh pers yang begitu besar, menyebabkan ilusi tentang adanya kekuasaan pers. Akibatnya negara --sebagai institusi pengelola kekuasaan-- menyimpan kecemburuan yang besar terhadap pers. Dalam hubungan benci dan cinta (hate and love) antara kekuasaan dan pers, negaralah yang paling getol memadu cinta posesif terhadap pers yang terkadang bisa menunjang kekuasaannya sekaligus juga menyimpan kebencian obsesif karena pengawasan pers terkadang mengancam keberlangsungan kekuasaannya.

Fungsi pengawasan sosial (sosial control) yang dijalankan pers menjadi sedikit karena munculnya lembaga-lembaga pengatur independensi pers seperti

pengatur independensi pers seperti lembaga SIUUP dan PWI yang nota bene merupakan kepanjangan tangan penguasa sebagai bukti hubungan cinta tersebut. Akibatnya berpikir tentang kebebasan pers menjadi olah raga yang mewah dan sukar.

Kecemburuan negara terhadap pers hingga memojokkan pers dalam posisi yang terpenjara, diungkap secara penuh dalam buku ini. Mulai dari ilmuwan sosial dan politik seperti Daniel Dhakidae, Muslim Abdurrachman, Ramlan Subakti, dan Sutandyo Wignyosubroto yang memberikan perspektif tentang kekuasaan negara di pihak lainnya, sampai para praktisi seperti Anshari Thayib, Aristides Katoppo, Fikri Jufri, Masmimar Mangiang, Sabam Siagian, dan Zaim Uchrowi, yang merupakan penjaga-penjaga pers yang mencoba mencari jalan pragmatis dengan kepercayaan melalui profesionalisme para jurnalis Indonesia. Suatu bacaan yang lebih dari layak untuk dikonsumsi.

***

(Rokhmah Sugiarti Sasindo 94).

IDEOLOGI?

Judul Buku : Konsep Ideologi
Judul Asli : The Concept of Ideology
Pengarang : Jorge Larrain
Editor : Tom Bottomore
Penerjemah : Ryadi Gunawan
Penyunting : Ngatawi al-Zastrow
Penerbit : LKPSM
Cetakan : I, Agustus 1996
Tebal : 307 + xii halaman
p x l : 21 x 15,5 cm

Kita sering mendengar kata-kata ideologi Pancasila, ideologi komunis, ideologi liberalis dan seterusnya. Hal ini bisa kita dengar di bangku SLTP, SMU, bangku kuliah, ruang seminar bahkan pada perbincangan di warung hik atau warung kopi. Yang menjadi pertanyaan menarik, apa to idiologi itu. Bila kita pahami sepintas mungkin ideologi tidak ada bedanya dengan semacam adat istiadat atau budaya atau bahkan semacam peraturan untuk membuat tempe agar enak dan gurih rasanya. Akan tetapi jika kita pahami secara serius mungkin kita malah menjadi tak paham apa itu ideologi. Betapa rumit dan kompleknya, karena berkaitan dengan hidup dan kehidupan manusia di dunia.

Ideologi adalah satu dari sekian banyak konsep yang paling ekuivokal (meragukan) dan elusif (sukar ditangkap), yang terdapat dalam ilmu-ilmu pengetahuan sosial; tidak hanya karena beragamnya pendekatan teoritis yang menunjuk arti dan fungsi yang berbeda-beda, akan tetapi karena ideologi adalah konsep yang sarat dengan konotasi politik. Begitu peliknya masalah ideologi ini, hal ini dikarenakan kurangnya referensi mengenai ideologi, sifat, asal, scope dan hubungan-hubungan konsep ideologi.

Salah satu fenomena inilah yang menyebabkan Jorge Larrain berusaha menyusun buku yang membahas masalah ideologi. Dalam buku aslinya yang berjudul The Concept of Ideology ini Larrain berusaha membahas secara analitis mengenai dasar aliran pemikiran yang berbeda dalam membangun teori-teori ideologi. Dalam buku ini diuraikan bagaimana dan siapa yang ikut andil dalam terbentuknya suatu ideologi mulai dari abad 16 sampai dengan abad 19. Mengapa istilah ideologi ini digunakan secara luas, siapa yang mengawali.

Dalam buku ini juga diuraikan mengenai evolusi dari konsep ideologi yang negatif sampai dengan yang positif yang dilembagakan Lenin dalam teori Marxist. Permulaan makna ganda dari Marx muncul berlawanan antara pendekatan historis (Luka'cs, Gramsi) dan pengertian yang lebih positif dari Engels. Kemudian konsep ideologi psikologisnya Pareto dan Freud. Juga Durkheim dalam tradisi Bacon yang meletakkan dasar konsepsi ideologi positivist.

Bagaimana perkembangan tradisi kaum historis dalam Mannheim dan Goldmann yang memperkenalkan analisis sosial mengenai fenomena kesusastraan dan kultur yang mengunakan konsep Weltanschauung. Bagaimana dengan strukturalisme dengan segala manifestasinya yang dianggap penting; garis antropologi dari Levi-Strauss dan Godelier, pendekatan bahasa struktural dari Barthers dan Greinas, garis semiologi Tel Quel dari transposisi elemen-elemen strukturalis Althensarian ke dalam Marxisme. Kemudian bagaimana pula hubungan antara ideologi dengan ilmu pengetahuan yang mencakup positivisme, historisisme, dan Marxisme.

Semua pertanyaan di atas dibahas tuntas oleh Larrain dalam buku ini. Oleh karena itu buku ini sangat cocok untuk dibaca oleh mahasiswa Sosial Politik serta para peminat dalam bidang Filsafat dan

Bandara Adi Sumarmo Menuju Abad 21

Kota Surakarta sejak dulu dikenal sebagai kota budaya dengan diwakili keberadaannya Kraton Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegara dimana banyak kalangan menyebut sebagai sentra dari budaya Jawa. Dalam perkembangannya , Surakarta yang terkenal dengan sebutan Solo-nya berusaha mempertahankan sebutan itu dengan menggolkan Bandara Adi Sumarmo sebagai bandara internasional. Bagaimana perjuangan tersebut berlangsung ?, Kentingan menulisakannya dalam laporan berikut.

Perkembangan Surakarta boleh dibilang cukup pesat. Selain sebagai kota terbesar kedua di Jawa Tengah, kota ini selalu meraih Adipura di tiap tahunnya.

foto Abel/Anwar

Penduduk tetapnya sendiri memang tidak seberapa. Tahun 1990 hanya tercatat 517.000 jiwa. Namun di siang hari warga yang berkeliaran di Solo dapat mencapai 2,5 juta jiwa. Ini membuktikan bahwa Solo merupakan kota yang potensial untuk berkembang. Apalagi setelah Bandara Adi Sumarmo menjadi bandara internasional -- termasuk sarana akomodasinya dengan munculnya berbagai hotel bertaraf internasional -- tentu perkembangannya semakin pesat.

***

Keberadaan Bandara Adi Sumarmo (BAS) adalah salah satu faktor yang menyebabkan Solo berkembang. Bandara ini oleh pemerintah ditetapkan sebagai bandara internasional. Mengapa Solo yang dipilih dan bukan Yogyakarta yang lebih banyak turis mancanegaranya atau Semarang sebagai ibu kota propinsi ?. Secara geografis, bandara yang berlokasi di kawasan Panasan ini masih memungkinkan untuk dikembangkan karena lahan masih cukup luas. Lain halnya dengan Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta yang lahannya sudah tak memungkinkan lagi untuk dikembangkan karena terhalang sungai. Bandara Ahmad Yani Semarang juga sulit untuk dikembangkan karena arealnya berbatasan de ngan Laut Jawa. Walau demikian untuk memperjuangkan BAS menjadi bandara internasional sudah cukup lama.

Kol PNB Sutardjo foto Anwar

Bukan hal yang mudah untuk menjadi bandara internasional. Banyak sekali faktor yang menentukan terutama potensi daerah, sehingga pembangunan bandara yang menyedot dana besar tidak rugi atau mubazir. Untuk daerah sekitar Jateng, Solo merupakan kota yang potensial dari segi industri maupun pariwisata. Disamping itu, wilayah pengembangan menyangkut pendanaan yang membutuhkan proses yang cukup panjang.

Menurut Kol PNB Sutardjo W, Kepala Cabang PT Persero Angkasa Pura I Bandara Adi Sumarmo, ide menjadikan BAS sebagai bandara internasional sudah lama tapi baru terealisasi tahun ini. ''Rencana menjadikan BAS sebagai bandara internasional sudah ada sejak 1989. Pelaksanaan secara fisik langsung dari luar negeri yang diawali dengan menyarter turis dari Singapura dan dari Eropa'', ungkapnya saat ditemui Anwar dan Abel dari *Kentingan*.

Sutardjo menambahkan, sebenarnya rencana pengembangan Adi Sumarmo telah dilakukan sejak tahun 1986, dengan diadakan penelitian dari Jepang oleh konsultan Jaika. Dari beberapa bandara di Jateng dan DIY setelah dipelajari hasil studinya, maka Bandara Adi Sumarmo ditetapkan untuk dikembangkan menjadi bandara yang lebih besar. Prosesnya tidak bisa cepat, dilaksanakan secara bertahap, sejak dikembangkan tahun 1986, secara fisik pembangunan baru dimulai tahun 1992. Sedang masterplannya berlaku hingga tahun 2015.

Persiapan yang dilakukan diantaranya dengan memperpanjang landasan pacu 1950 x 45 m menjadi 2600 x 45 m. Juga peralatan-peralatan navigasi ditingkatkan sehingga bisa untuk pendaratan pesawat berbadan lebar, seperti Boeing 747 dan MD 11. Sebelum menjadi bandara internasional, rata-rata pertumbuhan untuk pergerakan pesawat udara per tahun sebesar 13%, untuk penumpang sebesar 12%, dan kargo sebanyak 38%.

Selain itu, hal di atas ditunjang dengan fasilitas pendukung seperti *snack bar, cake shop, batiks, book shop, travel agency, bank money changer, hotel reservation, advertising, taxi,* dan *cargo ground handling service*.

Proses Pengembangan Bandara repro Angkasa Pura I

Penggunaan bandara saat ini sudah terjadwal tiga kali dalam seminggu, yaitu hari Senin, Rabu dan Sabtu dengan rute Solo-Singapura. Pesawat yang digunakan adalah Fokker 70 dan Boeing 737 bila penumpangnya banyak.

Drs Soetrisno foto Afi

Memang ada harapan tersendiri dari pembangunan BAS seperti penjelasan Sutardjo.''Dampak itu cukup luas (secara nasional) tidak hanya interdepartemen dalam Departemen Perhubungan saja. Satu hal lagi, Jateng terbuka untuk orang luar negeri. Orang ke luar negeri atau datang ke Jateng dapat secara langsung. Kemajuan daerah akan lebih cepat dengan ekspor tidak perlu lewat Jakarta atau Surabaya lagi untuk daerah sekitar sini ''.

Dengan dibukanya BAS sebagai bandara internasional, baik langsung maupun tidak langsung akan berdampak terhadap pola hidup masyarakat Surakarta. Ini dimungkinkan dengan semakin banyaknya turis asing yang berkunjung di kota yang terkenal dengan Pasar Klewernya ini. Dari data yang ada, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung di Solo dalam semester pertama tahun 1996 berjumlah 11.978. Paling banyak berasal dari Jepang sejumlah 2.732, disusul Belanda 1.997 wisman, dan ketiga dari Prancis 1.403 wisman.

***

Kesiapan Diparta

Lalu bagaimana persiapan Dinas Pariwisata (Diparta) dalam meng antisipasi kedatangan wisman ?. Menurut Drs Soetrisno, Kepala Dinas Pariwisata Solo, pihaknya telah menyiapkan beberapa langkah jitu. Misalnya dengan meningkatkan jumlah dan mutu obyek dan daya tarik wisata terutama yang telah ada di Surakarta termasuk penggalian permainan rakyat yang telah punah, ini dilakukan diantaranya melalui *Solo Great Sale* (Obral Gedhe Solo) yang akan rutin digelar tiap tahun.

Selain itu melengkapi sarana dan prasarana pariwisata, meningkatkan SDM pelaku-pelaku pariwisata, dan peningkatan sadar wisata bagi masyarakat dan pejabat. Masalah yang penting juga membuat oleh-oleh atau suvenir khas Surakarta yang hingga kini belum ada.

Sadar wisata yang ditujukan pada masyarakat penekanannya adalah pada perlakuan yang diberikan pada wisatawan karena perlakuan yang tidak baik menjadikan persepsi turis yang tidak baik pula. Dan hal ini tentu saja sangat merugikan. Misalnya saja tukang becak atau sopir, kadang memasang tarif tinggi bagi wisatawan. Hal ini akan menimbulkan persepsi bahwa setiap wisatawan itu bisa ditariki uang dengan seenak hati mereka. Tentu saja hal ini merugikan.

Hal senada juga diungkapkan A. Walid dari DPRD II. Menurut dia, masyarakat belum dapat bersikap sebagai tuan rumah yang baik bagi para tamu yang sesungguhnya tamu itu datang membawa rejeki. ''Kadang-kadang wisman yang keluar masuk kampung masih dipandang sebagai hal yang aneh'', ujar Walid.

Sadar wisata yang ditujukan pada pejabat adalah peningkatan visi atau pemahaman mengenai pariwisata. Ini disebabkan karena banyak pejabat yang menafsirkan pariwisata berkaitan dengan 'petualangan seks'.

banyak pejabat
yang menafsirkan pariwisata
berkaitan dengan
'petualangan seks'

Dengan kesiapan yang dilakukan Diparta ini, jelas diharapkan jumlah wisman yang berkunjung di Solo akan meningkat. Seiring dengan itu akan menimbulkan dampak positif dan tentu saja, dampak negatif yang sulit dicegah.

Efek Pariwisata

Manfaat pariwisata sendiri bersifat *multiplier effect*. Jadi memiliki efek ganda diantaranya membuka lapangan kerja, membuka kesempatan berusaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan negara dan daerah, meningkatkan kecerdasan, dan melestarikan kebudayaan.

Namun, disamping manfaat di atas keberadaan pariwisata tak terlepas pula dari efek negatifnya, misalnya harga-harga menjadi mahal -- baik itu makanan maupun suvenir -- yang selisihnya dengan daerah non pariwisata sangat jauh berbeda, berubahnya perilaku generasi muda, timbulnya pergaulan bebas, dan munculnya budaya meniru. Dampak jelek lainnya adalah pengaruh terhadap lingkungan, contohnya adanya sampah yang semakin banyak, kondisi alam yang berubah dan sebagainya.

Sebagai warga Solo, persiapan yang perlu dikembangkan guna mendukung dan menyambut wisman hal yang penting adalah mengenai visi yang harus ditingkatkan terutama segi bahasa internasional. Karena selama ini penggunaan bahasa internasional di kalangan pelaku-pelaku wisata dan masyarakat umum masih jauh dari harapan.

Hal yang penting pula adalah pengaruh asing yang masuk, terutama pengaruh negatif harus dieliminir. Seperti penyebaran penyakit AIDS, penyebaran ekstasi, peningkatan kejahatan terorganisasi, dan perubahan pola hidup masyarakat. Karena sebagai tempat tujuan wisata tentu Solo akan menjual segala yang ada di dalamnya, dan disesuaikan dengan permintaan wisman.

Kita ambil contoh perubahan yang terjadi dalam pertunjukan Wayang Orang Sriwedari yang telah disesuaikan dengan budaya penonton asing yang tidak tahan melihat tontonan dalam waktu lama, dengan mempersingkat waktu.

Kesiapan dari masyarakat memang tak lepas dari peran pemerintah dalam mengelola aset yang ada, terutama dalam menghidupkan kesenian tradisional dengan kesungguhan hati. Dengan peran ini diharapkan apresiasi masyarakat terhadap budaya daerah semakin tinggi dan meningkatnya rasa memiliki terhadap apa yang telah diwarisi oleh leluhur kita oleh masyarakat. Sehingga kebudayaan daerah akan menjadi kebanggaan, dimana akhirnya akan dapat mengurangi penetrasi pengaruh asing yang kurang baik yang pasti masuk bersamaan era globalilasi. Semoga.

***

Rustamaji
dari Ali, Indah, Abel, Anwar

PERMOHONAN MAAF

Sehubungan dengan adanya tindakan penyalahgunaan jabatan Pengurus KOPMA UNS periode 1995-1997, yang menyebabkan kerugian secara **materiil maupun moril,** maka kami selaku Pengurus KOPMA UNS periode 1995-1997 menyatakan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh anggota KOPMA UNS, atas kekhilafan kami tersebut.

Besar harapan kami atas pemberian maaf dari seluruh anggota KOPMA UNS.

Surakarta, 23 Mei 1997

ttd
Pengurus Demisioner
KOPMA UNS periode 1995-1997

ADAKAH KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

Oleh : Dr Yusril Ihza Mahendra

Jika ditelaah secara seksama ketentuan-ketentuan maupun penjelasan-penjelasan di dalam Undang-undang Dasar 1945, jelaslah kiranya bahwa secara normatif konstitusional, Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara hukum.

Salah satu ciri negara hukum ialah diakuinya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Secara normatif UUD 1945 juga mengakui hal ini. Kekuasaan kehakiman, demikian dikatakan di dalam penjelasan pasal 24 UUD 1945, ialah kekuasaan yang merdeka. Artinya ''terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah''. Berhubung dengan diakuinya kemerdekaan kekuasaan kehakiman ini, maka penjelasan UUD 1945 menambahkan rumusannya dengan menegaskan bahwa undang-undang harus memberikan 'jaminan', yakni jaminan tentang kemerdekaan para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 mempertegas lagi kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Bahkan dalam ketetapan ini dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman itu bukan saja merdeka dari pengaruh kekuasaan Pemerintah, tetapi juga dari ''pengaruh-pengaruh lainnya''.

Jadi, meskipun secara teoritis Negara Republik Indonesia tidak mengenal asas pemisahan kekuasaan antara badan legislatif dan eksekutif, karena tiap-tiap undang-undang memerlukan persetujuan Presiden dan DPR, namun badan judikatif tetaplah terpisah dengan badan legislatif dan judikatif. Eksistensinya, menurut **Omar Seno Adjie**, terlihat dalam rumusan pasal 1 Undang-undang nomor 14/1970, yang dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

***

Titik Lemah

Sayangnya rumusan-rumusan UUD 1945 yang berisi jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu terlampau singkat. Hal ini memang menjadi salah satu ciri perumusan pasal-pasal UUD 1945, yang disatu pihak merupakan kekuatannya, namun dipihak lain mungkin pula menjadi kelemahannya. Sebagaimana ketentuan-ketentuan di bidang lain, dibidang peradilanpun, UUD 1945 menyerahkan pengaturan lebih lanjutnya kepada undang-undang. Sedangkan undang-undang, dilihat dari sudut politik, adalah produk dari pertarungan kekuatan-kekuatan politik yang bersaing, baik di dalam tubuh pemerintah, DPR maupun kekuatan-kekuatan politik di luarnya yang berperan sebagai kelompok kepentingan dan penekan. Dengan demikian, produk perundang-undangan pada umumnya akan mencerminkan kehendak dari kekuatan politik yang paling dominan, meskipun di dalamnya mengandung rumusan yang bersifat kompromis.

Dalam prakteknya penyelenggaraan negara sejak Dekrit Presiden, kekuatan politik yang paling dominan justru ada pada pemerintah.

Pada masa Pemerintahan Kabinet Presidensial Soekarno, kemerdekaan kekuasaan kehakiman bahkan sirna sama sekali. Intervensi Presiden terhadap kekuasaan kehakiman bahkan dihalalkan oleh berbagai ketentuan di dalam UU No 19/1964. Dalam pasal 19 UU ini dikatakan dengan tegas ''demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat mendesak, Presiden dapat turun atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan''.

Sirnanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman juga terlihat dalam UU NO 13/1965. Yang mewajibkan para hakim mengikuti haluan politik Pemerintah, Manipol Usdek dan pedoman-pedoman pelaksanaannya.

Pada masa Orde Baru yang ingin melaksnakan Pancasila dan

sekuen". Usaha pembenahan badan-badan peradilan baru berhasil tahun 1970 dengan disahkannya UU No 14/1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam UU ini dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum RI.

Selanjutnya penegasan tentang kemerdekaan kekuasaan kehakiman dikemukakan juga di dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur badan-badan peradilan, yakni UU Nomor 15/1985 Tentang MA, UU Nomor 2/1986 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 5/1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama.

***

Belum Menggembirakan

Namun kesan yang menggembirakan ternyata tidaklah seluruhnya menggemberakan. Sebab, tetap terdapat celah-celah yang memberikan peluang kepada Pemerintah untuk sedikit banyaknya mempengaruhi badan-badan peradilan, baik melalui prosedur pengangkatan dan penentuan jabatan serta kedudukan para hakim, maupun segi-segi administrasinya.

Kedudukan para hakim tingkat pertama dan tingkat banding sebagai pegawai negeri sipil yang berinduk kepada Departemen kehakiman, Departemen Agama dan Departemen Hankam/Markas Besar ABRI, telah sering dibicarakan sebagai salah satu faktor yang dapat mengurangi kemerdekaan para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sebagai bagian dari birokrasi pemerintah, para hakim terikat dengan sumpah Prasetya KORPRI dan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Padahal tidak sedikit perkara yang diajukan adalah perkara antara rakyat melawan aparatur pemerintah.

Sedangkan hakim agung ditegaskan kedudukannya sebagai pejabat negara. Mereka bukanlah pegawai negeri sipil, tetapi kedudukannya sama dengan para menteri, duta besar. Namun patut pula disadari bahwa prioritas utama rekrutmen hakim agung adalah hakim kerier yang telah bertahun-tahun memegang jabatan hakim tinggi dan dinilai berprestasi baik.

Menurut UU No 14/1985, proses rekrutmen hakim agung dilakukan oleh DPR setelah mendengar saran dan pendapat Pemerintah --dalam hal ini menteri-menteri yang secara administratif membawahi jenis-jenis peradilan tertentu-- dan saran serta pendapat Mahkamah Agung. Dalam proses rekrutmen ini, DPR tidak melakukan suatu penelitian yang mendalam terhadap nama-nama calon. Dalam prakteknya selama Orde Baru, pada umumnya diterima saja oleh DPR, dan kemudian diusulkan kepada Presiden selaku Kepala Negara untuk diangkat.

Benarkah Presiden yang mengangkat para hakim agung itu adalah murni sebagai seorang Kepala Negara? Pertanyaan ini memang *krusial* sekali, mengingat di dalam sistem pemerintahan Presidensial, jabatan Presiden selaku kepala pemerintahan dan Kepala Negara berada pada satu orang yang sama. Secara teoritis, jabatan Kepala Negara adalah jabatan simbolik, seremonial dan protokoler belaka. Kepala Negara lazimnya tidak memikul tanggungjawab politik secara langsung.

Kemerdekaan para hakim agung dalam menjalankan tugas dan kewenangan juga terhambat dengan ketentuan pasal 19 UU Nomor 14/1970. Dalam pasal ini dikatakan bahwa para hakim agung, termasuk yang dilantik menduduki posisi unsur pimpinan MA, wajib mengucapkan sumpah atau janji setia bahwa mereka akan setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan "segala undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".

Sumpah setia kepada Pancasila dan UUD 1945 tentu tidak menjadi masalah, bahkan sudah semestinya. Tetapi sumpah dan janji setia kepada undang-undang, dan lebih-lebih kepada "peraturan-peraturan lain yang berlaku" dapat menimbulkan masalah besar, bukan saja dalam kaitannya dengan hak uji materil MA, tetapi juga dalam memutus perkara di tigkat kasasi dan peninjauan kembali.

***

Penutup

Uraian singkat ini menunjukan kepada kita bahwa secara normatif pada tingkat peraturan perundang-undangan untuk memerinci ketentuan pasal 24 dan 25 UUD 1945 tentang kemerdekaan kekuasaan kehakiman, masih belum memuaskan. Keadaannya secara normatif tentu lebih baik jika dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat pada masa presiden Soekarno. Lemahnya kemerdekaan badan-badan peradilan itu akan lebih terasa jika ditelaah secara empiris dengan menunjukan adanya sejumlah bukti sebagaimana sering dikemukakan dalam pemberitaan media massa.

Adanya campur tangan dari kekuatan-kekuatan *ekstrajudisial* dalam wujud kolusi antara pihak-pihak bekepentingan dengan oknum-oknum hakim, lebih memperburuk citra badan-badan peradilan kita.

***

Tulisan ini pernah disampaikan dalam Diskusi Panel Nasional di Hotel Sahid Raya, Nopember 1996

Mudrick M Sangidoe

MENEGAKKAN PRINSIP MELAWAN ARUS

Bagi warga Solo siapa *sih* yang tidak kenal dengan tokoh yang satu ini. Bahkan namanya telah merebak hingga seantero nusantara khususnya mereka yang berkutat di dunia politik. Orang-nya tegas, tenang namun begitu familiar, itulah Mudrick Setiawan M Sangidoe ketua DPC PPP Solo. Beberapa manuvernya dapat menggemparkan Nusantara, mulai dari boikot kampanye sampai pengumpulan dana atlet. Dan satu-satunya ketua DPC dari OPP yang enggan duduk di kursi DPRD II. Untuk mengetahui lebih dekat sosok yang satu ini Kentingan menurunkan dalam tulisan kecil.

Kenapa tokoh kita ini begitu melejit namanya, apalagi di bulan-bulan yang cukup panas menjelang pemilu lalu. Ini terkait dengan watak dan jiwa yang dimiliki sejak muda.

Saya mau menjadi ketua dengan catatan harus merubah keadaan dan sekaligus ingin menjadi PPP Solo sebagai lokomotif PPP

Mudrick, putra nomor delapan pengusaha batik Malkan Sangidoe, memang terkenal berani dan mempunyai prinsip yang tegas. Sejak SLTA dia sudah terjun dalam berbagai organisasi, ketika di Fakultas Ekonomi UGM tahun 1966 aktif dalam berbagai aksi baik di Yogyakarta maupun Jakarta yang tergabung dalam **KAMI** (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia).

Karena begitu aktif dalam berbagai kegiatan menjadikan Mudrik kurang memperhatikan perkuliahan. Dampaknya sudah dapat ditebak, seperti beberapa aktivis lain. Nilai perkuliahan turun drastis. Bahkan pernah dalam suatu ujian ia hanya lulus dua mata kuliah saja. "Lho wong ujian kok yang lulus cuma Bahasa Inggris dan Pengantar Ilmu Ekonomi saja. Eh malah *yang-yangan* (pacaran, Red) dapat jodoh," kelakarnya. Di Fakultas Ekonomi ia hanya bertahan tiga tahun saja 1965-1969. Karena kurang sreg di FE, selanjutnya Mudrick pindah ke Fakultas Psikologi. Di sini pun ia tidak bertahan lama, lantaran sudah punya tanggungjawab mengurusi anak orang lain.

Karier politiknya dimulai tahun 1966 ketika bergabung pada Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Tahun 70-an masuk Parmusi, dalam Pemilu pertama Orba tahun 1973. Tahun 1977 menjadi ketua Bintang Belia (remaja PPP) kemudian menjabat ketua Pembina Generasi Muda Persatuan. Selama lima tahun menjabat pembantu Korcam Serengan dan lima tahun lagi menjabat korcam Serengan. Mulai tahun 1977 hingga 1992 bertugas sebagai pengerah massa sekaligus komandan satgas dari pemilu-pemilu. Ia mengaku belajar politik pada Karmani (tahun 71) Irham dan Husni Tamrin tokoh 66 diangap sebagai gurunya pula termasuk Buya (Ismail Hasan Metareum).

Kalau saya jadi anggota dewan yaaa ...praktis wakil ketua dewan. Kalau mau, terus dibikinkan rumah, kasih mobil, bensin tetek bengek kasih istri nomor dua kan lama-lama pekewuh

Kenapa PPP yang dipilihnya dalam dunia politik, menurut Mudrick menjawab pertanyaan Kentingan, karena memang secara pribadi sudah tumbuh rasa senang dengan partai berlambang bintang tersebut. Apalagi didukung orang tua yang aktif di Muhammadiyah, Ibu aktivis Masyumi dan ayahnya mantan tentara dengan pangkat terakhir Mayor.

Sejak memimpin DPC PPP Surakarta mulai tahun 1992, Mudrick menerapkan disiplin yang cukup ketat terhadap anggota. Sebagai contoh, satgas PPP harus rapi dan tidak boleh merokok. Konsistennya terhadap perjuangan partai sangat dijunjung. Bahkan ketika hendak dilantik menjadi ketua DPC PPP dia berjanji tidak akan duduk di dewan (DPRD II).

Ucapan tersebut telah dibuktikannya, dengan tidak duduk dalam DPRD II Surakarta ketika itu dan untuk periode berikutnya. Padahal ia menjabat ketua DPC PPP. "Saya ingin menepis anggapan masyarakat bahwa orang berjuang dipartai hanya mencari kedudukan, akan saya buktikan betul. Jadi ketika saya diangkat saya berjanji tidak akan duduk di anggota dewan, walaupun banyak juga yang tidak percaya, dan mengatakan itu mung omonge Mudrik, *mung etok-etoke*, tapi kan saya buktikan betul".

***

Tegakkan fungsi partai

Menurut Mudrick keadaan tersebut agar terjadi managemen yang bagus, "Jadi kalau difraksi berjuang, saya di luar bisa mengontrol. Kalau saya jadi anggota dewan Yaaa ...praktis wakil ketua dewan. Kalau mau, terus

dibikinkan rumah, kasih mobil, bensin tetek bengek kasih istri

Mudrick : *Harus ada reformasi* foto Arif G

nomor dua kan lama-lama pekewuh hahahaaaa. Tapi intinya saya menunjukan pada masyarakat supaya terjadi managemen yang lebih bagus jadi saya *negor* gampang", ujarAyasan khusus yang lain, menurut pandangan tokoh yang hoby tennis dan menembak ini, hampir seluruh ketua DPC di Indonesia sejak tahun 71 hingga 95 bukan hanya di kodya Solo, kehidupan PPP koyo bebek. "Saya mau menjadi ketua dengan catatan harus merubah keadaan dan sekaligus ingin menjadi PPP Solo sebagai Lokomotif untuk PPP. Memang pertama saya ditentang keras oleh pihak wilayah tapi akhirnya mereka mendukung apa yang kami lakukan bukan hanya menyangkut per-kembangan PPP di Solo tetapi secara keseluruhan", ujarnya dengan penuh semangat.

Ditambahkan, fungsi partai seharusnya sebagai alat pengontrol terhadap eksekutif sebagai pengawas pembangunan, itulah yang ditekankan Mudrick M Sangidoe. Bukan anggota dewan yang jumlahnya banyak, tapi kalau tidak berfungsi ya tidak ada manfaatnyaHarapan terhadap PPP memang cukup besar untuk dijadikan partai perjuangan menegakkan keadilan. Jadi partai politik berperan secara benar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dalam pelaksanaan kegiatan bernegara terdapat kekeliruan ya harus dibetulkan.

Bahkan menurut dia seorang yang duduk di dewan seharusnya punya basis ekonomi yang cukup. Sehingga dalam mengurusi rakyat lebih serius tanpa pamrih. "Kadang-kadang memalukan misalnya, di dalam KTP di tulis pekerjaan anggota dewan, anggota dewan itu jabatan bukan pekerjaan", tegas tokoh yang juga sebagai pengusaha batik dan pencinta pencinta barang-barang antik sekaligus mengelola hotel.

Apa yang diomongkan Mudrick memang dibuktikannya. Beberapa langkah yang ditempuh dalam membawa PPP Surakarta, lebih banyak berpegang pada garis organisasi dan kepentingan umum. Walaupun banyak kalangan menganggap langkahnya kontroversial dan hanya mencari muka saja serta terkesan setengah-setengah.

Anggapan itu dengan tegas dibantah. "Kalau dianggap setengah-setengah jelas itu tidak benar, misal waktu kita mengadakan debat caleg itu sampai tuntas, menentang pembangunan rumah dewan juga sampai kalah dalam voting,"paparnya.

Memang gebrakannya ada yang hanya menunjukan pada masyarakat saja, karena bagaimanapun belum tentu berhasil apa yang diusahakn tersebut seperti tuntutan terhadap walikota Solo ke pengadilan mengenai putihisasi.

"Jika dalam pelaksanaan kegiatan bernegara terdapat ***kekeliruan*** *ya harus dibetulkan"..*

"Adanya tuntutan yang dilakukan DPC PPP Solo terhadap walikota tentang putihisasi di pengadilan bukan untuk mencari menang tapi untuk menunjukan bahwa sesungguhnya anggota masyarakat tidak

bisa diperlakukan secara sewenang-wenang, melawan ketidakadilan, melawan arogansi kekuasaan, ini yang saya tekankan.Dan saya yakin gebrakan yang saya lakukan ini menjadi perhatian dan dirasakan masyarakat".

*musuh anda bukan PDI atau Golkar dan bukan pemerintah tapi **para pejabat** yang sewenang-wenang dan melawan ketidak adilan termasuk arogansi kekuasaan*

"Bahkan saya tekankan pada warga saya bahwa musuh anda bukan PDI atau Golkar dan bukan pemerintah tapi para pejabat yang sewenang-wenang dan melawan ketidak adilan termasuk arogansi kekuasaan".

Selain itu gebrakan yang mencuat hingga ke forum nasional adalah boikot kampanye serta pengumpulan dana bagi atlit PON Jateng. Sepak terjangnya memang cukup mencengangkan bagi berbagai pihak.

Bahkan ketika pemerintah mengeluarkan larangan untuk kampanye dengan arak-arakan, Mudrik jauh hari sebelum kampanye dimulai telah melakukan kampanye keliling kota. Hal tersebut dilakukan bertepatan pada acara-acara PPP seperti, Harlah dan lainnya.

"Lho kalau Golkar dan PPP sama (sama-sama OPP) kenapa PPP dilarang, dan yang menolak kampanye itu tidak hanya DPC Solo tapi se-Surakarta. Orang waras untuk *nglakoni* peraturan itu begitu berat, karena saya yang langsung terjun ke lapangan". Papar Mudrick. Bahkan menurutnya pihak keamananpun secara tersirat membolehkan, diadakan pawai untuk daerah Surakarta.

Memang berat, tugas yang dimbannya sebagai ketua DPC. Walau demikian hubungan dengan keluarga cukup hangat dan harmonis. Anggota keluarga maklum dengan kesibukannya. Bahkan perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya cukup baik, dua diantara tiga anaknya telah menjadi sarjana. Sedang anak yang terakhir, Diyani Kartini sekarang kuliah di kedokteran UNS.

Hubungan dengan masyarakat juga begitu mesra. Dengan kesibukannya bergelut di dunia politik Pria yang kelahiran 31 Oktober 1943 lalu, mempunyai hobby mencari teman. Kedengarannya memang unik, tapi hal itu merupakan luapan hati yang paling dalam. Karena dengan semakin banyak teman maka semakin banyak 'saudara'.

Kegiatan yang paling sering dilakukan untuk menambah 'saudara' diantaranya memancing di waduk atau sungai-sungai besar. Dan yang paling mengasikkan menurutnya selain memancing ialah berburu di hutan-hutan, bisa berburu babi hutan atau burung. Guna menjaga kebugaran tubuhnya ia selalu menyempatkan berolah raga, terutama tenis. Bahkan ia diberi kepercayaan sebagai penasehat persatuan tenis Jati Group.

Mengenai harapan pada perolehan suara pada pemilu 1997 ini, Mudrick tidak banyak mentargetkan. "Jika pada perolehan suara kali nanti PPP tetap memperoleh 6 kursi di DPRD, maka saya punya nadar untuk cukur gundul". Dan harapan tersebut kini terwujud dengan perolehan 150 persen suara, menjadi 15 dari 6. Untuk mensyukuri hasil yang telah dicapai maka pria yang berpostur tubuh atletis dan anggota Perbakin, pun menggunduli rambutnya *plontos*.

Harus ada reformasi di Indonesia, demokrasi harus betul-betul tegak. keadailan harus ditegakkan.

Sekarang tinggal menunggu obsesi terakhirnya yang belum terlaksana, yaitu adanya reformasi di Indonesia, demokrasi harus betul-betul tegak. keadailan harus ditegakkan. Mudah-mudahan harapan dari sosok yang berani tampil melawan arus, menyuarakan hati nurani rakyat dapat terpenuhi. Tentunya juga merupakan obsesi kita bersama.

***

Ali dan TR

Tanpa mereka kampus ini bagaimana jadinya foto

KEPUASAN DI TERIK MATAHARI

Teriknya sinar matahari tidak menjadikan semua orang bermalas-malasan. Justru dibalik hangatnya sinar itu membawa secercah kepuasan bagi kehidupan lain, termasuk bagi Suparmi (50), tukang sapu di kawasan UNS sebelah timur.

Ibu dari 6 orang anak dan nenek dari 3 orang cucu ini bekerja sebagai tukang sapu sejak tahun 1993, tepatnya empat tahun yang lalu, melalui CV. Bintang Mas Yogyakarta.

Pekerjaan ini cukup berat, ditambah dengan jam kerja yang padat, namun upah perharinya masih jauh dibawah UMR kota Surakarta. Jam kerjanya mulai pukul 8.00 sampai pukul 13.00 WIB dengan waktu istirahat 1 jam. Selama 6 hari kerja tanpa absent, dia mendapatkan upah Rp 15 000,00 per minggu. Sehingga total setiap harinya Rp 2500,00.

Dengan upah yang kecil ini, baginya sulit untuk mencukupi kebutuhan hidup. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dia berusaha menambah penghasilan dengan berjualan nasi, bersama ibunya yang sudah mempunyai buyut.

Wanita tamatan SD yang bermukim di Pucangsawit ini diberi tanggung jawab bersama kelompoknya membersihkan mulai dari gerbang UNS dilanjutkan Fakultas Pertanian, Kedokteran, Sastra, UP2B dan finishnya di gereja kampus.

Walaupun berat, dia tetap bersikeras memilih pekerjaan ini ketika ditawarkan pekerjaan lain. Pekerjaan ini dipilih karena jarak dengan rumah dekat, teman-temannya banyak, dan boleh istirahat, walaupun ketika tidak masuk juga tidak mendapatkan gaji. Selain itu, dia juga dapat memanfaatkan potongan-potongan ranting untuk dijadikan bahan bakar di rumahnya. Selain sebagai penjaga kebersihan, penjual nasi, dia juga mencucikan pakaian orang.

Suaminya bekerja sebagai tukang becak dan mempunyai upah yang pas-pasan. Dari 6 anaknya, 3 orang hanya lulus SMP, dan tiga lagi masih sekolah di SD dan SMP. Pekerjaan anaknya seorang sebagai buruh di pabrik Indomoto, sebagai buruh bangunan dan satunya lagi sebagai tukang sapu. Dari pekerjaan anaknya ini, dapat dikatakan bahwa wong cilik tetap aja jadi wong cilik. *Sing sugih yo tetep bakalan sugih.*

(Indri)

FENOMENA KEKERASAN KOLEKTIF

Akhir-akhir ini, nilai budaya disintegratif semakin nampak saja. Hal ini secara konkrit dapat dilihat dari gejala-gejala sosial yang terjadi akhir-akhir ini. Demikian menurut Mulyana W. Kusuma ketika berbicara dalam Forum Seminar Budaya di Wisma Mahasiswa di Kestalan akhir Juni lalu.

Dia menambahkan, kalau kita melihat hal ini, mulai tercermin misalnya dalam peristiwa 27 Juli 1996. Di situ nampak jelas bagaimana instrumentasi politik kekerasan (*the politic of violence*). Menurut Mulyana, hal tersebut menodai nilai-nilai kebangsan dan merusak integrasi. Walaupun itu bisa dikatakan sebagai suatu strategi politik.

Mulyana

Abel

Di sisi lain kejadian tersebut akan melahirkan konsekuensi politik. Pertama, sikap menolak politik kekerasan. Manifestasinya macam-macam, melalui berbagai macam resistensi simbolik. Kedua, muncul ketidakpuasan terhadap kekuasaan yang cukup meluas, yang pernah diaplikasikan oleh media massa sepanjang satu tahun.

Selain fenomena di atas juga muncul fenomena kekerasan kolektif yang berdimensi struktural berdimensi SARA, yang terjadi dalam setahun ini. Dan itu tidak lepas dari politik kekerasan itu tadi. **(Abel)**

KITA TELAH DICUCI OTAK

Chandra Kirana foto Ali

Permasalahan sampah yang dewasa ini semakin parah disebabkan karena pola konsumsi masyarakat yang keliru. Ini berkaitan dengan maraknya produk-produk instan, yang semakin membudaya.

Mungkin betul juga, pikiran yang diungkapkan Chandra Kirana yang mewakili *Green Peace* Indonesia ketika memberikan pandangan-pandangan di Hotel Sahid Kesuma, beberapa waktu lalu.

Dalam pandangannya, masyarakat kita telah di cuci otaknya sejak kecil oleh produsen berbagai produk. Dimana kita selalu diajarkan ketidakmampuan untuk berbuat atau bertindak dalam berbagai masalah.

Menurut mba Kiki (panggilan akrabnya), pada jaman dulu orang selalu berusaha mengatasi permasalahan dengan kekuatan yang ada pada dirinya dan bahan-bahan yang ada di sekitar serta yang terpenting bahan-bahan tersebut tidak merusak lingkungan.

"Sedang saat ini kita selalu disuguhi produk-produk instan. Jika produk tersebut telah digunakan maka tempatnya dengan mudah dibuang. Walau praktis namun barang-barang tersebut tidak menyelesaikan masalah. Bahkan lambat laun akan menumpuk dan menumpuk menjadi sampah," ujar aktivis manis ini. Dimana produk-produk tersebut sekarang menjadi pola gaya hidup sebagian masyarakat.

Yang menjadi masalah produk-produk tersebut sulit diuraikan oleh mikroba. Sehingga akan terakumulasi menjadi sampah yang mengganggu keseimbangan alam. Apalagi jika produk tersebut mengandung racun. Untuk itu diperlukan kesadaran kita untuk menggunakan produk yang ramah lingkungan sebagai solusinya. Atau menganjurkan pada produsen untuk membuat produk yang lebih ramah lingkungan, jika tidak kita bisa menggalang kekuatan mengganti produk yang ramah lingkungan. (**Ali**)

JIKA PEJABAT SAKIT

Beginilah kalau pejabat UNS yang juga tokoh *beken* sakit. Tiada waktu untuk istirahat sekejap pun. Ini dialami oleh Drs Suparnadi, Pembantu Rektor III UNS, belum lama ini. Pak Parnadi, panggilan akrabnya, terpaksa "mendekam" di RS Moewardi karena mengalami pendarahan lambung awal Juli lalu. Karena relasinya yang *bejibun*, bisa dimaklumi bila ia harus merelakan jam istirahatnya habis untuk beramah tamah dengan para tamu. Padahal dokter Guntur yang merawatnya mengharuskan dosen Komunikasi ini banyak istirahat. Akhirnya Pak Parnadi yang mempunyai riwayat sakit maag kambuhan itu menemukan ide cemerlang.

Caranya, ia merekam semua hal yang berkaitan dengan penyakit yang dideritanya. "Setiap tamu yang datang rata-rata sama semua pertanyaannya. Jadi, ketimbang saya mengulang-ulang jawabannya, *ya* saya rekam saja," ucapnya pada Kentingan yang turut mendengarkan rekaman itu. Rekaman tersebut berisi asal muasal ia merasa sakit hingga ucapan terimakasih atas simpati penjenguknya.

Dengan begitu mantan rocker ini bisa istirahat.

Drs. Suparnadi ketika dikunjungi kru *Kentingan* foto Ali

JPIFM
106.86 MHz

Radionya Solo

JPI FM 106.85

Berformat : Dangduth Plus

Menu

Mutiara Iman; Pesona JPI; Sensasi JPI;
Langgam & Keroncong JPI; JPI Proaktif;
Requestmania; JPI Indohits;
Special Album: Iwan Fals, KLA Project,
Koes Plus, Chrisye, Evitamala, Rhoma Irama;
Baduth; Mendhut, Indoaksi, Agogo, Sumo,
JPI Bergoyang.

Quis *Napa Niki*
Napa Niku

Quis *Susuku Susumu*

STUDIO : Jl. Mangkubumen Kulon I/2
Solo 57139
☎ (0271) 722542 - 718873

PREDIKSI MARKUM

Oleh: Qory

Sore menunjukan pukul 16.29. Markum baru saja masuk kamar kosnya yang cukup sempit. Hanya ruangan 2 x 2,5 m --tak lebih besar dibanding kamarnya di rumah-- berisi dipan tua, lemari, meja kayu kecil dan sebuah kursi, botol air dan beberapa biji buku yang ia tumpuk begitu saja di lantai. Mirip gudang tua, disebabkan penghuninya jarang menyapu debu-debu yang dibawa angin ke kamar itu, apalagi untuk mengepelnya. Untuk hal ini Markum punya alasan tersendiri yaitu nyaris tak ada waktu untuk melakukan hal itu. Maklum adalah lambang idea- lisme mahasiswa. Idealisme yang telah membuka mata, hati, telinga, dan otaknya terhadap keadaan sekitar masyarakat. Membuka kepeduliannya terhadap kepincangan sosial, terhadap bobroknya mental masyarakat yang mungkin disebabkan oleh penindasan peng-huni "dunia ketiga".

Ah!....

Belum sempat Markum meng-istirahatkan jasmaninya di dipan tua, tiba-tiba matanya mengajak membuka koran yang terbit hari ini. Sebenarnya koran itu bukan hanya dia yang langganan, namun dia tak pernah lupa untuk membacanya, kecuali kalau memang tak ada waktu untuk itu.

Demi sebuah keadilan, akhirnya Markum mengikuti kemauan matanya. Dengan terbaring dia membuka-buka halaman koran, halaman pertama berisi berita "biasa" lainnya yang dilakukan "orang-orang bersih". Halaman kedua tentang perkembangan nasib mobil nasional yang ditentang oleh WTO, halaman ketiga, keempat... dan akhirnnya, lagi-lagi berita tentang ketabahan, kesabaran dan sikap "nerimo" rakyat kecil dalam ....

Tiba-tiba kepala Markum seperti diputar persis baling-baling, perut mual seperti melihat sesuatu yang menjijikan. Dia mencoba menghilangkan pusing di kepalanya dengan memejamkan mata, e... malah tambah dasyat berputarnya, kemudian dia membuka kembali matanya. Kini semua lemari, meja, kursi, buku, lampu ikut-ikutan berputar seperti kepalanya. Ketika Markum berada di puncak putaran kepalanya, teringat dibenaknya akan sebutir benda kecil putih yang tersimpan di lemari bawah, Antalgin. Dia segera meraba ke sana dan hap! ditelannya Antalgin itu tanpa air. Bukankah kita sudah biasa makan tanpa makanan pembuka, makanan penutup dan entah apalagi istilahnya.

Sebutir Antalgin telah sedikit banyak mengurangi putarannya, kemudian dia tertidur.

Adzan Maghrib membangunkan dirinya. Dengan ter-

tatih dia menuju kamar mandi, wudlu. Kembali ke kamar dan sholat maghrib, karena dia tak mampu untuk berdiri beberapa lama maka dia sholat sambil duduk. bukankah itu diperbolehkan? Islam memang agama yang tidak akan dan tidak pernah menyulitkan umatnya.

Markum kembali memba-ringkan tubuh payahnya, dengan harapan sedikit banyak membantu menghilangkan pusing sial di kepalanya. Markum diam, tetapi tidak tidur. Di tengah pusing yang dideritanya, dia mencoba merenung. Apa sebabnya hingga akhir-akhir ini pusing itu sering singgah di kepalanya? Kehujanan. Ah terlalu naif bila menganggap kehujananlah penyebabnya. Bukankah dia sudah kebal dengan segala penyakit "orang gedongan" yang sedikit terkena hujan, pusing. Tersembur debu, flu. Dia adalah anak alam, anak singkong, panas, hujam, debu, lumpur telah menjadi sahabat akrabnya. Tiap hari kehujanan tak membuat dia meringkuk di bilik kecil, seperti saat ini. Dia adalah anak yang telah dieja wantah oleh alam untuk tidak cengeng.

Lalu mengapa ia pusing? Uang menipis? Ah! Lagi-lagi ditepisnya prediksi itu. Uang dari bapaknya masih ada, walau hanya cukup untuk makan seminggu lagi, tapi itu tidak membuatnya khawatir. Bu Prapto, warung langganannya selalu siap menanggung makannya, walau ngebon. Lalu apa? Diingat-ingatnya sekali lagi, bagaimana awal mulanya. Ah! Mungkinkah karena membaca koran sambil tidur? Tidak! Bukankah selama ini dia terbiasa membaca sambil tiduran? Walau sebenarnya ia tahu itu tak baik untuk kedua matanya. Mungkinkah ..... mungkinkah.....

Akhirnya, karena kelelahan berpikir dan menduga-duga Markum tertidur.

***

"Apakah benar, Anda tidak sedang berpikir yang berat-berat?" kata dokter Idris, dokter tua yang dikunjungi Markum siang ini.

"Sejak kecil saya sudah terbiasa berpikir yang berat-berat, berpikir yang seharusnya hanya dilakukan oleh orang dewasa. Bagaimana mungking seorang bocah umur 11 tahun berpikir bagaimana caranya esok hari bisa makan? Dan saya rasa bukan itu penyebabnya, bila saya yang kini telah dewasa terserang pusing hanya berpikir yang berat-berat".

Dokter itu memandang Markum tanpa berkedip, potret anak desa, mungkin itu yang ada dalam pikirannya.

"Tadi anda bilang kehujanan sudah biasa, membaca sambil tidur juga sudah biasa, kurang darah anda mengeleng, berpikir berat bukan sebabnya, lalu apa penyebabnya?

Sungguh aneh, ini baru kali pertama Markum bertemu dengan seorang dokter yang bertanya kepada pasiennya tentang penyebab sakitnya. Dokter ini rupanya cukup demokratis, tidak langsung memvonis penyakit anu, karena anu-anu, tapi malah mengajak diskusi dengan pasiennya. Markum hanya diam berusaha untuk tetap bertahan dengan pusing yang makin menghebat di kepalanya.

"Mungkin saya menderita

penyakit baru, dok?"

Dokter itu menggeleng, sambil menunjukan foto rontgen kepala Markum yang sehat wal afiat.

"Penyakit aneh, dok, yang tak terdeteksi oleh sinar X" Kali ini

"Penyakit aneh, dok, yang tak terdeteksi oleh sinar X" Kali ini Markum bersemangat mengajukan prediksinya.

Dokter itu hanya menatap

Markum. Markum ditatap demikian tidak enak. Dia menunduk, mengkorek-korek tangan kursi dengan kuku jarinya. Sementara itu pusing di kepalanya tambah menghebat, padahal telah ditelannya pil Antalgin pemberian dokter itu. Dia harus bertahan dan dia harus mengatakan hal itu pada dokter.

"Dokter, mungkinkah kepala saya ini pusing karena mata saya membaca, melihat, telinga saya mendengar dan hati saya merasakan ketidak adilan, keserakahan, kesewenang-wenangan, dan rusaknya mental masyarakat. Kepala saya tidak kuat menahan kenyataan bahwa azaz-azaz keadilan dibiarkan lumpuh dan pelaksanaan pemerintah kehilangan sifat pamongnya. Saya rasa itu penyebabnya, dok".

Dokter itu ingin membuka mulut, namun Markum kembali mengemukakan argumennya agar prediksinya diterima oleh dokter itu.

"Hari Senin lalu, kepala saya pusing karena membaca berita penggusuran di koran, hari Rabu saya kembali pusing karena mendengar tindakan kesewenang-wenangan seorang oknum petugas, hari Jum'at kepala saya pusing lagi karena melihat malangnya orang yang telah kehilangan hak asasinya. Sedang hari Selasa, Kamis dan Sabtu saya sehat saja karena memang saya menutup diri terhadap dunia luar. Saya mengurung diri di kamar, saya mencoba untuk tidak memperlihatkan ketidak adilan dan segala macam keserakahan kepada kepala saya Dok. Dan nyatanya saya tidak pusing".

Begitu panjang lebar Markum mengajukan argumennya.

"Ah! Sudahlah, Anda ini sebenarnya cuma sakit kepala biasa, kenapa harus dibesar-besarkan?". Dokter itu sudah mulai putus asa menghadapi sikap Markum yang merasa benar dengan argumennya.

"Tapi Dok, seandainya ini pusing biasa mengapa tidak kunjung reda?, malah kini semua buku, meja, kursi, lemari, bantal, kasur dan semua benda itu mengejek, menghina saya Dok, dan mengatakan bahwa saya hanya seorang mahasiswa yang .... Saya percaya dok, bila pusing saya ini karena penyakit baru, semacam penyakit **Environment Syndrome** atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan di sekitar kita yang ...."

"Ah! Sudahlah, itu hanya istilah yang ada dalam benak Anda. Dalam dunia dokter, tidak ada istilah **Environment Syindrome.** Gila.

Dokter itu mulai tak sabar menghadapi sikap Markus.

"Tapi, Dok...."

"Sudahlah, saya malah bingung melayani Anda. Padahal saya dokter dan Anda pasien saya"

Mata Dokter itu menghujam tepat di mata hitam Markum, ada semacam magma di sana.

Sebelum magma itu meledak, Markum berlari keluar, berlari dan berlari hingga Markum berdiri di depan sebuah peristiwa besar: Benda besar hitam dengan rodanya yang berat, nampak bengis merayap, menggayang, melumat, menelan dan menghabiskan rumah-rumah penduduk yang masih berusaha mempertahankan hak miliknya. Berusaha mencegah pembangunan real estate di atas tanah mereka. Namun kini, yang terdengar hanyalah lolongan, jeritan,

bersambung hal ...69

PERTANYAAN DAN KENYATAAN

Imron Rosyid

Buat Sulungku di medan juang,

Suratmu sudah Bapak baca (*dalam Kentingan Edisi 03*) dan Bapak paham dengan kekecewaanmu. Hanya saja Bapak minta janganlah kau larut dengan kekecewaan dan jangan hanya sebatas prihatin saja melihat kondisi kampusmu. Karena keprihatinan tak pernah bisa merubah apa pun, apalagi keprihatinan dari seorang rakyat kecil yang tak pernah memahami permainan kekuasaan. Lha wong keprihatinan yang dikemukakan orang-orang top, seperti bekas jendral saja tak mengubah apa-apa, malahan dapat tudingan sebagai orang yang sakit hati tok.

Sulungku, akhir-akhir ini banyak sekali kejadian di negeri ini yang tak pernah Bapak pahami, dan orang seperti Bapakmu ini bingung mendengar berbagai macam komentar yang muncul. Ada apa sebenarnya tho Nak ? Mengapa rakyat negeri ini mudah marah dengan membakari gedung-gedung, merusak barang mahal milik orang kaya. Padahal negara kita dikenal sebagai negara yang cinta damai. Apa yang menyebabkan orang-orang yang juga seperti Bapakmu ini berbuat seperti itu itu ? Benarkah karena ada yang menunggangi perbuatan itu, seperti yang Bapak dengar dari radio transitor ? Bapakmu semakin pening mendengarkan komentar dari pejabat dan orang-orang pandai yang semrawut dan bahasanya tak pernah Bapak pahami.

Bapak menjadi semakin pusing mendengar berita kalau di negeri ini ada yang berbuat makar, ingin merebut kekuasaan dengan cara yang tak sesuai dengan undang-undang kita, bertindak tidak sesuai budaya bangsa ini. Tindakan apa dan budaya yang mana, Nak.

Sudah lama orang seperti Bapakmu, seperti kamu, seperti pak likmu yang mburuh di pabrik tidak diperbolehkan berorganisasi, tak boleh tahu politik. Kita selalu saja disuruh untuk ikut membangun tanpa mengerti arti kata itu. Bagaimana bisa berbuat kalau tidak mengerti, ya kan nak.

Nak, ramai orang bilang di negeri ini ada yang mempunyai mental makar. Seperti apa sih makar itu, Nak ? Apa kalau kita menuntut milik kita disebut makar. Apa kalau ada orang yang ingin mempertahankan haknya yang akan direbut orang lain itu adalah perbuatan makar. Apa karena orang berbicara di rumahnya sendiri dengan saudara-saudaranya tentang haknya merupakan mental makar. Itu lho nak seperti yang dilakukan orang-orang PDI saat ketuanya mau digusur, apa betul mereka mempunyai niat seperti itu. Bapak kok nggak yakin mereka berbuat kekerasan karena ingin mengganti kekuasaan. Mereka nekat merusak, melawan petugas menurutku karena mereka mereka tak tahu akan berbuat apa agar milik mereka tak dirusuhi orang lain, mereka ingin mempertahankan haknya yang dirampas orang lain dengan jalan apapun, mereka tak rela bila miliknya berpindah tangan, tapi mereka juga ngak tahu dengan apa mereka harus mempertahankannya.

Bapak juga tak habis pikir dengan pikiran penggede-penggede kita yang mengkomentari peristiwa 27 Juli kemarin. Apa yang membuat mereka mempunyai pikiran seperti yang mereka kaatakan bahwa orang yang mengadakan mimbar bebas itu mempunyai mental makar, padahal berbicara menyuarakan kepentingan mereka sendiri itu kan hak asasi setiap manusia, siapa pun manusia itu dan juga kan di rumahnya sendiri. Mimbar bebas itu pun kan tidak lahir

dengan sendirinya, tapi ada yang menyebabkan. Menurut Bapak sebabnya adalah ketidakpuasan orang-orang PDI terhadap pemerintah yang mendukung acara penggusuruan ketua mereka. Ketidakpuasan itu tak pernah bisa disalurkan, apalagi mendapat perhatian. Malahan dianggap seperti angin lalu. Karena turun ke jalan dilarang maka mereka membuat mimbar bebas yang mereka namakan mimbar demokrasi. Hal inilah menurut Bapak yang menjadi sebab musabab tragedi itu muncul, coba kalau nggak ada acara kongres, tak akan ada mimbar demokrasinya orang-orang PDI, tak akan ada orang yang rebutan kantor, dan tak mungkin kerusuhan kerusuhan itu terjadi.

Terus ada lagi yang membuat Bapak dan tetangga kita di kampung bingung, soal PRD yang dikatakan sebagai organisasinya orang-orang PKI atau setidaknya cara-caranya seperti PKI. Bapakmu tak habis pikir, padahal mereka itu kan sesuai kamu yang lahir setelah PKI dibubarkan, orang-orangnya dibunuhi atau sudah mati? (Aku menjadi ngeri teringat cerita yang ditulis oleh pengarang dari luar negeri, bagaimana pembantaian itu berlangsung, katanya sungai-sungai tak nampak airnya karena dipenuhi mayat orang PKI, dan laut berwarna merah oleh darah), dan juga nenek moyangnya PKI kan sudah dikalahkan, sudah pada ambruk tho. Teman-temanmu di PRD itu kan juga mahasiswa seperti kamu, yang tak pernah mendapatkan pelajaran ilmu-nya komunis, tidak diperbolehkan membaca buku Marxis, apalagi Leninisme meski hanya untuk pengetahuan. Seperti katamu buku-buku itu dilarang dimana pun, buktinya kamu tak pernah menemui di perpustakaan sekolahanmu padahal sekolahanmu itu kan sekolah tinggi. Kalau mereka terus mengenal dan menggunakan cara-cara komunis itu dari mereka mendapatkannya, Nak. Bapak ndak ngerti apanya yang mirip dengan PKI.

Sebagai kata akhir surat ini, Bapak pesan kamu jangan terlalu cepat memberikan suatu kesimpulan, ikut-ikuta memberi tuduhan apalagi tuduhan komunisme. Orang-orang seperti Bapakmu ini sudah terlampau berat menjalani kehidupan yang memang tidak bebas di negerinya sendiri. Jangan kau tambahi beban dengan tuduhan seperti itu, mereka akan semakin takut untuk hidup di negerinya sendiri bila tuduhan seperti itu terus ditimpakan pada orang yang ingin menyuarakan pikirannya. Dan lagi menuduh tanpa bukti yang jelas itu adalah perbuatan fitnah, yang oleh agama kita merupakan dosa besar.

Pesanku yang lain, jangan takut untuk tetap berjuang bersama rakyatmu sendiri. Meski untuk itu memang membutuhkan banyak pengorbanan. Kau bisa mendapat kesempatan sekolah bukan semata-mata karena Bapakmu sendiri yang membiayai, tapi seluruh rakyat ini ikut andil dalam membiayaimu. Jangan sia-siakan amanat yang diberikan kamu. Tunjukkan darma baktimu pada rakyat negeri ini.

Seperti dalam awal surat, untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik, bukan hanya dengan keprihatinan, tapi dengan dengan tindakan dan kerja yang nyata. Perbuatan yang benar-benar diingini rakyat negeri ini untuk dapat hidup lebih baik. Praktekkan ilmu yang kau timba, jangan justru kau gunakan untuk menutup-nutupi suatu keburukan. Kalau hanya prihatin saja, rakyat negeri ini sudah cukup lama hidup dalam keprihatinan dan hidup memprihatinkan. Rakyat butuh tindakan yang nyata. Perbuatan merusak dan menghancurkan milik orang lain bukan yang diinginkan oleh rakyat, karena itu tak akan membawa perubahan pada rakyat, justru membuat rakyat dipersalahkan.

Jangan takut dengan tuduhan yang memang tak kau lakukan. Bapakmu rela andai kau pun dipenjara seperti mereka, seperti pahlawan-pahlawan kita dulu yang dipenjara, dibuang penjajah karena menuntut kemerdekaan. Bapak bangga, asal apa yang kau lakukan tidak membuat rakyat kecil seperti Bapak ini sengsara, asal prinsip-prinsip yang kau pakai kau yakini benar akan kebenaran. Aku rela, Nak. Karena menurutku kebenaran tak bisa dipenjarakan, suara kebenaran tak akan pernah bisa dibungkam.

Wassalamu'alaikum wr wb
Ndeso, akhir Agustus 96.

HARAPAN BANGSA

Oleh :Abu Ghoib

Orang-orang tua, kaum cendekia, kalangan pejabat dan para birokrat, sering disanjung oleh orang Jawa sebagai orang yang pantas *Sinudharsono* (dihormati, pandang pandoming kawula muda) (Kompas bagi penunjuk yang muda) karenanya mereka pantas untuk *tinulat pinangka tepa palupining sesami gesang* (Contoh utama sehingga keserasian hidup ini semakin nyata). Sehingga setiap kesempatan, golongan tersebut, terutama kaum pejabat, pendidik dan pegawai pemerintah yang kesemuanya selalu berkata atas nama orang tua selalu berpesan kepada generasi muda, agar kelak menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, negara dan agama....."kalianlah harapan bangsa" katanya.

Nah, pada akhir kalimat yang hanya dua kata itu harapan bangsa, adalah khusus bagi kaum muda. Tidak pernah orang berkata, atau berharap kepada yang tua sebagai orang-orang yang diharapkan oleh bangsa. Justru dari mulut orang-orang tualah yang sering keluar kata-kata, "kalianlah harapan bangsa" dan itu ditujukan kepada generasi muda.

Hanya saya sering tidak mengerti, tuluskah ucapan itu? Atau benarkah bangsa ini berharap kepada kaum muda? Sebab dari peristiwa ke peristiwa yang melibatkan peran generasi muda, selalu menumbuh suburkan ketakmengertian saya tentang makna "harapan bangsa". Sampai pada pikiran yang negatif, saya selalu tak bisa menghindar dari buruk sangka terhadap kaum tua yang memegang negara itu. Bahwa harapan bagsa yang dimaksudkan itu adalah harapan egoisme kaum tua. Apalagi mereka sering menambah bukti-bukti yang menunjukkan pemakaian bahasa dalam *majas euflmisme*. Mereka sering berkata dengan istilah penyesuaian harga, pada kenyataan yang terjadi adalah kenaikan harga. Mereka menggunakan istilah kesalahan prosedur padahal yang terjadi adalah penyimpangan. Mereka juga berkata perdamain, uang rokok, padahal yang terjadi adalah penyuapan, diamankan untuk mengganti penangkapan, undang-undang pengendalian untuk mengganti legalisasi, lokalisasi.....dan masih banyak lagi. Dan harapan bangsa itu saya curiga, jangan-jangan itu untuk penghalus bahasa juga. Dan sesungguhnya adalah harapan kaum tua iu sendiri ..... Ahhhh.

Hampir, antara kaum muda dan tua tak pernah bisa bertemu dalam satu pikiran, aksi maupun reaksi. Meskipun secara phiskologis dapat dimaklumi, jika yang tua karena kematangannya akan bertindak hati-hati, pelan dan penuh perhitungan. Sebaliknya yang muda akan cenderung revolusioner, grusa-grusu *dan kladuk wani kurang duga*. Yang penting berani bertindak, urusan belakangan. Nah ketika mereka saling bertemu maka yang muda akan mengecap pengecut, lamban dan birokratis terhadap yang tua, sebaliknya yang tua akan menuduh yang muda sebagai anak yang belum hilang pupuk bawangnya (anak-anak) dan dengan bangga mengatakan dirinya telah muda sehingga lebih tahu berpengalaman dan *banyak mangan gempalanning jagad* (lebih banyak merasakan pahit getirnya kehidupan).

Kaum muda sering mengeluh terhadap perilaku generasi muda yang selalu menunjukkan gejala negatif. Suka berfoya-foya dan sama sekali melupakan warisan kaum tua yang menyimpan nostalgia masa muda dengan nilai-nilai kejuangan. Hingga pada akhirnya kaum tua mengeluh bahwa kaum muda tak mewarisi nilai-nilai kejuangan itu.

Sebaliknya kaum muda, mereka tak terlalu pusing memikirkan semua itu. baginya, kenikmatan hari ini, kalau mungkin bisa direguk ... sampai tandas kenikmatan itu ditenggak. Tentang hari esok, lusa ... itu belum pantas dipikirkan.

Berangkat dari kekhawatiran itu, kaum tua selalu berpesan kepada generasi muda agar bisa menjadi orang yang berguna, sebab kaum muda adalah harapan bangsa.

Tetapi kaum muda seperti berada disimpang jalan ketika ingin memenuhi harapan kaum tua. Begitu banyak kemusykilan yang terjadi yang menyangkut etik kebangsawanan dan kenegaraan. Dan bagi kaum muda telah mahfum bahwa yang mengendalikan pemerintahan itu adalah kaum tua yang selalu menceritakan kisah kepahlawanannya ketika usia muda dulu, agar generasi muda sekarang meneladani dan mewarisinya. Bersamaan dengan itu, timbul misalnya kejanggalan-kejanggalan yang mencocok hidung kaum muda. Tentang isue penyimpangan keadilan yang menimpa Mahkamah Agung beberapa waktu lalu. Sebenarnya ada orang tua yang arif dalam rangka menjaga citra lembaga kehakiman tertinggi itu, namun mayoritas orang tua mengatakan bahwa itu hanya kesalahan prosedur, tidak ada penyimpangan. Padahal, bukan saja kaum muda yang mengerti, masyarakat pun telah tahu apa sesungguhnya pengertian prosedur itu... dengan darah mudanya, dan dengan kesadaran sebagai putra bangsa, apalagi teringat harapan oleh kaum tua sendiri... bahwa pemuda adalah harapan bangsa, mereka pun bereaksi. Dengan dipelopori kalangan mahasiswa mereka berteriak keras, dan dengan darah mudanya mereka turun ke jalan, menuntut agar bangsa ini dibersihkan dari kekotoran. Tetapi orang tua

menganggap tindakan kaum muda itu sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi sehingga cenderung menimbulkan kekacauan... keluarlah kaum tua untuk memberi wejangan dan mengingatkan kepada kaum muda bahwa "kalianlah harapang bangsa".

Dan masih banyak letupan-letupan lain di Ujung Pandang, Jakarta , Surakarta, Purwakerto, Yogyakarta dengan masahal-masalah yang beragam pula... kaum muda itu berteriak-teruiak di jalan. Mereka mengkeritik praktek-praktek kotor dalam birokrasi. Korupsi, kolusi, dan tindakan-tindakan ketidakadilan yang menimpa kaum papa. Tetapi karena selalu saja kaum muda menimbulkan gejolak sebagai akibat tindakan yang inkonstitusional -menurut kaum tua-, maka kaum muda itu selalu diingatkan kaum tua. Dan setelah memberi ceramah yang menyejukkan rokhani, di akhir kotbahnya kaum tua mengingatkan lagi bahwa bangsa ini tidak berharap kepada siapa-siapa, kecuali kaum muda yang masih segar. Sambil menunjukkan keloyoan dirinya kaum tua itu seperti ingin secepat mungkin menyerahkan apa yang sekarang dipegangnya itu kepada kaum muda, "karena itu", katanya, "janganlah kalian selalu berbuat ceroboh, terburu-buru dan irasional dalam bertindak. Kalianlah harapan bangsa..."

Sekarang, setelah peristiwa sabtu kelabu itu, hampir semua gerakan mahasiswa dan kaum muda itu terhenti, istirahat atau bahkan mati sama sekali. Tapi saya menduga itu bukan karena strategi apa lagi takut, tetapi lebih karena kesadaran, barang kali! Sekali lagi, barang kali! Mereka sekarang tengah berkhalawat di gua-gua, untuk merenungkan dan mencoba memahami harapan bangsa itu seperti apa. Dan tindakkan apa lagi yang harus mereka kerjakan sehingga untuk menjadi harapan bangsa itu, setiap tindakkannya tidak selalu disalahkan. Memang orang tua tidak pernah menyalahkan tindakkannya itu, tetapi setiap kali selalu diingatkan bahwa dirinya adalah harapan bangsa, kaum muda tidaklah golongan yang lambat menangkap *pasemon* (sindiran). Bahwa tindakkannya tidak diperkenani oleh kaum tua yang bijaksana itu. Sementara di sisi lain, kawan-kawan mereka yang terjerumus kepada kelalaian hedonistis dengan perilaku foya-foyanya juga disalahkan oleh kaum tua. Jadi, yang ini salah yang itu pun keliru. Nah, biarkan memahami dengan ketenangan hatinya tentang makna harapan bangsa itu.

Kaum muda mulai menduga-duga dan memaknai istilah harapan bangsa itu sebagai generasi yang tak mau tahu dengan lingkungannya. Sebab, sebagai orang muda tugasnya yang utama adalah belajar dan belajar... sehingga ia menjadi orang yang pandai menghapal buku dan mencatat semua pelajaran guru-gurunya. Dan untuk memperoleh nilai yang baik, mereka harus mengulang kembali semua kata-kata gurunya, menulis ulang kalimat-kalimat dalam buku tek, dan menjauhkan diri dari sikap menafsirkan atau berfikir lain, sebab sekarang mereka tahu bahwa itu bukan harapan bangsa, menurut kaum tua.

Bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang baik maupun yang buruk, hanya pantas untuk diketahui dan tangannya mencatat. Kemudian telinganya dipasang lebar-lebar untuk mendengar nasihat gurunya, bahwa yang baik pantas ditiru, dan kalau ada yang jelek hendaknya dibuang jauh-jauh. Dan semuanya harus menjadi pelajaran. sehingga nanti, jika orang lain bertanya, lidahnya akan fasih menjawab bahwa yang baik pantas ditiru dan yang jelek dibuang jauh-jauh.

Bahwa harapan bangsa itu adalah menjadi anak yang baik, diam, menurut, dan selalu patuh pada nasihat orang tua, tidak melawan kepada orang tua, dan meyakini apa yang dilakukan orang tua adalah baik adanya. Sebab sejahat-jahatnya singa tak mungkin menelan anaknya. Dan betapa pun orang tua berbuat dan bertingkah, jangan kuatir jika itu membahayakan kaum muda.

Maka jika orang tua berkata bahwa warna yang terbaik adalah kuning, itu adalah semata-mata selera saja. Jika para pelajar diminta untuk apel satgas pelajar dengan kaus kuning, betul-betul ini soal selera. Jadi anak muda jangan banyak menaruh curiga, sebab orang tua itu kebi-jaksanaannya linuwih, apa lagi jika hanya sekedar dibanding yang muda. Paham...?!! ***

Sambungan dari hal 63

tangisan, anak manusia memecah keajaiban besar telah terjadi, pusing di kepala Markum mendadak hilang, musnah terbang dibawa angin kegerahan. Mungkinkah kepala Markum telah kebal melihat peristiwa besar itu dan perisiwa besar lainnya nanti?

Surakarta, Nopember 96

Pemenang Kuis Kentingan Edisi 03

Pemenang I : **Siti Nurhaeti** (FKIP PMP 1994)
Berhak atas 1 Travel Bag GG
Pemenang II : **Sularsih** (FKIP PLB)
Anggoro Teguh (Bekonang SKH)
Berhak atas 1 payung
Pemenang III: **Siti Marsidah** (Sastra)
Kurnia Utami (FISIP)
Berhak atas Kaos GG
Pemenang IV: **M. Budi Santoso** (FISIP)
Ninik Andriyani (FISIP)
Berhak atas asbak cantik

Hadiah dapat diambil di sekretariat Kentingan di Mesen, paling lambat akhir September 1997.

ULANG TAHUN GBW KE-20

Mahasiswa Pencinta Alam UNS, Garba Wira Buana pada tanggal 18 Juni 1997 genap berusia 20 Tahun. Dalam rangka peringatan 2 dasa warsa Garba Wira Bhuana mengadakan serangkaian kegiatan secara berantai yaitu Bakti Sosial, Pendakian napak tilas dan upacara resepsi peringatan.

Sebagai salah satu unit kegiatan Mahasiswa tertua di UNS, mereka ingin membuktikan karya baktinya bukan saja pada almamater, namun juga pada masyarakat umum, hal ini diwujudkan dengan bakti sosial yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Juni di desa Kenalan, Ngrambat Magelang. GBW membangun fasilitas MCK bagi masyarakat Kenalan.

Sedangkan Pendakian Napak Tilas dilakukan pada tanggal 16-19 Juni di Gunung Merbabu. Dengan menelusuri jejak-jejak pendahulu GBW mereka ingin mengenang sejarah kelahirannya.

Puncak peringatan ini ditandai dengan upacara sederhana di Kampus Mesen, yang selama ini menjadi *base camp* kegiatannya. Meski berlangsung apa adanya, dan tanpa kehadiran birokrat kampus, namun hal ini tidak mengurangi kemeriahan suasana. Dihadiri puluhan anggota dan wakil dari berbagai UKM dan Mapala dari berbagai PT di Solo, peringatan berlangsung khidmat.

Selamat Ulang Tahun GBW, Selamatkan Bumi Kami dan Sukses Selalu.

KPMS :

Organisasi Alternatif Baru Di Solo

Pada tanggal 11 Juni 1997, berbagai mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Solo, dengan dimotori mahasiswa UNS, membentuk sebuah organisasi alternatif, Komite Pemuda dan Mahasiswa Surakarta (KPMS). Dalam deklarasinya, dijelaskan oleh Rr. Ignatia Shinta, yang juga ketua KPMS, bahwa organisasi ini dimaksudkan sebagai usaha untuk mendinamisir gerakan mahasiswa di Solo, yang telah lama terlelap semenjak peristiwa 27 Juli.

Sebagai sebuah organisasi alternatif non formal, KPMS berharap agar apa yang dilakukan nantinya mendapatkan respon dari semua pihak yang terkait. Karena apa yang diperjuangkan sebenarnya merupakan permasalahan yang dihadapi mahasiswa sehari-hari, seperti kebebasan akademik, kampus yang otonom dan lain-lain.

Dengan empat departemen, departemen pendidikan, kerja sama, organisasi dan usaha, KPMS memiliki berbagai program strategis, diantaranya adalah memperjuangkan organisasi mahasiswa dan pemuda yang independen dan demokratis.

PENINDASAN ADALAH KEJAM
NAMUN MEMBIARKAN PENINDASAN
BERLANGSUNG ADALAH LEBIH KEJAM

(Ayatullah Khomeini)

PESAN INI DISAMPAIKAN OLEH LPM KENTINGAN DALAM RANGKA PERINGATAN 1 TAHUN PERISTIWA 27 JULI

MAMA PAPA

apa itu gajah?
apa itu badak?
apa itu harimau?
apa itu kijang?

Semua itu pertanyaan yang tak akan terjawab
bila semua telah punah

Iklan Layanan Masyarakat ini dipersembahkan oleh Gita Pertiwi

RIZKY
OFFSET SOLO

Telp. (0271) 715830 HP. 082-271-2120

Jl. Sri Narendro VII No. 4 Begalon RT. 06/IV

Panularan (Utara Lap. Tipes) Solo

DENAH LOKASI

Melayani :

- Separation Printing
- Catalog Book
- Setting & Design Computer
- Hot Print
- Plate Making

Menjamin Mutu dan Harga

BANK BPD JATENG